

Setara, Berdaya dan Inklusif

Cerita Perubahan dan Pembelajaran



Setara, Berdaya dan Inklusif

Cerita Perubahan dan Pembelajaran

Penulis:

Tim UDN - Kupang

Tim LRC - Lombok Timur

Tim Rumah Generasi - Kota Ambon

Tim RPS - Kota Kendari

Tim YESMa - Tana Toraja

Tim YLP2EM - Parepare

Tim BaKTI - Maros

Tim INKLUSI - BaKTI

YAYASAN BaKTI 2025

Setara, Berdaya dan Inklusif

Cerita Perubahan dan Pembelajaran

Penulis:

Tim program Ume Daya Nusantara (UDN) Kupang, Lombok Research Center (LRC) Lotim, Lembaga Rumah Generasi (LRG) Ambon, Rumpun Perempuan Sultra (RPS) Kendari, Yayasan Eran Sambure Mayang (YESMa) Toraja, Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) Parepare, Tim BaKTI Maros dan Tim INKLUSI-BaKTI.

Editor:

Halia Asriyani, Lusia Palulungan, M. Ghufuran H. Kordi K., Rivai, Victoria Ngantung, Zuriah Auliah Abdullah

Desain sampul dan tata letak :

Frans Gosali

Dokumentasi foto :

Yayasan BaKTI dan Sekretariat Program INKLUSI

Penerbit:

Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI)

Alamat:

Jl. Daeng Ngeppe No. 1/10
Makassar 90223
Telp: 62 411 832228; 62 411 833383

Email: info@bakti.or.id

Website: www.bakti.or.id

Cetakan Pertama Juni 2025

- Hak Cipta dilindungi undang-undang
- Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

xxx + 286 hal., 14,85 x 21 cm

ISBN 978-634-04-2995-4

Publication Disclaimer

Publikasi ini telah disusun dan dicetak oleh Yayasan BaKTI dengan dukungan dari Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI). INKLUSI berusaha untuk meningkatkan partisipasi kelompok marginal dalam pembangunan sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia, serta manfaat yang mereka peroleh dari pembangunan tersebut. INKLUSI bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan organisasi masyarakat sipil untuk mendorong upaya memajukan kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Buku ini Tidak Diperjualbelikan

SAMBUTAN DIREKTUR EKSEKUTIF YAYASAN BaKTI

Awal tahun 2025 Program INKLUSI (Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif) yang dikelola oleh Yayasan BaKTI telah berjalan tiga tahun. Dalam kurun waktu tersebut, cukup banyak capaian, pembelajaran, dan pengalaman yang harus diapresiasi. Buku berjudul Setara, Berdaya, dan Inklusif: Cerita Perubahan dan Pembelajaran, yang saat ini berada di tangan anda adalah buku mengenai capaian, pembelajaran, dan pengalaman Program IKLUSI-BaKTI.

Pelaksanaan program seperti Program IKLUSI, adalah aktivitas yang menggunakan dan melibatkan pengetahuan dan memproduksi pengetahuan. Penyusunan program dilakukan dengan menggunakan data dan analisis untuk memastikan bahwa, program dan kegiatan yang direncanakan dan dilakukan dapat mengatasi atau memecahkan masalah. Demikian juga, dalam implementasi program dan pelaksanaan kegiatan, tidak hanya untuk mencapai tujuan, tetapi juga menghasilkan pembelajaran, pengalaman, dan memproduksi berbagai pengetahuan.

Yayasan BaKTI sebagai lembaga yang salah satu platformnya adalah berbagi pengetahuan, dalam setiap programnya selalu mem-

produksi dan mendokumentasikan pengetahuan, pembelajaran, pengalaman, cerita perubahan, cerita sukses, dan sebagainya. Ini strategis dan penting dilakukan agar hal-hal baik yang dihasilkan oleh program tidak sekadar menjadi capaian lembaga, tetapi juga bermanfaat bagi banyak pihak.

Capaian, pengalaman, dan pembelajaran suatu program lebih bermanfaat, jika dapat diakses oleh pihak lain, kemudian dapat dikritisi, ditiru, dimodifikasi, dan direplikasi ke tempat lain. Bahkan dokumentasi sebuah program perlu juga menyajikan berbagai hambatan dan kegagalan, sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi pelaksana maupun pihak-pihak yang ingin mereplikasi program tersebut.

Di negeri ini, banyak sekali program atau proyek dikerjakan hanya untuk mencapai target. Tentu program atau proyek tersebut juga menghasilkan pembelajaran dan pengetahuan. Namun dokumentasinya hanya dalam bentuk pelaporan atau dokumentasi yang akan menjadi arsip, dan akan dimusnahkan bila telah melewati batas yang ditentukan. Jika pun ada publikasi, tidak lebih dari publikasi di media sosial dengan caption terbatas untuk sekadar menyampaikan kepada publik.

Yayasan BaKTI berupaya untuk memproduksi pengetahuan di dalam program-program yang dilakukan. Dengan begitu, program-program yang telah dilaksanakan tidak sekadar menghasilkan dokumen yang nantinya akan dimusnahkan, tetapi menjadi pekerjaan abadi, yang bisa diakses dan digunakan oleh siapa pun dan di manapun.

Upaya untuk meminta kepada tim program di semua mitra Yayasan BaKTI dalam Program INKLUSI, untuk menuliskan berbagai capaian, pengalaman, dan perubahan, tentu tidak mudah, apalagi tim program di mitra juga melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai target. Karena itu, sebagai pribadi dan Direktur Yayasan BaKTI, saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah meluangkan waktunya untuk menulis dan mengirimkan tulisannya ke Tim Program INKLUSI-BaKTI. Terima kasih juga kepada Tim Program INKLUSI-BaKTI yang telah mengumpulkan tulisan dari mitra sehingga menjadi buku seperti ini.

Semoga buku ini dapat menginspirasi munculnya berbagai upaya dan inisiatif baru untuk pembangunan yang inklusif.

Makassar, Juni 2025

MUHAMMAD YUSRAN LAITUPA

PRAKATA EDITOR

Buku berjudul *Setara Berdaya dan Inklusif: Cerita Perubahan & Pembelajaran* ini adalah buku kedua yang berisikan cerita perubahan dan pembelajaran, yang ditulis oleh tim program mitra Yayasan BaKTI dalam Program INKLUSI (Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif) dan Tim Program INKLUSI-BaKTI. Buku sebelumnya atau buku pertama berjudul *Menuju Masyarakat Inklusif Cerita Perubahan & Pembelajaran*.

Seperti buku pertama, buku kedua ini adalah kumpulan cerita perubahan dan pembelajaran yang ditulis Tim Program INKLUSI. Buku ini berisikan cerita perubahan dan pembelajaran yang ditulis tahun 2024-2025, sehingga tulisan-tulisan di buku ini bercerita mengenai perkembangan Program INKLUSI-BaKTI, berupa capaian, pengalaman, cerita perubahan, cerita baik yang perlu dibagikan, dan tantangan yang juga tentu menjadi pembelajaran.

Program INKLUSI-BaKTI diimplementasikan Yayasan BaKTI di tujuh kabupaten/kota pada lima provinsi. Pada 6 kabupaten/kota, BaKTI bekerja sama dengan mitra daerah atau mitra lokal, yaitu Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) di Kota Parepare, Yayasan Eran Sangbure Mayang (YESMa) di Kabupaten Tana Toraja, Yayasan Rumah Generasi (RG) di Kota Ambon, Rumpun Perempuan Sulawesi

Tenggara (RPS) di Kota Kendari, Yayasan Ume Daya Nusantara (UDN) di Kabupaten Kupang, dan Lombok Research Center (LRC) untuk Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Maros ditangani langsung oleh BaKTI dengan membentuk Tim INKLUSI untuk wilayah Maros.

Tulisan-tulisan yang disebut sebagai Cerita Perubahan dan Pembelajaran ini berasal dari tujuh wilayah program INKLUSI-BaKTI. Artikel-artikel di dalam buku ini, satu dan lainnya bisa sama dan terkait, baik substansi maupun redaksi. Itu terjadi karena program ini menggunakan pendekatan yang sama, walaupun dalam pelaksanaannya, berbagai strategi dan adaptasi dilakukan untuk penyesuaian dengan wilayah masing-masing.

Struktur buku ini disusun berdasarkan kabupaten/kota wilayah program. Jadi, kabupaten/kota dijadikan semacam bab, yang di dalamnya berisikan tulisan-tulisan di wilayah tersebut. Tulisan-tulisan di dalam buku ini ditulis mulai dari level direktur hingga asisten program atau pendamping di tingkat desa/lembang (sebutan desa di Toraja); negeri (desa adat di Ambon) dan kelurahan. Bagian akhir buku ini dimuat tiga tulisan yang ditulis oleh Tim Program INKLUSI-BaKTI. Sebanyak 40 tulisan dihimpun di dalam buku ini, yang secara ringkas dijelaskan sebagai berikut.

Dimulai dari Kabupaten Kupang, Program INKLUSI-BaKTI dilaksanakan oleh UDN. Di dalam buku kedua ini, Tim INKLUSI-UDN menulis lima cerita perubahan dan pembelajaran. Pertama, artikel berjudul *Padupadan Data Kemiskinan, Menuju 'No One Left Behind'* ditulis oleh Damaris J. Thunay. Koordinator Program

INKLUSI-UDN menceritakan pengalaman UDN menginisiasi pertemuan dengan lembaga-lembaga pemerintah terkait untuk memadukan dan memadankan data kemiskinan. Melalui pertemuan ini, lembaga-lembaga yang mempunyai data menyandingkan data-data yang dimiliki untuk mengetahui kelompok rentan dan marginal yang belum mendapatkan bantuan dan lain-lain, serta warga yang mendapatkan bantuan, padahal mereka tidak layak menerimanya.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Chrisantus Tanmenu berjudul *Mewujudkan Desa Inklusi*. Chrisantus mengisahkan Desa Oenoni yang membentuk organisasi disabilitas di tingkat desa. Organisasi yang diketuai oleh Nappoleon Ataupah ini merupakan wadah untuk penyandang disabilitas dalam memperjuangkan hak-hak mereka di desa.

Ketiga, tulisan berjudul *Membebaskan Desa Dari Kekerasan* yang ditulis oleh Ivonny Tallo. Ivonny mengisahkan pengalaman UDN mengembangkan Layanan Berbasis Komunitas (LBK) yang kini menarik Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk membuat buku Panduan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang ditangani oleh komunitas.

Keempat, artikel berjudul *Mengenalkan Jurnalisme Berperspektif GEDSI* ditulis oleh Simon Sadi Open, yang menceritakan pengalaman seorang perempuan jurnalis di Nusa Tenggara Timur, Lidia Radja. Menurut Lidia, dia baru mengenal pendekatan *Gender Equality, Disability and Social Inclusion* (GEDSI) dalam jurnalisme.

Karena itu, ia menyampaikan terima kasih kepada Program INKLUSI dan UDN yang memberinya kesempatan untuk mengikuti kegiatan di Forum Jurnalis dan penguatan jurnalis untuk isu GEDSI.

Kelima, Frida Roman menulis artikel berjudul *Usaha yang Memberdayakan*. Frida menceritakan usaha pariwisata D'Mini Beach milik Daud Mini di Desa Uiasa, Kecamatan Semau. UDN mendorong dan memfasilitasi D'Mini Beach untuk melengkapi izin dan menghubungkannya dengan Asosiasi perusahaan perjalanan wisata (Asita) dan Kamar dagang dan industri (Kadin), agar usaha tersebut dapat berkembang.

Di Kabupaten Lombok Timur, Program INKLUSI-BaKTI dilaksanakan oleh LRC. Di buku ini, Tim LRC menyumbang enam cerita perubahan dan pengalaman. Pertama, tulisan berjudul *Demi Mereka Kami Siap: Pengalaman Sekolah Menerima ABK*. Artikel ini ditulis secara bersama oleh Tim Program INKLUSI LRC, yang mengisahkan pengalaman beberapa sekolah di Kabupaten Lombok Timur, yang menerima siswa Anak berkebutuhan khusus (ABK). Di tengah keterbatasan dan kekurangan, sekolah-sekolah tersebut tetap menerima siswa ABK, dan kemudian mereka berusaha untuk memberikan pelayanan bagi siswa-siswa tersebut.

Kedua, artikel berjudul *Pendidikan Inklusif, Siapkah Lombok Timur?* Artikel ini juga ditulis bersama oleh Tim Program INKLUSI LRC, yang mengulas berbagai permasalahan pendidikan di Kabupaten Lombok Timur, yang perlu diatasi oleh pemerintah untuk menuju pendidikan yang inklusif. Di tengah keterbatasan dan banyaknya tantangan, sejumlah pihak misalnya, sekolah-sekolah di bawah

Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur juga siap menjadikan sekolah-sekolah mereka sebagai sekolah inklusif.

Ketiga, tulisan berjudul *Komitmen UGR Menghapus Kekerasan di Kampus*, yang ditulis bersama oleh Tim Program INKLUSI LRC. Artikel ini mengisahkan pengalaman Universitas Gunung Rinjani yang didukung oleh LRC dalam memperkuat Satgas Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), yang berubah menjadi Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT). Sejumlah kegiatan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di UGR.

Keempat, artikel Baiq Titis Yulianty berjudul *Partisipasi Bermakna Kelompok Rentan*. Titis menceritakan pelaksanaan diskusi kampung yang dapat meningkatkan partisipasi kelompok rentan dan marginal. Menurut Titis, mereka yang paling marginal pun berani menyampaikan pendapat, walaupun dengan bahasa yang tidak terstruktur atau dengan bahasa lokal, karena isu yang didiskusikan adalah masalah mereka.

Kelima, artikel berjudul *Menjemput Asa untuk Uni* oleh Lalu Farouq Wardana. Farouq menceritakan Fitriati, seorang pendamping perlindungan sosial di LBK/Kelompok Konstituen Sehati, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, yang ke sana ke mari, berjuang agar Uni dapat menjalani operasi. Keenam, Baiq Titis Yulianty menulis artikel berjudul *Kita Memang Disabilitas, Tapi Kita Harus Berkualitas*. Tulisan ini mengisahkan Ade Usman, seorang penyandang disabilitas netra sejak lahir. Namun, Ade adalah

penyandang disabilitas yang produktif, dia bekerja untuk membantu keluarganya.

Pelaksanaan Program INKLUSI-BaKTI di Kabupaten Maros oleh Tim yang dibentuk oleh BaKTI. Pada buku ini Tim Maros menyumbang enam tulisan. Pertama, artikel berjudul *Inisiatif Inklusif di Desa* yang ditulis oleh Syifa Ramadhani Azzahra. Tulisan ini menceritakan inisiatif-inisiatif Pemerintah Desa Borikamase menuju desa inklusif. Pemerintah Desa Borikamase memulai hal-hal yang dianggap kecil, misalnya membuat bidang miring di kantor desa, kemudian mendorong pembentukan kelompok disabilitas di desa, memfasilitasi usaha untuk kelompok disabilitas, dan membuat Peraturan Desa tentang Desa Inklusif.

Kedua, artikel berjudul *Kolaborasi di Desa Mangaloreng* yang ditulis oleh Syifa Ramadhani Azzahra dan M. Ghufra H. Kordi K. Artikel ini adalah cerita mengenai kolaborasi antara kelompok konstituen, pemerintah desa, dan Koramil 1422-02/Bantimurung dalam membangun sebuah rumah bagi pasangan lanjut usia disabilitas. Rumah tersebut dibangun atas dukungan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), yang pengerjaannya dibantu oleh Koramil 1422-02/Bantimurung.

Ketiga, artikel berjudul *Membangun Ketenagakerjaan Inklusif* oleh Syifa Ramadhani Azzahra. Artikel ini menceritakan pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan pada tahun 2023, dan dalam waktu singkat ULD tersebut menjalankan fungsinya dalam mendorong ketenagakerjaan inklusif.

Keempat, Syifa Ramadhani Azzahra menulis artikel berjudul *Menuju Pendidikan Inklusif* di Kabupaten Maros. Tulisan ini

menceritakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Maros, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros dalam upaya pengembangan pendidikan inklusif, yang diikuti dengan implementasi di tingkat sekolah. Pemerintah Kabupaten Maros juga meningkatkan kapasitas guru melalui pelatihan dan studi tiru di kabupaten/kota yang mempunyai pengalaman dalam pengembangan pendidikan inklusif.

Kelima, tulisan Syifa Ramadhani Azzahra berjudul *Dari Harapan Menuju Kemandirian*. Artikel ini mengisahkan inisiatif individu dan kelompok dalam mengembangkan usaha. Sementara itu, Program INKLUSI-BaKTI Maros mendukung pengembangan usaha tersebut, dengan menghubungkan mereka ke lembaga-lembaga terkait untuk legalitas usaha, penguatan, dan jaringan.

Tim INKLUSI-YESMa di Kabupaten Tana Toraja pada buku ini menyumbang lima tulisan. Sebanyak empat tulisan di antaranya ditulis oleh Matias Tanan. Pertama, tulisan berjudul *Advokasi Kebijakan untuk Peningkatan Pelayanan* oleh Matias Tanan. Tulisan ini menceritakan advokasi yang dilakukan oleh YESMa untuk mendorong pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Pendidikan dan ULD Bidang Ketenagakerjaan.

Kedua, tulisan Matias Tanan berjudul *Membangun Lembang Inklusi*. Tulisan ini berisikan pengalaman YESMa dalam mendorong proses menjadikan lembaga/desa menuju lembang inklusi.

Ketiga, artikel berjudul *Mendukung Pengembangan Kelompok Usaha*, yang ditulis oleh Matias Tanan. Artikel ini berisi cerita

mengenai dukungan YESMa untuk pengembangan usaha kelompok. Pengembangan kelompok tidak harus dimulai dengan membentuk kelompok baru, tetapi memperkuat kelompok usaha yang sudah ada.

Keempat, artikel berjudul *Mengenal UPTD PPA di Tana Toraja*. Artikel ini ditulis oleh Matias Tanan dan Lenynda Tondok, yang mengenalkan beberapa kemajuan yang dicapai oleh UPTD PPA Tana Toraja. UPTD PPA Tana Toraja dibentuk tahun 2023 atas upaya yang dilakukan oleh YESMa, yang kini telah mengalami beberapa kemajuan, seperti telah mempunyai Standar Operational Prosedur (SOP) dan mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kelima, tulisan yang ditulis oleh Matias Tanan berjudul *Kerja Sama untuk Pembukaan Program Studi PLB*. Tulisan ini menceritakan upaya yang dilakukan YESMa bekerja sama dengan Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja untuk pembukaan Program Studi Pendidikan Luar Biasa di UKI Toraja, yang didukung oleh Komisi Nasional Disabilitas (KND).

Program INKLUSI-BaKTI di Kota Ambon dilaksanakan oleh Rumah Generasi, yang pada buku ini menyumbang enam tulisan. Pertama, tulisan berjudul *Magang, Membuka Akses Kerja untuk Disabilitas*, yang ditulis oleh Yunita Luhulima. Artikel ini berisi pembelajaran yang baik mengenai upaya untuk memberi akses kerja bagi penyandang disabilitas, yang dimulai dengan magang. Dengan magang, penyandang disabilitas dikenalkan lingkungan kerja, sekaligus mereka bersosialisasi dengan para karyawan atau pekerja yang telah ada.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Fianty Fristianty berjudul *Kerja Kecil yang Membuat Orang Senyum*. Tulisan ini menceritakan pengalaman Pokja Inklusi Manggurebe Maju, Negeri Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, yang melakukan advokasi untuk pemenuhan hak-hak anak dengan disabilitas.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Fianty Fristianty dan M. Ghufan H. Kordi K berjudul *Menghapus Stigma pada Orang dengan Kusta*. Tulisan ini menceritakan upaya Pokja Inklusi Ina Ama, Desa Hunuth, Kecamatan Teluk Ambon, untuk menghapus stigma terhadap mereka yang menyandang kusta dan mereka yang pernah menyandang kusta. Pokja Inklusi Ina Ama melakukan sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TBC, Kusta, & HIV AIDS).

Keempat, Yunita Luhulima menulis artikel berjudul *Memfasilitasi dan Memperkuat Kelompok Usaha*. Artikel ini mengisahkan pengalaman Rumah Generasi memperkuat unit usaha, dengan menghubungkan unit usaha tersebut pada lembaga dan perusahaan, sehingga dapat membuka jaringan untuk peningkatan kualitas produk dan pemasarannya.

Kelima, artikel berjudul *Pemberdayaan Ekonomi Bagi Disabilitas*, yang ditulis oleh Yunita Luhulima dan M. Ghufan H. Kordi K. Artikel ini menceritakan upaya Rumah Generasi memfasilitasi penyandang disabilitas untuk memiliki usaha. Josias adalah penyandang disabilitas yang saat ini mempunyai usaha penjualan minyak tanah berkat upaya Rumah Generasi.

Keenam, tulisan berjudul *Pembentukan Peraturan Desa/Negeri Inklusi* yang ditulis oleh Oktofjanus Pattikawa. Artikel ini

menceritakan pengalaman Rumah Generasi mendorong proses desa/negeri menjadi desa/negeri inklusi dengan pembentukan Peraturan Desa/Negeri tentang Desa/Negeri Inklusi.

Di Kota Kendari pelaksana Program INKLUSI-BaKTI adalah RPS, yang pada buku ini menyumbang enam tulisan. Pertama, Sulhani menulis artikel berjudul *Advokasi Perda Disabilitas*. Artikel ini mengisahkan pengalaman RPS mendorong pembahasan kembali Draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Kendari tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang mangkrak sejak tahun 2018. Melalui proses yang cukup panjang dan melibatkan berbagai pihak, termasuk dengan organisasi penyandang disabilitas, akhirnya menghasilkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Disabilitas.

Kedua, artikel berjudul *Kerja Pendamping di Kelompok Konstituen* ditulis oleh Wa Erni. Artikel ini menceritakan suka duka pendampingan yang dilakukan Kelompok Konstituen Mepokoaso dalam mendampingi warga. Mereka bekerja secara sukarela, harus bolak-balik dan menunggu ketidakjelasan, namun mereka tidak menyerah hingga orang yang didampingi mendapat kejelasan dan memperoleh pelayanan.

Ketiga, Sulhani kembali menulis artikel berjudul *Memperkuat Layanan Berbasis Komunitas*. Tulisan ini mengisahkan pengalaman RPS dalam memperkuat Layanan Berbasis Komunitas (LBK) dalam penanganan dan pendampingan kasus-kasus kekerasan dan perlindungan sosial. Hasilnya, LBK sudah aktif menangani kasus-

kasus yang dilaporkan, dan sudah membangun jaringan dan kerja sama dengan instansi pemerintah dan lembaga lain.

Keempat, artikel berjudul *Jurnalis dan Media sebagai Mitra dalam Advokasi* yang ditulis oleh Sitti Zahara. Artikel ini menceritakan pengalaman RPS dalam menguatkan jurnalis mengenai isu *Gender Equality Disability and Social Inclusion* (GEDSI), yang kemudian para jurnalis tersebut menjadi mitra RPS dalam mendukung advokasi yang dilakukan.

Kelima, Sitti Zahara menulis artikel berjudul *Sekolah Inklusif, Pendidikan untuk Semua*. Pada artikel ini, Sitti Zahara mengisahkan kerja sama RPS dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kendari mengembangkan sekolah inklusif. Untuk implementasi maka SMPN 2 Kendari ditunjuk sebagai contoh atau sekolah piloting. Beberapa terobosan telah dilakukan SMPN 2 Kendari, mulai dari kebijakan, anggaran, penyesuaian kurikulum dan proses belajar mengajar, serta membangun sarana dan prasarana sekolah yang aksesibel.

Keenam, artikel berjudul *Penguatan Ekonomi di Kelompok Konstituen* yang ditulis Sarsina. Artikel ini menceritakan inisiatif kelompok konstituen yang membentuk kelompok usaha bersama, dengan memproduksi abon ikan. Kelompok ini, kemudian mendapat dukungan dan penguatan RPS untuk meningkatkan kualitas produksi dan menghubungkannya dengan pihak lain.

Program INKLUSI-BaKTI di Kota Parepare dilaksanakan oleh YLP2EM, yang pada buku ini menyumbangkan lima tulisan.

Pertama, artikel yang ditulis oleh Sappe Angka berjudul *Dari dan untuk Kelompok Rentan*. Tulisan ini menceritakan inisiatif kelompok konstituen mengembangkan usaha bakso goreng dari ikan sebagai camilan anak-anak. Usaha ini sudah cukup berkembang setelah mendapat dukungan dari CSR Pertamina, yaitu pelatihan pembuatan bakso goreng, kemudian mendapatkan peralatan berupa wajan, baskom, coper dan *freezer* untuk menyimpan bahan baku. Selanjutnya diberikan pelatihan bagaimana cara pengemasan serta difasilitasi dengan kemasan. CSR Pertamina juga memfasilitasi pengurusan semua surat perizinan mulai dari NIB, PIRT dan serta sertifikat halal.

Kedua, Ibrahim Fattah menulis artikel berjudul *Membedah "Jantung" YLP2EM dengan OCA*. Tulisan ini memaparkan pengalaman YLP2EM dalam melakukan analisis kapasitas organisasi, dengan menggunakan alat analisis *Organization Capacity Asseement* (OCA). Sebuah alat analisis untuk menilai kapasitas organisasi masyarakat sipil yang dikembangkan oleh YAPPIKA.

Ketiga, artikel berjudul *Dari Usaha Pribadi Menjadi Usaha Kelompok* yang ditulis Andi Erniyani Engka. Tulisan ini menceritakan seorang petani kunyit di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki yang mengolah kunyitnya sebagai bahan baku menghasilkan tepung kunyit. Yang menarik dari usaha ini adalah, kunyit dari kebun Siangka digunakan untuk menghasilkan tepung kunyit sebagai usaha kelompok.

Keempat, artikel berjudul *Advokasi Pembentukan UPTD PPA Kota Parepare*. Artikel ini mengisahkan advokasi panjang dan berliku

YLP2EM dalam mendorong pembentukan UPTD PPA Kota Parepare. Berbagai strategi yang digunakan dan segala dinamikanya dipaparkan di dalam artikel ini.

Kelima, Suriyanti menulis artikel berjudul *Dino yang Menginspirasi*. Artikel ini menceritakan tentang Muhammat Din Wailissaa atau Dino, seorang penyandang disabilitas fisik sejak kecil, yang bergabung dengan kelompok konstituen. Dari kelompok konstituen inilah Dino belajar berorganisasi, yang kemudian didorong dan didukung oleh pengurus kelompok konstituen untuk mendaftar menjadi penyelenggara pemilu di TPS (tempat pemungutan suara).

Sementara itu Tim INKLUSI-BaKTI menulis tiga artikel. Pertama, tulisan berjudul *Semua Bisa Sekolah* yang ditulis oleh Lusya Palulungan. Artikel ini menjelaskan berbagai kebijakan mengenai pendidikan, khususnya pendidikan inklusif, yang mengharuskan stakeholders pendidikan untuk siap menerima semua siswa. Pemerintah Kabupaten Maros adalah contoh pemerintah di daerah yang mengupayakan pendidikan inklusif, melalui kebijakan dan implementasinya. Kedua, artikel yang ditulis oleh M. Ghufra H. Kordi K berjudul *Melibatkan Penyandang Disabilitas*. Artikel ini menceritakan beberapa upaya yang ditempuh melalui Program INKLUSI-BaKTI dalam mendorong partisipasi dan melibatkan penyandang disabilitas dalam berbagai kegiatan publik. Ketiga, Zuriah Auliah Abdullah menulis artikel berjudul *Sistem Pelaporan Naratif Inklusif-BaKTI*. Tulisan ini menceritakan pengembangan sistem pelaporan secara *online* atau dalam jaringan, yang dikembangkan oleh Zuriah sebagai Monitoring dan Evaluation Officer Program INKLUSI-BaKTI. Sistem yang dinamai SENARAI

tersebut telah digunakan oleh sub mitra dalam menyampaikan laporan sejak 2024.

Buku ini merupakan buku kolaborasi yang ditulis oleh banyak orang, dengan pengetahuan dan pengalaman yang berbeda. Buku ini juga ditulis oleh bukan penulis profesional, tetapi mereka adalah orang-orang yang bekerja dalam suatu program. Mereka diminta untuk menuliskan perubahan yang terjadi, pengalamannya sendiri, atau pengamatannya terhadap program. Karena itu, buku ini merupakan pikiran dan pendapat subyektif dari masing-masing penulis. Dan di situlah keunikan buku ini.

Sebagai editor, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengirimkan tulisannya. Teman-teman diharapkan terus menulis dan menghasilkan artikel-artikel yang dapat dibaca dan menginspirasi orang lain.

Makassar, Juni 2025

Tim Editor

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	i
PRAKATA EDITOR	iv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	xxi

KABUPATEN KUPANG

1. Padupadan Data Kemiskinan, Menuju <i>'No One Left Behind'</i> ..	3
2. Mewujudkan Desa Inklusif	9
3. Membebaskan Desa dari Kekerasan	15
4. Mengenalkan Jurnalisme Berperspektif GEDSI	21
5. Usaha yang Memberdayakan	27

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

6. Demi Mereka, Kami Siap: Pengalaman Sekolah Menerima ABK	35
7. Pendidikan Inklusif, Siapkah Lombok Timur	41
8. Komitmen UGR Menghapus Kekerasan di Kampus	49
9. Partisipasi Bermakna Kelompok Rentan	55
10. Menjemput Asa untuk Uni	61
11. Kita Memang Disabilitas, Tapi Kita Harus Berkualitas	67

KABUPATEN MAROS

12. Inisiatif Inklusif di Desa	75
13. Kolaborasi di Desa Mangaloreng	81

14. Membangun Ketenagakerjaan Inklusif.	87
15. Menuju Pendidikan Inklusif di Kabupaten Maros	93
16. Dari Harapan Menuju Kemandirian.....	99

KABUPATEN TANA TORAJA

17. Advokasi Kebijakan untuk Peningkatan Pelayanan	107
18. Membangun Lembang Inklusif	113
19. Mendukung Pengembangan Usaha di Kelompok.....	121
20. Mengenal UPTD PPA Tana Toraja	127
21. Kerja Sama untuk Pembukaan Program Studi PLB	133

KOTA AMBON

22. Magang, Membuka Akses Kerja untuk Disabilitas.....	141
23. Kerja Kecil yang Membuat Orang Tersenyum	147
24. Menghapus Stigma terhadap Orang dengan Kusta	153
25. Memfasilitasi dan Memperkuat Kelompok Usaha	159
26. Pemberdayaan Ekonomi Bagi Disabilitas	165
27. Pembentukan Peraturan Desa/Negeri Inklusif	171

KOTA KENDARI

28. Advokasi Perda Disabilitas.....	179
29. Kerja Pendamping di Kelompok Konstituen.....	187
30. Memperkuat Layanan Berbasis Komunitas.....	195
31. Jurnalis dan Media sebagai Mitra dalam Advikasi	201
32. Sekolah Inklusif, Pendidikan untuk Semua.....	209
33. Penguatan Ekonomi di Kelompok Konstituen	219

KOTA PAREPARE

34. Dari dan untuk Kelompok Rentan	227
35. Membedah ”Jantung” YLP2EM dengan OCA	233
36. Dari Usaha Pribadi Menjadi Usaha Kelompok.....	239
37. Advokasi Pembentukan UPTD PPA Kota Parepare.....	245
38. Dino yang Menginspirasi.....	253

PROGRAM INKLUSI BaKTI

39. Semua Bisa Sekolah.....	261
40. Melibatkan Penyandang Disabilitas	269
41. Sistem Pelaporan Naratif Inklusif-BaKTI	279

TENTANG EDITOR.....	284
---------------------	-----

LEMBAGA MITRA PROGRAM INKLUSI-BaKTI	285
---	-----

DAFTAR ISTILAH & SINGKATAN

- **ABK** : Anak Berkebutuhan Khusus.
- **Adminduk** : Administrasi kependudukan.
- **AJI** : Aliansi Jurnalis Independen.
- **Anak** : adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- **Asita** : Asosiasi perusahaan perjalanan wisata.
- **Babinsa** : Bintara pembina desa.
- **BaKTI** : Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia.
- **Baznas** : Badan amil zakat nasional.
- **Bepemperda** : Badan pembentuk peraturan daerah.
- **Bapperida** : Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah.
- **Bhabinkamtibmas** : Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.
- **BLT** : Bantuan Langsung Tunai.
- **BP4D** : Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- **BPBD** : Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- **BPJS** : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- **BPL** : Badan Permusyawaratan Lembang.

- **BPMP** : Badan Penjamin Mutu Pendidikan.
- **BPNT** : Bantuan Pangan Non Tunai.
- **BPOM** : Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- **BST** : Bantuan Sosial Tunai.
- **BUMN** : Badan Usaha Milik Negara.
- **CSR** : *Corporate Social Responsibility*.
- **Childsida** : kejahatan dan pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa, individu, atau kelompok termasuk pemerintah/negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Anak-anak dibunuh karena dia adalah anak, yang lebih mudah dijadikan sasaran pembunuhan.
- **CRPD** : *Convention on The Rights of Persons With Disabilities*.
- **CSO** : *Civil Society Organization*.
- **DAK** : Dana Alokasi Khusus.
- **Difabel/difabilitas** : singkatan dari Bahasa Inggris *differently abled people* yang berarti orang yang memiliki kemampuan berbeda. Istilah difabel dipopulerkan oleh Mansour Fakhri dan Setya Adi Purwanto (seorang difabel netra). Gagasan penggunaan difabel atau difabilitas merupakan perubahan konstruksi sosial dalam memahami difabilitas, atau yang saat itu dikenal sebagai kecacatan (penyandang cacat).
- **Disdukcapil** : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- **DPD** : Dewan Perwakilan Daerah.
- **DPPPA** : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.
- **DPPPA MD** : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa.

- **DPPPAPPKB**: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.
- **DPPPADALDUKB**: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.
- **DPR**: Dewan Perwakilan Rakyat.
- **DPRD**: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- **DTKS**: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- **EOPO**: End of Program Outcome.
- **Femisida**: pembunuhan terhadap perempuan karena dia perempuan. Femisida merupakan pembunuhan yang didorong hasrat dominasi, penaklukan, agresi, dan penikmatan sebab perempuan dipandang sebagai properti. Karena itu, femisida merupakan pembunuhan berbasis gender, bukan pembunuhan bersifat umum (Hutabarat, 2021).
- **FGD**: *Focus Group Discussion*.
- **Fordisma**: Forum Disabilitas Maros.
- **GEDSI**: *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*.
- **Gender**: suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.
- **Gerkatina**: Gerakan tuna rungu Indonesia.
- **GPK**: Guru Pendamping Khusus.
- **HIMPSI**: Himpunan Psikolog Indonesia.
- **HIV/AIDS**: *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome*.

- **HWDI:** Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia.
- **IDG:** *Indeks Pemberdayaan Gender*.
- **ILO:** *International Labour Organization*.
- **IMF:** *International Monetary Fund*.
- **INKLUSI:** Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif.
- **Inklusi:** sebuah pendekatan yang berguna untuk mengembangkan dan membangun sebuah lingkungan yang memiliki sifat terbuka. Dalam Inklusi, semua orang dari berbagai latar belakang etnik, agama, bahasa, budaya, status, dan kondisi yang berbeda-beda berkumpul menjadi satu kelompok. Dengan kata lain, Inklusi adalah suatu tindakan atau keadaan yang terjadi di suatu kelompok atau struktur tertentu yang menitikberatkan kepada keterlibatan seseorang.
- **Inklusif :** berasal dari bahasa Inggris “*inclusion*” yang berarti sebuah tindakan mengajak atau mengikutsertakan. Sementara itu sikap inklusif sendiri dapat diartikan sebagai cara pandang seseorang akan adanya perbedaan. Bersikap inklusif berarti memandang positif terhadap sebuah perbedaan.
- **Inklusi sosial (*social inclusion*):** yaitu sebuah proses untuk meningkatkan kondisi, kemampuan, kesempatan dan martabat semua individu dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung/terpinggirkan dikarenakan identitas mereka, agar dapat berpartisipasi/mengambil bagian dalam segala bidang kehidupan masyarakat. Sebagai proses, inklusi sosial mengatasi ketidaksetaraan, diskriminasi, marjinalisasi, dan pengucilan untuk mewujudkan masyarakat inklusif, tidak ada seorang pun yang tertinggal.

- **IPG:** Indeks Pembangunan Gender.
- **IPM:** Indeks Pembangunan Manusia.
- **KAA:** *Key Annual Achievements*.
- **KDD:** Komisi Daerah Disabilitas.
- **Kemenkes:** Kementerian Kesehatan.
- **Kemenkumham:** Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- **KK:** Kelompok Konstituen.
- **KND:** Komisi Nasional Disabilitas.
- **KPD :** Kelompok Pemerhati Desa.
- **LBK:** Layanan Berbasis Komunitas.
- **KDRT:** Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- **KGB:** Kekerasan Berbasis Gender.
- **KIS:** Kartu Indonesia Sehat.
- **KKN:** Kuliah Kerja Nyata.
- **KPPPA:** Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- **Koramil :** Komando Rayon Militer.
- **KSP:** Kurikulum Satuan Pendidikan.
- **KtA:** Kekerasan terhadap Anak.
- **KTP:** Kartu Tanda Penduduk.
- **KtP:** Kekerasan terhadap perempuan.
- **Lansia:** Lanjut usia.
- **LBK:** Layanan Berbasis Komunitas.
- **LRC:** Lombok Research Centre.

- **LRG:** Lembaga Rumah Generasi.
- **LSM:** Lembaga Swadaya Masyarakat.
- **MBKM:** Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- **MoU:** *Memorandum of Understanding*.
- **Musrenbang:** Musyawarah perencanaan pembangunan.
- **NGO:** *Non Government Organization*.
- **NIB:** Nomor Induk Berusaha.
- **NIK:** Nomor Induk Kependudukan.
- **NPC:** *National Paralympic Comittee*.
- **NTT:** Nusa Tenggara Timur.
- **OCA:** *Organization Capacity Assesment*.
- **ODDP:** Orang Dengan Disabilitas Psikososial.
- **OJK:** Otoritas Jasa Keuangan.
- **OMS:** Organisasi Masyarakat Sipil.
- **OPD:** Organisasi Perangkat Daerah.
- **Opdis:** Organisasi penyandang disabilitas.
- **OYPMK:** Orang Yang Pernah Mengalami Kusta.
- **PAUD:** Pendidikan Anak Usia Dini.
- **PBB:** Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- **PBI JKN:** Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
- **PDPD:** Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- **P2TP2A:** Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

- **P3KE:** Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- **Pekka:** Perempuan kepala keluarga.
- **Penyandang Disabilitas:** Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas). Sementara Konvensi Hak-Hak Orang dengan Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons With Disabilities* 2006) menyebutkan penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
- **Perbup:** Peraturan bupati.
- **Perda:** Peraturan daerah.
- **Perdes:** Peraturan desa.
- **Pergub:** Peraturan gubernur.
- **Perlem:** Peraturan lembang.
- **Perneg:** Peraturan negeri.
- **Pertuni:** Persatuan tuna netra Indonesia.
- **Perwali:** Peraturan walikota.
- **PIRT:** Pangan Industri Rumah Tangga.

- **PIW:** Pagu Indikatif Wilayah.
- **PKH:** Program Keluarga Harapan.
- **PKBI:** Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.
- **PLB:** Pendidikan Luar Biasa.
- **PLUT:** Pusat Layanan Usaha Terpadu.
- **PPDB:** Penerimaan Peserta Didik Baru.
- **PPDI:** Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia.
- **PPK:** Panitia Pemilihan Kelurahan.
- **Pokja:** Kelompok kerja.
- **Poskedes:** Pos kesehatan desa.
- **Propemperda:** Program pembentukan peraturan daerah.
- **PUPR:** Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- **Raperda:** Rancangan peraturan daerah.
- **Regsosek:** Registrasi sosial ekonomi.
- **Renja:** Rencana kerja.
- **RKPD:** Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- **RKPDes:** Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- **RPJM:** Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
- **RPJP:** Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
- **RPS:** Rumpun Perempuan Sultra.
- **RRI:** Radio Republik Indonesia.
- **RSUD:** Rumah Sakit Umum Daerah.
- **RT:** Rukun Tetangga.

- **RW:** Rukun Warga.
- **Satgas PPKS:** Satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- **SCF:** Sulawesi Community Foundation.
- **SD:** Sekolah Dasar.
- **SDGs:** *Sustainable Development Goals*.
- **SDN:** Sekolah Dasar Negeri.
- **SDM:** Sumber Daya Manusia.
- **SENARAI:** Sistem Pelaporan Naratif INKLUSI-BaKTI.
- **SHG:** Self Help Group.
- **SIMFONI:** Sistem Informasi Online.
- **SKTM:** Surat keterangan tidak mampu.
- **SLB:** Sekolah Luar Biasa.
- **SMP:** Sekolah Menengah Pertama.
- **SOP:** *Standard Operating Procedure*.
- **STIE:** Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.
- **TBC:** Tuberculosis
- **TK:** Taman Kanak-Kanak.
- **TNI:** Tentara Nasional Indonesia.
- **TPB:** Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- **TPS:** Tempat Pemungutan Suara.
- **UDN:** Ume Daya Nusantara.
- **UGR:** Universitas Gunung Rinjani.

- **UHC:** Universal Health Coverage.
- **UKI:** Universitas Kristen Indonesia.
- **ULD:** Unit Layanan Disabilitas.
- **UMKM:** Usaha Mikro Kecil Menengah.
- **UPR:** Unit Pembenihan Rakyat.
- **UPTD PPA:** Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
- **WHO:** World Health Organization.
- **YESMa:** Yayasan Eran Sangbure Mayang.
- **YLP2EM:** Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat.



**KABUPATEN KUPANG, |
NUSA TENGGARA TIMUR**



Tersedianya data yang valid dan terbaru khususnya data kelompok rentan dan marginal sangat penting dan wajib tersedia di desa secara terpisah, karena data tersebut akan menjadi dasar untuk perencanaan dan penganggaran di desa.

Padupadan Data Kemiskinan, Menuju *'No One Left Behind'*

Damaris J. Tnunay

Koordinator Program INKLUSI - UDN Kupang

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Yayasan Ume Daya Nusantara (UDN) melalui Program INKLUSI-BaKTI adalah memastikan adanya regulasi di daerah yang membantu mempercepat proses pengentasan kemiskinan yang komprehensif di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. UDN membangun kerja sama dengan pemerintah (kabupaten, kecamatan, dan desa) sehingga setiap program/kegiatan yang dilaksanakan sinkron dengan program pemerintah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu yang strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan adalah tersedianya data yang valid dan terupdate. Data kelompok rentan dan marginal sangat penting dan wajib tersedia di desa secara terpilah, karena data akan menjadi dasar untuk perencanaan dan penganggaran di desa berbasis data. Selama ini desa sudah mempunyai data, namun masih perlu ditinjau kembali karena ada beberapa anggota masyarakat termasuk kelompok rentan (penyandang disabilitas, perempuan kepala

“ Harapan saya UDN tetap kawal data tersebut, supaya jangan ada tumpang tindih data, agar kami kaum difabel tidak tertinggal dan mendapatkan hak kami.

Eres Timo

Ketua Forum Disabilitas Desa Bokong

keluarga, perempuan miskin, dan lanjut usia) yang belum tersedia secara terpisah, atau bahkan tidak terdata.

Melalui Program INKLUSI, UDN memfasilitasi kegiatan Padupadan (memadukan dan memadankan) data. Uji coba Padupadan data yang difasilitasi oleh UDN bekerja sama dengan Badan perencanaan pembangunan riset dan inovasi daerah (Bapperida) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Kupang, koordinator Program Keluarga Harapan (PKH), petugas pengentasan kemiskinan desa (TKSK dan PKH), pemerintah desa, dan kelompok rentan.

Kegiatan padupadan dianggap sebagai suatu keberhasilan, dimana penyandingan data kemiskinan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan PKH teridentifikasi *exclusion error* dan *inclusion error* yang membuat data kemiskinan tidak tepat sasaran. Usulan kegiatan yang ditawarkan oleh UDN melalui Program INKLUSI-BaKTI, oleh Bapperida dan BP4D memandang kegiatan tersebut sangat baik dan merasa perlu untuk uji coba di Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang. Dengan memastikan kedua OPD terkait yang mempunyai data kemiskinan termasuk Dinas Sosial perlu didudukkan bersama.

Padupadan data kemiskinan, yang telah disebutkan di atas adalah salah satu strategi yang menjadi inisiatif UDN bersama pemerintah (provinsi, kabupaten, dan desa) untuk memastikan desa dapat memulai untuk memperbaiki data sebagai upaya dalam mendorong perbaikan penyesaran program penanganan kemiskinan ekstrem agar tepat sasaran.

Kegiatan terlaksana di bulan Desember 2024 yang difasilitasi oleh UDN di Desa Bokong untuk penyandingan data kemiskinan yang ditangani oleh Layanan Berbasis Komunitas (LBK)–Perlinsos bekerja sama dengan multipihak. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi OPD yang mempunyai data kemiskinan (P3KE, PKH, dan Regsosek) untuk dapat melihat data kemiskinan harus sesuai dengan ketentuan dari masing-masing program (PKH, BPNT, BLT dana desa, BST, SEMBAKO, PBI JKN, dan lain-lain). Melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan lewat musyawarah desa.

P3KE dan DTKS Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah program pemerintah yang menyoroti tentang tingkat kesejahteraan penduduk Indonesia secara nasional. Data P3KE diharapkan bisa menjadi pelengkap DTKS yang sudah ada saat ini sebagai dasar pemberian bantuan sosial oleh Kementerian Sosial maupun program kementerian/lembaga lain yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.

Kegiatan selama sehari di Desa Bokong ini merupakan komitmen dari Bapperida Nusa Tenggara Timur, BP4D dan Dinas Sosial Kabupaten Kupang untuk memastikan bantuan yang diberikan

tepat sasaran sehingga tidak ada seorang pun yang tertinggal, *'no one left behind'*. Kegiatan padupadan data ini hasilnya adalah teridentifikasi: (1) nama yang layak dan tidak layak menerima PKH dan sembako; (2) 12 KK Regsosek penerima PKH dan BLT dana desa, namun setelah diverifikasi KK hanya menerima PKH; (3) 29 KK lanjut usia Desil 1 dan 2 belum masuk PKH dan sembako berdasarkan data P3KE; dan (4) sebanyak 8 orang difabel yang belum terdaftar sebagai penerima PBI JKN.

Rekomendasi yang dihasilkan dalam pertemuan, nama KK yang tidak layak (*inclusion error*) akan dikeluarkan dari penerima bansos dan yang layak (*exclusion error*) khusus untuk lansia Desil 1 dan 2 serta penyandang disabilitas akan diusulkan saat musdes pemutakhiran DTKS maupun P3KE sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, Sembako, BLT, dan PBI JKN sesuai kriteria masing-masing program.

Pemerintah desa merasa padupadan data lewat musdes sangat efektif dalam penetapan KPM, penilaian sangat objektif karena dihadiri oleh berbagai unsur seperti BPD, kepala desa dan perangkat desa, kepala dusun, Babinsa, Babinkamtibmas, unsur masyarakat termasuk kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga) serta perangkat daerah terkait. Kegiatan seperti ini diusulkan oleh Bapperida agar dapat direplikasi di desa-desa lain.

Kepala Desa Bokong, Yefri A. Amnahas, menyatakan “menurut saya kegiatan verifikasi dan validasi data yang hari ini kita lakukan sangat baik sehingga dari proses ini kita bisa mengetahui data penerima

bantuan sosial yang ada dari yang sudah meninggal sampai yang masih ada sebagai penerima. Dan sebagai Pemerintah Desa Bokong, kami akan segera menindaklanjuti sesuai dengan data yang ada. Sehingga ke depan tidak ada lagi pendobelan atau permasalahan terkait dengan bantuan sosial”.

Sementara Eres Timo, Ketua Forum Disabilitas Desa Bokong, mengapresiasi kegiatan ini. Eres menyatakan, kegiatan tersebut sangat baik karena lewat kegiatan ini ia dapat mengetahui dengan jelas siapa saja yang boleh mendapatkan bantuan sosial dan ternyata bantuan yang diberikan ke masyarakat masih belum merata. “Harapan saya UDN tetap kawal data tersebut, supaya jangan ada tumpang tindih data, agar kami kaum difabel tidak tertinggal dan mendapatkan hak kami”, Ungkap Eres.



Suasana diskusi untuk pembentukan kelompok forum disabilitas di Desa Oenoni yang difasilitasi oleh Yayasan Ume Daya Nusantara (UDN).

Mewujudkan Desa Inklusif

Chrisantus Tanmenu

Asisten Program INKLUSI - UDN Kupang

Pembentukan dan pengembangan desa inklusif tidak hanya berupa penyediaan layanan dan peningkatan kualitas layanan dasar, tetapi juga peningkatan kesadaran dan partisipasi kelompok marginal dan rentan dalam penyelenggaraan desa. Kelompok marginal dan rentan merupakan kelompok yang mengalami kondisi yang tidak proporsional yang diakibatkan oleh keterbatasan akses pada layanan dasar, kesempatan ekonomi yang disebabkan oleh kemiskinan, keterpencilan, atau keterbatasan mobilitas, keterputusan layanan dan akses akibat kondisi darurat untuk menjangkau semua orang, serta tersisih karena usia, kemampuan fisik, dan identitas sosialnya.

Mereka yang termasuk kelompok marginal dan rentan adalah warga miskin, penyandang disabilitas, perempuan, perempuan kepala keluarga, anak, lanjut usia, masyarakat adat, kelompok minoritas, warga tanpa identitas hukum, warga dengan masalah domisili, warga yang mengalami stigma, korban kekerasan rumah tangga, korban bencana alam, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

Sebuah desa disebut desa inklusif jika memenuhi setidaknya 15 indikator, sebagaimana Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 518 Tahun 2024 tentang Panduan Fasilitasi Desa Inklusif, yaitu: (1) Tersedianya SK kepala desa terkait pembentukan kader desa inklusif; (2) Terdapat setidaknya sebesar 50% keterlibatan kelompok rentan dan marginal sebagai kader desa inklusif; (3) Terdapatnya forum diskusi penggalan usulan kegiatan desa inklusif; (4) Tersedianya dokumen usulan kegiatan desa inklusif; (5) Meningkatnya partisipasi kelompok marginal dan rentan setidaknya sebesar 50% dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa; (6) Meningkatnya partisipasi kelompok marginal dan rentan setidaknya sebesar 30% dalam kegiatan publik di desa; (7) Terlaksananya kegiatan desa inklusif bagi kelompok perempuan; (8) Terlaksananya kegiatan desa inklusif bagi kelompok difabel; (9) Terlaksananya kegiatan desa inklusif bagi kelompok lansia; (10) Terlaksananya kegiatan desa inklusif bagi kelompok anak dan remaja; (11) Terlaksananya kegiatan desa inklusif bagi kelompok minoritas agama, kepercayaan dan adat tertentu; (12) Terlaksananya kegiatan desa inklusif bagi kelompok resilienasi dan kelompok lainnya (contoh: mantan napi, mantan ODDP, masyarakat dalam rehabilitasi, dan lain-lain); (13) Tersedianya peraturan desa yang mendukung keberlanjutan program/kegiatan kelompok marginal dan rentan di desa; (14) Tersedianya dukungan penganggaran bagi keberlanjutan desa inklusif yang bersumber dari supradesa (pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat); dan (15) Tersedianya nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) dengan pihak ketiga (swasta, akademi, organisasi nirlaba/LSM/NGO).



Adanya advokasi UDN dalam memberikan arahan terhadap pelayanan dan pemberian ruang terhadap para penyandang disabilitas merupakan arah tujuan dalam mewujudkan desa yang inklusif.

Melyaki Sabuin
Kepala Desa Oenoni

Salah satu aspek non-fisik yang dalam pengembangan desa inklusif adalah memahami etika dengan disabilitas, menyiapkan regulasi desa yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan disabilitas sebagai dasar legalisasi kelompok disabilitas desa melalui surat keputusan kepala desa, menyiapkan rencana pembangunan desa berperspektif disabilitas dengan anggaran desa untuk menjalankan program pemberdayaan disabilitas. Kemudian pembangunan sistem informasi desa sebagai dasar penyusunan perencanaan, khususnya ketersediaan data penyandang disabilitas. Data ini mencakup jumlah, ragam disabilitas, kehidupan sehari-hari, kerentanan, dan keberdayaan keluarga disabilitas. Mendirikan forum untuk penduduk desa dan menghidupkan semangat inklusivitas dalam berdesa. Termasuk mengembangkan proses pembelajaran pembangunan desa inklusi dan menyebarluaskan pengaruh kepada desa di sekitarnya.

Yayasan Ume Daya Nusantara (UDN) dan Kelompok Pemerhati Desa (KPD) melalui kolaborasi dan advokasi terhadap Pemerintah Desa Oenoni, agar bersama membentuk organisasi disabilitas sebagai bentuk proses pelibatan kelompok rentan (penyandang

disabilitas) dalam pembangunan desa. Komitmen bersama ini menjadi suatu landasan dan tujuan yang baik dalam mewujudkan desa yang inklusif ke depannya.

Pada tahun 2024, UDN dan KPD bersama Pemerintah Desa Oenoni berhasil membentuk kelompok yaitu, Forum Disabilitas Desa Oenoni. Forum Disabilitas yang dibentuk bertujuan mewujudkan desa inklusif, dengan menghimpun penyandang disabilitas, agar mereka bersama dan mempunyai waktu, ruang, dan kesempatan yang sama bagi para penyandang disabilitas dalam menyampaikan aspirasi dan setiap kebutuhan mereka.

Melalui Program INKLUSI-BaKTI, UDN terus berupaya dalam meningkatkan keterlibatan semua kelompok rentan (penyandang disabilitas) di tiap wilayah dampingan UDN. Pembentukan organisasi disabilitas di Desa Oenoni merupakan hasil advokasi nyata dari UDN terhadap Pemerintah Desa Oenoni. Organisasi yang telah dibentuk dengan struktur kepengurusan sebagai berikut: Nappoleon Ataupah (ketua), Suliyanti Silla (sekretaris), dan Glodis Nenoharan (bendahara).

Dengan adanya organisasi disabilitas tentunya sangat membantu para kelompok penyandang disabilitas dalam meningkatkan kepercayaan diri mereka sebagai masyarakat desa. Setelah terbentuknya Kelompok Forum Disabilitas tersebut, para penyandang disabilitas lebih mudah terkontrol oleh pemerintah desa dalam memenuhi akses layanan kebutuhan terhadap mereka.

Selain itu, kelompok disabilitas dimaksud secara bersama-sama memelihara ternak ayam yang didapat dari pemerintah desa, yang

didamping UDN, sebagai bentuk pemberdayaan terhadap kelompok penyandang disabilitas. Dalam rencana lain ke depannya, kelompok penyandang disabilitas akan mengusulkan dan memperjuangkan pembangunan sebuah balai pertemuan sehingga menjadi tempat mereka berkumpul, bercerita, bertukar pikiran, dan melakukan kegiatan-kegiatan bersama mereka dalam upaya peningkatan ekonomi bagi mereka sendiri.

Pemerintah Desa Oenoni, melalui Melyaki Sabuin, Kepala Desa Oenoni, mengungkapkan bahwa, atas advokasi dan dorongan baik dari UDN yang selama ini selalu berperan aktif dalam memberikan arahan terhadap pelayanan dan pemberian ruang terhadap para penyandang disabilitas merupakan arah tujuan dalam mewujudkan desa yang inklusif.

Sementara Ketua Kelompok Forum Disabilitas Desa Oenoni, Nappoleon Ataupah mengungkapkan bahwa, berkat dukungan UDN bersama dengan KPD, ia sebagai penyandang disabilitas khususnya di Desa Oenoni merasa sangat senang dan beruntung sekali karena dengan Forum Kelompok Penyandang Disabilitas yang sudah dibentuk dapat memberinya ruang untuk berpikir dan bersama-sama berbagi cerita, serta selalu dilibatkan dalam kegiatan desa sebagai bentuk pemberian aspirasi dalam mewujudkan setiap kebutuhan kami sebagai penyandang disabilitas.

Oleh karena itu, dengan apa yang sudah dilakukan terhadap para penyandang disabilitas, maka kemajuan tersebut dapat terus dilanjutkan, sekaligus dapat direplikasi pada desa berbeda, khususnya wilayah dampingan UDN.



Proses FGD yang melibatkan pemangku kepentingan dan perwakilan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan laporan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) pada masyarakat di tingkat desa.

Membebaskan Desa dari Kekerasan

Ivonny Tallo

Asisten Program INKLUSI - UDN Kupang

Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dengan sengaja atau bentuk kekuatan lainnya, ancaman, atau perbuatan nyata, terhadap seseorang, orang lain, atau terhadap suatu kelompok atau komunitas, yang mengakibatkan atau memiliki kemungkinan besar mengakibatkan cedera, kematian, kerugian psikologis, perkembangan atau deprivasi (Panduan Pelatihan PPRG, 2019).

Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tindakan kekerasan yang dilakukan kepada perempuan dan anak. Kekerasan dilakukan terhadap perempuan dan anak, karena menyangkut status, baik sebagai perempuan maupun anak. Kekerasan terhadap perempuan yang disebabkan oleh jenis kelaminnya disebut sebagai Kekerasan Berbasis Gender (KBG). Kekerasan dan pembunuhan perempuan disebut femisida (*femicide*). Kekerasan dan pembunuhan anak disebut childside (*childcide*), sedangkan pembunuhan anak yang dilakukan oleh keluarga disebut filisida (*filicide*) (Kordi, 2022; Kordi, 2023).

Kekerasan ini dapat berupa kekerasan fisik, seksual, ekonomi dan pembatasan perilaku. Kekerasan dapat berdampak fatal seperti upaya bunuh diri bahkan kematian. Banyak kekerasan yang tidak diketahui atau tidak dilaporkan, yang dalam jangka panjang menyebabkan korban meninggal atau bunuh diri.

Salah satu masalah yang sering dikeluhkan adalah tidak adanya keseriusan dari pemerintah dalam penanganan terhadap kekerasan terhadap perempuan.

Hal ini karena tidak adanya sistem dalam pencegahan maupun dalam penanganan korban.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kekerasan terhadap perempuan di antaranya ketergantungan ekonomi perempuan pada laki-laki, kemiskinan keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, dan gangguan kepribadian. Sebagian besar perempuan tidak bisa melepaskan diri dari kekerasan yang dilakukan oleh suami, karena ketergantungan ekonomi pada suami.

Sama halnya dengan kekerasan pada perempuan ataupun anak, kekerasan berbasis gender memerlukan perhatian khusus. Mungkin masih banyak juga masyarakat yang belum memahami apa itu Kekerasan Berbasis Gender (KBG), karena menganggap kekerasan terhadap perempuan sebagai kekerasan biasa saja. KBG adalah kekerasan yang didasarkan atas seks atau gender dari korban, dan korban terbesarnya adalah perempuan.

Sementara itu, salah satu masalah yang sering dikeluhkan adalah tidak adanya keseriusan dari pemerintah dalam penanganan terhadap kekerasan terhadap perempuan. Hal ini karena tidak adanya sistem dalam pencegahan maupun dalam penanganan korban. Di sisi lain, korban kekerasan juga berdiam diri, karena di dalam keluarga dan lingkungan juga tidak ada *support system*.

Pada tahun 2024 saat kegiatan aksi kolektif dalam rangka Hari Perempuan Internasional, yang saat itu dilaksanakan atas kerja sama Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia(PKBI) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Yayasan Ume Daya Nusantara (UDN). UDN menjelaskan tentang Layanan Berbasis Komunitas (LBK) untuk penanganan kasus yang telah terbentuk di 15 desa dampingan. Konsep LBK yang dijelaskan oleh UDN membuat PKBI tertarik untuk mendokumentasikan dalam bentuk buku Panduan Penanganan KBG yang ditangani oleh komunitas, dalam hal ini LBK yang dikembangkan oleh UDN dalam Program INKLUSI-BaKTI.

Beberapa tahapan kegiatan dilakukan dalam penulisan panduan Pencegahan dan Penanganan Laporan KBG Berbasis Masyarakat di Tingkat Desa, yakni dengan melakukan proses *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pemangku kepentingan dan perwakilan masyarakat desa dampingan Yayasan UDN di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Dari hasil FGD teridentifikasi hal-hal sebagai berikut: (1) Masih minimnya pemahaman terkait dengan isu *Gender Disability and Social Inclusion* (GEDSI), hanya diketahui oleh masyarakat dan

pemerintah desa yang pernah mengikuti rangkaian penguatan yang diikuti oleh UDN; (2) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih dianggap tabu untuk dilaporkan karena akan membuat malu keluarga besar dari kedua belah pihak; dan (3) Belum ada regulasi yang melindungi korban serta dukungan anggaran jika korban mau melanjutkan proses penanganan kasus lewat jalur hukum.

Kemudian proses dilanjutkan dengan menyelenggarakan workshop untuk mengidentifikasi berbagai praktik baik penanganan kasus KGB berbasis masyarakat. Kegiatan workshop tersebut dihadiri oleh tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, dan pendamping dari 4 desa dampingan UDN di Kabupaten Kupang. Keempat desa tersebut antara lain Desa Oefafi, Desa Oelatimo, Desa Tanah Putih, dan desa Oenoni 1. Masing-masing desa telah memulai proses penanganan kasus KGB dengan menggunakan berbagai sumber daya yang ada di desa atau berbasis masyarakat desa.

Tujuan dari penulisan buku panduan ini adalah untuk menggambarkan bagaimana alur penanganan aduan kekerasan khususnya KGB di tingkat desa, dengan melibatkan masyarakat desa sebagai aktor kunci dalam menangani aduan dan memberikan rujukan kepada korban KGB di desa. Harapannya buku panduan ini dapat dijadikan pedoman bagi setiap pemangku kepentingan di setiap desa yang berkomitmen untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan kasus KGB di desanya. Panduan ini diharapkan menjadi pendorong membebaskan desa dari kekerasan.

Penyusunan panduan ini adalah suatu terobosan dan inovasi baik. Kerja sama PKBI dan UDN dalam pelaksanaan kegiatan aksi

kolektif Peringatan Hari Perempuan Internasional 2024, kemudian berlanjut pada penyusunan panduan tersebut adalah sesuatu yang baik. Kerja sama seperti ini perlu dilakukan oleh lembaga-lembaga yang peduli pada perempuan, anak, dan hal-hal yang menyangkut kemanusiaan.

Kerja sama yang menghasilkan sesuatu yang positif adalah hal yang tidak hanya diapresiasi, tetapi harus disebar dan disosialisasikan. Karena selama ini aktivis organisasi non pemerintah (Ornop), kadang berseteru, klaim wilayah, dan tidak bisa bersatu, karena masing-masing mempunyai ego dan merasa paling tahu dan paling hebat.

Kerja sama yang menghasilkan penyusunan panduan ini juga diapresiasi oleh masyarakat yang terlibat. Karena mereka baru tahu dan sadar bahwa, pengetahuan dan pengalaman masyarakat juga harus diapresiasi untuk dicontoh oleh masyarakat di desa atau di tempat lain.

Sementara itu, masyarakat Desa Oelatimo pun berharap, agar pemerintah desa dapat merespon dengan baik hasil dari FGD yang ada, untuk dijadikan dasar dalam penyusunan peraturan dan kebijakan di desa.



Lidia Radjah, jurnalis perempuan NTT saat menerima penghargaan dalam ajang kompetisi Jurnalistik IM3 Platinum Region Bali Nusra 2025.

Mengenalkan Jurnalisme Berperspektif GEDSI

Simon Sadi Open

Direktur Yayasan UDN

“Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi Yayasan UDN (Ume Daya Nusantara) atas penyelenggaraan kegiatan Penguatan Kapasitas Forum Media dan Jurnalis bagi kami para jurnalis di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang”, ujar Lidia Radjah, jurnalis dari Media NTThits.com mengawali ungkapan tentang pandangannya ketika berdialog dengan staf UDN terkait apa kesan dan manfaat setelah mendapatkan penguatan kapasitas Forum Media dan Jurnalis, mengenai penulisan berita atau artikel dengan perspektif kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial atau GEDSI.

Sebagai mitra Program INKLUSI-BaKTI, UDN melaksanakan kegiatan penguatan Forum Media dan Jurnalis dengan mengenalkan penulisan dan pemberitaan berperspektif GEDSI. Pelatihan tersebut menggunakan Panduan Jurnalis Berperspektif Gender Disabilitas dan Inklusi Sosial, yang diterbitkan atas kerja sama Yayasan BaKTI dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar.

Panduan ini diterbitkan BaKTI sejak tahun 2016 dan telah mengalami beberapa kali revisi dan cetak ulang.

GEDSI merupakan singkatan dari *Gender Equality, Disability and Social Inclusion* yang dalam bahasa Indonesia berarti Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial, adalah sebuah pendekatan dan isu global yang baru terkait perjuangan organisasi masyarakat sipil, untuk keadilan dan kesetaraan dalam keberagaman yang lebih mengutamakan kelompok marginal atau rentan lainnya. Saat itu Lidia menjelaskan bahwa istilah GEDSI merupakan ilmu baru bagi dirinya.

“ Hampir semua desain bangunan rumah ibadah di Kota Kupang tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas fisik karena belum menyediakan fasilitas atau alat bantu bagi penyandang disabilitas sensorik yaitu yang tak dapat melihat dan yang tak dapat mendengar”.

Lidia Radjah
Jurnalis

Lebih lanjut Lidia menjelaskan, “Bagi kami jurnalis di wilayah ini, pada umumnya dan secara khusus terhadap diri saya, perspektif GEDSI merupakan isu dan ilmu baru yang sangat menantang. Apalagi ketika mengikuti penyelenggaraan penguatan kapasitas yang kedua pada bulan Mei 2024, kami jurnalis diperkenalkan

tentang Model Jurnalisme Advokasi, sebagai satu model jurnalisme yang lebih memperjuangkan keberpihakan, pemberdayaan, dan perubahan serta keadilan”.

“Ternyata selain model jurnalisme objektif yang saya paham dan anut selama ini, saya akhirnya mendapat ilmu baru tentang jurnalisme advokasi. Jurnalisme Advokasi adalah model jurnalistik yang menganut prinsip keberpihakan terhadap korban, mengupayakan pemulihan dan pemberdayaan korban mentransformasi serta menegakan Hak Asasi Manusia (HAM)”, lanjut Lidia saat menjelaskan pemahaman ilmu barunya kepada staf UDN.

“Berbekal perspektif GEDSI dan pengetahuan tentang model jurnalisme advokasi yang saya dapatkan dari mengikuti kegiatan penguatan kapasitas yang diselenggarakan oleh UDN maka dalam bulan Juni 2024, saya coba melakukan sebuah investigasi tentang desain atau kondisi rumah-rumah ibadah di Nusa Tenggara Timur, yang saat itu saya mulai dari Kota Kupang. Hasil ivestigasi itu saya beri judul ‘Rumah-Rumah Ibadah di NTT Tak Inklusif, Layani Semua Orang Merajut Kesetaraan Dalam Hidup Spiritual’, Lidia menuturkan pengalaman aplikatifnya.

Dari hasil pengamatan Lidia terhadap struktur bangunan rumah ibadah dan investigasinya terhadap pengurus rumah ibadah serta lembaga keagamaan di Kota Kupang yang dituangkan dalam tulisan dengan judul tersebut diatas Lidia menjelaskan, ”Hampir semua desain bangunan rumah ibadah di Kota Kupang tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas fisik. Dan yang berikut bahwa mekanisme penyelenggaraan ibadah di dalam rumah-rumah ibadah

yang *beta* (saya) investigasi belum menyediakan fasilitas atau alat bantu bagi penyandang disabilitas sensorik yaitu yang tak dapat melihat dan yang tak dapat mendengar”.

”Ternyata UDN tidak hanya menyelenggarakan pelatihan ataupun penguatan kapasitas jurnalis akan tetapi UDN kembali mengidentifikasi jurnalis yang sudah menulis berita atau artikel berperspektif GEDSI kemudian mengundang jurnalis tertentu, termasuk saya untuk melakukan bedah hasil penulisan berita yang dibimbing oleh seorang wartawan senior sekaligus pelatih dan peneliti. Kami dibimbing secara sangat mendetail, mulai dari pemberian judul berita, pembuatan lead, pembukaan/penutup dan pembentukan paragraf serta banyak hal termasuk pemilihan diksi yang baik dan benar dalam penulisan”.

Menurut Lidia, “Kami jurnalis yang diidentifikasi dan diseleksi sebagai jurnalis *champion* merasa sangat beruntung. Atas kontribusi UDN terhadap peningkatan kapasitas kami sebagai jurnalis yang bukan hanya pengenalan perspektif dan model jurnalisme baru akan tetapi sekaligus peningkatan metode penulisan berita yang baik dan benar. Oleh karena itu saya secara pribadi sekali lagi mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kontribusi UDN terhadap peningkatan wawasan serta ketrampilan saya.”

Menjadi jurnalis menurut Lidia tidak mudah, karena diharuskan terus belajar. Di samping itu, selalu ada isu dan informasi baru yang menuntut jurnalis selalu belajar untuk meningkatkan kapasitas dan mengikuti perkembangan. Dukungan UDN untuk peningkatan kapasitas jurnalis sangat berharga.

Lidia adalah jurnalis perempuan yang lahir di Kupang pada 1978. Lidia menyelesaikan pendidikan terakhir dengan mengambil sarjana muda pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Triatmajaya Dalung di Bali. Setelah menyelesaikan pendidikan itu Lidia kembali ke Kupang dan mulai menekuni dunia jurnalistik dan bergabung ke dalam berapa organisasi jurnalis antara lain AJI Kota Kupang, Klub Jurnalis Investigasi NTT, dan Komite Keselamatan Jurnalis NTT.

Lidia sudah aktif menulis sebagai reporter di berbagai media sejak masih berada di bangku perkuliahan. Sebagai jurnalis, Lidia telah mendapatkan beberapa penghargaan, seperti *Most Creative Online Media* Bali Nusra 2018, Juara I Lomba Jurnalistik Berita Ekonomi OJK 2018, Penulis Buku Kompilasi World Bank IMF di Bali 2019, dan Juara I Lomba Jurnalistik Langit Biru Program KBR 2021. Ketika menjadi reporter di media ntthits.com, Lidia terlibat pada Karya Tulis Jurnalistik BUMN Jasaraharja 2022 dan Lomba Karya Jurnalistik Warga NTT Award 2024.



D'Mini Beach, usaha wisata pantai milik Daud Mini, ketua Kelompok Pemerhati Desa (KPD) di Desa Uiasa, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang yang juga melibatkan difabel dalam mengembangkan usaha pariwisata di NTT.

Usaha yang Memberdayakan

Frida Roman

Program Officer INKLUSI - UDN Kupang

Yayasan Ume Daya Nusantara (UDN) melalui Program INKLUSI-BaKTI membentuk, menguatkan, dan mendampingi 15 kelompok di 15 desa, yang disebut kelompok pemerhati desa (KPD). Selain penanganan dan pendampingan kasus, penguatan kelompok juga terkait dengan pengembangan usaha, baik usaha kelompok maupun usaha individu.

Pengembangan usaha ditujukan untuk meningkatkan pendapatan anggota kelompok, sekaligus membuka lapangan kerja untuk kelompok rentan dan marginal. Kelompok rentan seperti penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal usaha, maupun lapangan kerja. Karena itu, pengembangan usaha anggota kelompok diharapkan membuka lapangan kerja bagi penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, dan lanjut usia.

Pada pendampingan awal program INKLUSI-BaKTI dan juga asesmen usaha baik individu maupun kelompok, dengan

“ Saya mengharapkan perhatian pemerintah, khususnya pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten, untuk mendukung dan membangkitkan kembali usaha pariwisata Desa Uiasa.

Daud Mini

Pemilik D'Mini Beach

menggunakan form asesmen, tim UDN mengunjungi setiap usaha yang ada di desa termasuk milik Daud Mini yang dinamai D'Mini Beach. Dalam wawancara diketahui bahwa usaha ini dilakukan sudah sejak lama namun tidak berkembang. Padahal ini tempat wisata yang cukup diminati sebelum pergolakan Timor Leste, Bom Bali, dan penutupan penerbangan Darwin-Kupang.

Dengan informasi ini, UDN melakukan upaya pendampingan dengan menyesuaikan kebutuhan dari Daud Mini agar usahanya dapat berkembang. UDN mulai berupaya mencari akses dan menghubungkan dengan Daud Mini. Termasuk ketika Kuliah Kerja Nyata (KKN) tertinggal terdepan terluar (3T) dari Universitas Jember tahun 2024, juga diinformasikan agar dapat melibatkan Daud Mini dalam aktivitas selama KKN di desa, khususnya Desa Uiasa.

Usaha pariwisata D'Mini Beach milik Daud Mini. Dia adalah Ketua Pokdarwis (kelompok sadar wisata) dan Ketua Kelompok Pemerhati Desa (KPD). Desa Uiasa, lokasi usaha D'Mini Beach terletak di Dusun I RT/RW 003/002 Desa Uiasa, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Usaha ini adalah usaha kecil yang

telah melibatkan penyandang disabilitas dan dapat memberi dampak bagi masyarakat di Desa Uiasa, jika usaha ini berkembang dengan adanya kunjungan wisatawan.

Desa Uiasa, Kecamatan Semaui berada di Pulau Semaui, sebuah pulau yang berada di depan Kabupaten Kupang. Untuk mencapai Pulau Semaui, wisatawan dapat menumpang kapal *ferry* sekitar 15-20 menit. Pulau Semaui memiliki keindahan alam mempesona dengan pasir putih dan terumbu karang yang indah. Usaha D'Mini Beach milik Daud Mini menjual keindahan alam Pulau Semaui.

Dalam menjalankan usahanya, Daud Mini bekerja sama dengan seorang penyandang disabilitas mental bernama Olwitro, yang bertugas untuk kebersihan pantai. Pekerjaan dilakukan sesuai kondisi Witro, nama panggilan Olwitro. Pelibatan ini merupakan bagian dari rencana sesuai dengan kebijakan desa yaitu Desa Uiasa tangguh bencana dan inklusif. Desa Uiasa adalah desa yang mempunyai peraturan desa (Perdes) yang mengatur Desa Uiasa sebagai desa yang tangguh bencana dan inklusif.

Usaha yang dilakukan adalah membuka layanan pariwisata di pantai Desa Uiasa, berupa penyediaan alat snorkeling, tenda istirahat, dan kelengkapan renang lainnya. D'Mini Beach sedang dalam proses pembangunan pondok-pondok penginapan sederhana yang terbuat dari bahan lokal. D'Mini Beach juga membuka tempat makan, menyewakan tenda, perkemahan di Pantai Uiasa dan snorkeling.

Usaha ini telah dijalankan beberapa tahun lalu namun belum memiliki ijin usaha. Ini merupakan salah satu kendala dalam

pengembangan usaha. Dalam menjalankan usahanya, Daud Mini memerlukan dana operasional untuk mengelola usaha dan membutuhkan dukungan untuk promosi. Untuk mendapatkan dukungan dana Daud Mini perlu meminjam di bank atau lembaga keuangan lainnya, namun selalu ditolak karena usaha D'Mini Beach tidak memiliki ijin usaha.

Pemerintah desa sendiri mendukung sebatas informasi pihak lain di luar pulau mengenai keberadaan D'Mini Beach. Beberapa pelatihan telah melibatkan Daud Mini dan Witro. Sedangkan untuk bantuan modal belum bisa diberikan karena keluarga Daud Mini juga merupakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Daud Mini meminta bantuan UDN untuk dapat memfasilitasi pengurusan izin usaha, agar memudahkan untuk mengakses dukungan dana dari lembaga keuangan, mengingat ia tidak memiliki pengetahuan dan informasi untuk akses tersebut. UDN melakukan koordinasi dengan Disnakertrans dan Perijinan Satu Atap namun kendalanya adalah Daud Mini harus datang langsung ke Kota Oelamasi, dan ini membutuhkan waktu dan biaya yang besar. UDN berinisiatif menghubungi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Nusa Tenggara Timur. Tidak memerlukan waktu yang lama semua dokumen pendukung dikumpulkan dan diserahkan ke PLUT. Dan hasilnya Daud Mini mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Surat Ijin Usaha.

Tidak berhenti disitu, UDN membuka akses ke Asosiasi perusahaan perjalanan wisata (Asita) dan Kamar dagang dan industri (Kadin), sehingga mereka mempromosikan D'Mini Beach. Hasilnya sudah ada

beberapa tamu wisatawan lokal dari Asita dan Kadin telah mengunjungi obyek wisata yang dikelola oleh Daud Mini.

Abed Frans, Ketua Asita Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan sumbangan lampu hias untuk dipasang di obyek wisata D'Mini Beach. Orang mulai dapat berkunjung di malam hari karena sudah ada lampu. Dengan demikian makin banyak wisatawan yang berkunjung dan berdampak pada peningkatan pendapatan.

Daud Mini menyampaikan terima kasih karena melalui UDN dalam Program INKLUSI-BaKTI sudah membantu membuka akses terutama mendapatkan ijin usaha dari PLUT, dan juga pendampingan serta pelatihan-pelatihan terkait usaha. Harapan untuk keberlanjutan adalah membantu pendampingan untuk promosi usaha juga manajemen usaha seperti pembukuan yang belum dilakukan.

Impiannya adalah Uiasa bangkit lagi sebagai tempat tujuan wisata dan masyarakat termasuk kelompok disabilitas dan kelompok miskin rentan bisa dipikirkan dari hasil pendapatan usaha. Daud Mini mengharapkan perhatian pemerintah, khususnya pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten, untuk mendukung dan membangkitkan kembali usaha pariwisata Desa Uiasa.

“

Kita membutuhkan wanita di mana saja, termasuk di tingkat paling atas untuk mengubah dinamika, membentuk dialog, serta memastikan bahwa semua suara wanita didengar dan diperhatikan. Bukan untuk dilewati dan diabaikan.

Sheryl Sandberg

CEO Facebook



**KABUPATEN LOMBOK TIMUR, |
NUSA TENGGARA BARAT |**



Adanya kolaborasi sekolah dan orang tua/wali murid akan mampu memberikan pelayanan pendidikan yang baik kepada siswa berkebutuhan khusus meskipun dengan segala keterbatasannya, seperti yang telah dilakukan oleh SDN 2 Labuhan Haji.

Demi Mereka, Kami Siap Pengalaman Sekolah Menerima Anak Berkebutuhan Khusus

Tim Program INKLUSI LRC

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa, pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus karena kondisi fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa diselenggarakan secara inklusif, baik pada tingkat dasar maupun menengah. Ini membutuhkan waktu yang cukup lama dalam implementasinya. Bahkan ada beberapa daerah yang belum siap menyelenggarakan pendidikan inklusif, baik dari sisi sistem (kurikulum), Sumber Daya Manusia (SDM) serta akomodasi layak.

Sebagai penyelenggara pendidikan, sekolah dalam hal ini harus menerima anak dengan kebutuhan khusus. Terlepas dari siap atau tidaknya perangkat belajar atau akomodasi bagi anak didik mereka. Sehingga beberapa sekolah di Kabupaten Lombok Timur melakukan berbagai upaya agar anak dengan kebutuhan khusus ini dapat terpenuhi hak pendidikannya.

SD Negeri 3 Pengkelak Emas, Kecamatan Sakra Barat misalnya, berupaya dengan sebaik mungkin menciptakan suasana belajar yang nyaman untuk anak didik yang berkebutuhan khusus. Di mana hanya ada satu orang Guru Pendamping Khusus (GPK) di sekolahnya, sementara anak dengan kebutuhan khusus pada Tahun Ajaran 2023/2024 ini terdapat sembilan orang anak dengan kebutuhan yang beragam. Selain itu guru pendamping tersebut berstatus guru kelas. Sehingga sedikit menyulitkan untuk memberikan perhatian khusus kepada anak didik tersebut. Karena itu, sekolah melakukan pelatihan dasar untuk guru lain terkait dengan cara berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik.

Meskipun demikian masih ada tantangan ketika akan memberikan penilaian kepada anak dengan kebutuhan khusus. Karena standar penilaian yang ada saat ini masih mengikuti standar untuk sekolah reguler, belum dilakukan penyesuaian untuk peserta didik disabilitas. Sehingga guru melakukan penyesuaian dengan mengacu pada pengetahuan yang mereka dapatkan saat pelatihan GPK dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. “Tidak bisa menunggu pemerintah siap untuk melaksanakan pendidikan inklusif ini, kita harus bisa dengan mengoptimalkan segala SDM yang ada. Karena anak disabilitas itu nyata ada, dan mereka berhak untuk pendidikan yang layak”, ucap H. Muhammad, Kepala Sekolah SDN 3 Pengkelak Emas.

Jika SDN 3 Pengkelak Emas berupaya memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), dengan

mengoptimalkan segala sumber daya yang mereka miliki. Maka SDN 2 Labuhan Haji melakukan hal yang berbeda. Ketika tahun 2023, menjadi pertama kali menerima anak dengan kebutuhan khusus, mereka kebingungan bagaimana menanganinya. Sempat mereka meminta kepada orang tua murid untuk memindahkan anak mereka ke Sekolah Luar Biasa (SLB), dengan alasan tidak ada guru khusus di sekolah mereka. Namun kedua orangtuanya bersikeras untuk tetap menyekolahkan anak mereka di sekolah reguler. Sehingga siap tidak siap, sekolah harus menerimanya.

Dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, muncul gagasan dari kepala sekolah, Rahmi Kurniati, untuk mencari pihak ketiga yang dapat membantu mereka. Lalu Rahmi menghubungi Rumah Terapis Tumbuh Kembang Anak. Setelah berkoordinasi, pihak Rumah Terapi bersedia membantu. Rahmi menghubungi orangtua murid tersebut. Di luar dugaan ternyata orangtuanya setuju bahkan bersedia menanggung uang transpor bagi pendamping Rumah Terapis untuk kunjungan sebanyak tiga kali dalam seminggu. Dari pendamping tersebut juga guru lain dapat meniru bagaimana penanganan anak dengan kebutuhan khusus.

Sejak saat itu, jumlah anak dengan kebutuhan khusus yang masuk ke SDN 2 Labuhan Haji tersebut semakin banyak. Hingga 2024 ini sudah ada 6 anak yang menjadi peserta didik, dengan disabilitas yang beragam. Ada yang disabilitas daksa, *low vision*, dan autis. Identifikasi ragam ini dilakukan bekerja sama dengan pihak Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Terapi. Namun dengan pengalaman sebelumnya, sekolah percaya mereka mampu

memberikan pelayanan pendidikan yang baik meskipun dengan segala keterbatasan. Pola yang sama juga dilakukan dengan kolaborasi dengan orang tua/wali murid.

Sayangnya, tidak semua anak dengan kebutuhan khusus tersebut berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang baik. Bahkan ada di antaranya tinggal dengan neneknya telah lanjut usia (lansia) dan tidak produktif. Sehingga tidak mampu mendukung dengan maksimal anak mendapatkan akomodasi layak dan alat bantu lainnya. Hal ini terjadi pada anak *low vision* dan *dwarfisme* atau bertubuh pendek. Ketika anak *low vision* tersebut membutuhkan kacamata, Rahmi mengaku harus melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur agar dapat diberikan alat bantu.

Pun demikian saat anak *dwarfisme* akan mendapatkan tindakan operasi, Rahmi melakukan penggalangan dana di sekolahnya. Namuan tentu saja tidak akan mencukupi. Sehingga Rahmi mengajukan proposal kepada pemda melalui Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Baznas. Namun ternyata menurut Rahmi responnya sangat lambat. Karena dana dari Baznas baru mereka terima ketika anak tersebut sudah melalui masa pemulihan dan sudah siap masuk sekolah.

"Apapun akan kami lakukan, tidak hanya untuk pendampingan tetapi juga untuk penggalangan dana. Karena kami menyadari, ABK yang bersekolah di sini tidak semuanya dari keluarga berada. Karena untuk mengandalkan sekolah saja pasti tidak bisa, perlu ada pihak lain yang mendukung kami, sehingga ABK ini

mendapatkan pendidikan yang layak meskipun di sekolah reguler”, tutur Rahmi.

Hal serupa juga disampaikan oleh Sudirman, salah seorang wali murid di SDN 2 Labuhan Haji, meskipun di awal sempat diminta untuk dipindahkan ke SLB, namun dengan adanya kerja sama dengan pihak ketiga anaknya bisa tetap sekolah di sekolah reguler. ”Saya bersyukur, kepala sekolah cepat mencari solusi, dengan bekerja sama dengan bale terapi (rumah terapi) sehingga anak saya bisa belajar di sekolah reguler dan tidak bosan bermain bersama teman-teman lainnya,” ungkap Sudirman.

Baik H. Muhammad atau Rahmi mengakui bahwa mereka masih kebingungan akan melakukan konsultasi atau diskusi ke bagian mana tentang pendidikan inklusif di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Karena belum ada satuan tugas atau unit yang mengelola pendidikan inklusif. Namun mereka sangat yakin, jika kolaborasi dapat menjadi daya dukung untuk penyelenggaraan pendidikan yang inklusif di Kabupaten Lombok Timur.



Proses pembelajaran di SDN 2 Labuhan Haji, Lombok Timur. Dengan jumlah ABK dan GPK yang ada saat ini mestinya bisa menjadi acuan bagi Kabupaten Lombok Timur untuk memulai menyelenggarakan sekolah inklusif. Namun ketiadaan anggaran dan data yang belum akurat menjadi dasar pertimbangan utama dalam mewujudkan hal tersebut.

Pendidikan Inklusif, Siapakah Lombok Timur?

Tim Program INKLUSI LRC

Praktik pendidikan inklusif telah menjadi agenda internasional di antaranya melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang mengamanatkan agar semua anak tanpa terkecuali dipenuhi hak sosial dan pendidikan yang bermutu di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan, serta telah menjadi agenda utama dalam pendidikan untuk semua di satuan tingkatan regular.

Pelaksanaan pendidikan inklusif merujuk pada beberapa kebijakan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di antaranya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Untuk memenuhi amanah tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang peserta didik berkebutuhan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan bahwa pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus karena kondisi fisik,

emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif, baik pada tingkat dasar maupun menengah.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 10 menyebutkan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus berhak mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif.

Kebijakan dan regulasi yang ada jelas menunjukkan komitmen pemerintah untuk memenuhi amanat undang-undang dalam upaya memenuhi hak warga negara dalam bidang pendidikan. Selain itu, regulasi tersebut menjadi dasar atau acuan bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif di daerah. Namun kembali, apakah semua daerah siap melaksanakan amanah tersebut dengan segera? Belum tentu.

Kabupaten Lombok Timur salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Barat belum menyelenggarakan pendidikan inklusif. Ketidaksiapan Lombok Timur dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM), penganggaran, serta data yang belum akurat terkait dengan jumlah anak berkebutuhan khusus.

Jika mengacu pada data Kementerian Pendidikan dalam Rapor Pendidikan Kabupaten Lombok Timur tahun 2024, anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 21.778 orang. Terdiri dari anak *drop out* (DO) sejumlah 4.309 orang, lulus tidak

melanjutkan (LTM) sebanyak 4.330 orang, dan belum pernah bersekolah (BPB) sebanyak 13.139 orang. Tingginya angka tersebut tentu mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih serius lagi dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Lombok Timur. Untuk anak yang tidak pernah bersekolah, terindikasi sebagian merupakan anak dengan disabilitas, karena itu akan dilakukan pendataan ulang. Selain untuk verifikasi data ATS juga untuk memastikan anak dengan kebutuhan khusus.

“ Kami punya harapan besar terwujudnya pendidikan inklusif di Kabupaten Lombok Timur. Memiliki perangkat belajar yang lengkap dan memadai serta SDM yang mumpuni seperti daerah lain”.

Izzuddin

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lombok Timur

Awal tahun ajaran 2023-2024 telah dilakukan pendataan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur, di 700 sekolah pada jenjang sekolah dasar di Kabupaten Lombok Timur. Namun tidak sampai 50% dari total sekolah yang mengirimkan kembali format isian melalui aplikasi yang telah disediakan. Dari isian asesmen tersebut diketahui bahwa terdapat sebanyak 1.000 anak dengan kebutuhan khusus. Namun demikian angka

tersebut masih perlu dilakukan asesmen lanjutan oleh ahli untuk dapat mengetahui ragam disabilitas peserta didik. Selain itu, terdapat 57 orang guru pendamping khusus (GPK) yang tersebar di 57 sekolah dasar. Tentu saja jumlah ini masih sangat jauh dari jumlah kebutuhan GPK ideal. Sayangnya, sekolah-sekolah yang mempunyai GPK belum tentu mempunyai murid berkebutuhan khusus.

Dengan jumlah ABK dan GPK yang ada saat ini mestinya bisa menjadi acuan bagi Kabupaten Lombok Timur untuk memulai menyelenggarakan sekolah inklusif. Namun ketiadaan anggaran dan data yang belum akurat menjadi dasar pertimbangan utama dalam mewujudkan hal tersebut.

Sinarman, salah satu pengawas sekolah dasar yang telah mendapatkan pelatihan tentang pendidikan inklusif menyatakan bahwa mereka sering kali kebingungan ke mana data ABK tersebut akan diserahkan atau mau diapakan data ABK tersebut?. Hal ini karena belum ada unit yang khusus menangani pendidikan inklusif, baik itu berupa sub bidang atau pun Unit Layanan Disabilitas (ULD).

“Ada perguruan tinggi, organisasi non pemerintah (ornop), yayasan terapis yang memiliki sumber daya, baik pendanaan atau SDM untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif ini. Selain itu, ada RSUD (rumah sakit umum daerah) dan dinas kesehatan yang bisa diajak untuk join program. Intinya, pemerintah harus berkolaborasi jika memang bersungguh-sungguh ingin mewujudkan pendidikan inklusif di Kabupaten Lombok Timur”, ungkap Sinarman saat mengakhiri presentasinya.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur bersama Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) menyelenggarakan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tematik pendidikan yang melibatkan berbagai *stakeholder*, tidak hanya lingkup pendidikan tetapi juga berbagai pihak yang juga bekerja

pada isu pendidikan. Langkah ini menjadi suatu upaya untuk mendorong pendidikan inklusif dari sisi penganggaran dan upaya menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.

Dari Musrenbang khusus tersebut beberapa hal yang disepakati di antaranya, pertama, fokus pada isu utama pendidikan yaitu numerasi, literasi, dan pembangunan karakter sebagai upaya peningkatan mutu layanan pendidikan baik di sekolah ataupun madrasah. Kedua, teridentifikasinya rumusan dan akar masalah setiap isu utama, Ketiga, adanya usulan program untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta mitra pembangunan lainnya.

Sementara untuk rekomendasi kepada pemerintah daerah dan mitra pembangunan, terdapat sepuluh rekomendasi yang dihasilkan dari Musrenbang tersebut. Di antaranya, pertama, perlu ada prioritas kebijakan dan program pembangunan daerah bidang pendidikan pada isu strategis yang meliputi pendidikan karakter, literasi dan numerasi, serta pendidikan inklusif dan disabilitas. Kedua, tindak lanjut hasil rumusan masalah utama, akar masalah dan usulan program terhadap ketiga isu tersebut sebagai pertimbangan dalam perencanaan kebijakan dan program pembangunan daerah jangka pendek dan menengah (RPJP/M, Renstra, RKPD, Renja, dan RKPDes).

Ketiga, dilaksanakannya asistensi, evaluasi dan monitoring secara berkala dan berkelanjutan yang dilakukan secara kolaboratif. Keempat, memperkuat kolaborasi dan koordinasi semua pemangku kepentingan pendidikan dalam perencanaan, implementasi, dan monitoring evaluasi termasuk lembaga non pemerintah, perguruan

tinggi, serta pihak lainnya. Kelima, tindakan afirmasi untuk menekan jumlah angka tidak sekolah dengan melibatkan semua pihak yang relevan. Keenam, mendorong inovasi dan riset bidang pendidikan yang mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan. Ketujuh, perlu ada strategi literasi dan numerasi daerah. Kedelapan, mendorong regulasi dan kebijakan tentang perbukuan daerah. Kesembilan, memperkuat data-data pokok kependidikan dan pemanfaatannya untuk menguatkan perencanaan mutu dan inklusifitas layanan pendidikan, termasuk data profil belajar siswa. Kesepuluh, tingkatkan keterpaduan layanan seluruh organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan layanan pendidikan.

Untuk mendukung pendataan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur bekerja sama dengan Universitas Hamzanwadi, salah satu perguruan tinggi swasta di Lombok Timur. Pendataan ini sebagai upaya identifikasi awal dan masih memerlukan assesmen lanjutan oleh ahli untuk menentukan ragam disabilitas yang dialami peserta didik. Sayangnya, pendataan ini hanya untuk tingkat sekolah dasar saja. Sehingga ke depan akan dilakukan pendataan ulang baik untuk jenjang SD dan SMP, dimana data ini akan menjadi rujukan untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Lombok Timur.

”Kami punya harapan besar terwujudnya pendidikan inklusif di Kabupaten Lombok Timur. Memiliki perangkat belajar yang lengkap dan memadai serta SDM yang mumpuni seperti daerah lain”, ungkap Izzuddin, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Lombok Timur. Hal ini disampaikan setelah mengikuti studi tiru ke Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Yayasan BaKTI. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Yogyakarta dalam mewujudkan pendidikan Inklusif bisa diterapkan juga di Lombok Timur, meski dengan anggaran yang terbatas tapi Lombok Timur memiliki beberapa mitra pembangunan yang bisa berkolaborasi, tidak hanya dalam penerapan pendidikan inklusif tetapi juga bagaimana pengembangan fungsi ULD Bidang Pendidikan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Sub bagian Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kantor wilayah Lombok Timur, H. Hasanuddin. Menurutnya, kegiatan studi tiru ke Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan gambaran yang cukup lengkap di setiap jenjang pendidikan yang dapat menjadi acuan bagi sekolah lain, termasuk untuk sekolah di bawah Kementerian Agama. Terlebih lagi saat ini, Kementerian Agama tengah mendorong sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan yang dinaunginya.

”Semua pimpinan pondok yang ikut studi tiru ini akan kami jadikan sebagai piloting Pondok Ramah Anak, saya kira pengetahuan yang diperoleh di Yogyakarta dapat menjadi gambaran bagaimana menerapkan pendidikan ramah anak juga pendidikan inklusif di pondok masing-masing” ungkap Hasanuddin.



Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Universitas Gunung Rinjani (UGR) dan Lembaga Lombok Research Center (LRC) tentang penguatan dan pendampingan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

Komitmen UGR Menghapus Kekerasan di Kampus

Tim Program INKLUSI LRC

Pembentukan Satgas Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 dimana pada peraturan tersebut mewajibkan semua perguruan tinggi untuk membentuk Satgas PPKS. Ada sanksi yang akan diberikan jika Satgas tersebut tidak dibentuk, tentu saja hal ini membuat semua perguruan tinggi berlomba-lomba membentuk satgas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui petunjuk teknis pembentukan satgas.

Salah satu Perguruan tinggi yang tanggap dengan instruksi tersebut adalah Universitas Gunung Rinjani (UGR) Lombok Timur. Pada Maret 2024 Satgas PPKS tersebut terbentuk dan diperkuat dengan surat keputusan rektor. Namun permasalahan muncul ketika telah terbentuk, apa tugas dan fungsi dari satgas tersebut? Pada petunjuk teknis pembentukan sudah jelas dijabarkan peran dan tugas dari satgas. Namun tidak sesimpel itu, dalam pelaksanaannya satgas juga

harus memiliki pemahaman yang memadai tentang isu kekerasan, aturan penanganan kasus, mekanisme penyelesaian kasus, pendampingan korban, serta kode etik sebagai pendamping korban. Terlebih lagi, civitas akademika yang terpilih sebagai Satgas belum pernah bersentuhan dengan isu dan kasus kekerasan.

Menyadari hal tersebut, pihak rektorat tidak tinggal diam. Harus ada kolaborasi dengan pihak lain jika memang kampus komitmen untuk menghapus kekerasan. Gayung bersambut, di saat yang bersamaan LRC yang memang telah memiliki *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan UGR dalam beberapa program pengembangan dan pengabdian masyarakat. LRC memiliki program penguatan Satgas PPKS melalui Program INKLUSI yang dikelola bersama Yayasan BaKTI. Sehingga dengan segera, Ketua Satgas atas permintaan rektor langsung menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Satgas PPKS UGR dengan LRC dalam penguatan dan pendampingan Satgas PPKS.

Berdasarkan PKS tersebut, maka proses penguatan Satgas pun dilakukan oleh LRC. Berupa peningkatan kapasitas Satgas terkait dengan pendalaman isu kekerasan, mekanisme penanganan kasus serta membangun jaringan untuk pelayanan korban kekerasan tidak hanya dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Lombok Timur, tetapi juga dengan kepolisian. Satgas PPKS juga telah melakukan sosialisasi tentang keberadaan Satgas pada pertemuan lintas fakultas yang diadakan oleh BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa). Pasca sosialisasi, anggota satgas langsung mendapatkan laporan tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen. Kasus pertama langsung

diselesaikan di level fakultas dengan mengirimkan surat peringatan.

Meskipun demikian, tidak mudah untuk membangun kesadaran semua elemen kampus untuk peduli tentang kekerasan seksual di kampus. Masih ada anggapan bahwa kekerasan seksual adalah ranah pribadi, sehingga tidak pantas dibicarakan dalam forum tertentu. Bahkan ada yang beranggapan bahwa pelecehan verbal sebagai bentuk keakraban. Tentu saja anggapan-anggapan tersebut tidak dapat dibenarkan. Namun, tantangan yang cukup serius dihadapi ketika oknum dosen yang terindikasi sebagai pelaku adalah pengelola yayasan, yang surat keputusan pengangkatannya sebagai tenaga pengajar dikeluarkan oleh ketua yayasan, maka rektor tidak dapat memberikan sanksi. Hanya dapat memberikan surat peringatan. Sementara untuk mengurangi hak dan kewajiban sebagai pengajar hanya dapat dilakukan ketua yayasan. Tantangan-tantangan secara sadar juga berdampak pada kepercayaan mahasiswa terhadap satgas rendah.

Namun dengan berbagai tantangan itu, tidak membuat pihak rektorat patah arang. Setelah melalui koordinasi dengan LRC maka hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan intensitas sosialisasi serta mempekuat satgas dengan berbagai dokumen pendukung seperti *Standard Operating Procedure* (SOP) penanganan kasus, buku panduan, serta dokumen lainnya.

Terobosan baru pun dilakukan oleh rektor dan satgas, yaitu dengan menjadikan materi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagian dari materi pembekalan bagi mahasiswa yang akan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan materi pada orientasi mahasiswa baru. Sementara untuk dokumen pendukung, Satgas PPKS UGR bersama LRC telah menyusun SOP penanganan kasus dengan merujuk pada pertauran terbaru yaitu Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Dimana pada aturan tersebut kekerasan tidak hanya terbatas pada kasus kekerasan seksual saja tetapi segala macam bentuk kekerasan. Sehingga pada penyebutannya satgas PPKS berubah menjadi Satgas Pencegahan dan penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT). Selain itu, pada SOP tersebut telah melibatkan yayasan pada proses penyelesaian kasus kekerasan.

Sangat disadari, bahwa perubahan baik dari sisi pengetahuan, kapasitas serta kebijakan yang terjadi di UGR berkontribusi dari kerja sama yang dilakukan bersama LRC. Sejak awal terbentuk hingga saat ini, banyak sekali bentuk peningkatan kapasitas yang dilakukan bersama LRC. Diantaranya penguatan kapasitas satgas dalam mengenal peran dan fungsinya, bagaimana mekanisme layanan, penyusunan dokumen, bahkan pelatihan tentang manajemen kasus yang juga sempat diikuti oleh anggota Satgas bersama pengelola UPTD PPA dari berbagai wilayah yang diselenggarakan oleh Program INKLUSI-BaKTI pada Oktober 2024.

Tidak sebatas itu saja, setelah melakukan kolaborasi dengan LRC, satgas pun telah dipertemukan dengan instansi penyedia layanan lainnya seperti kepolisian melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) melalui UPTD PPA, serta pihak lain yang juga terkait dengan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Selain itu, salah

satu anggota satgas juga berkesempatan untuk mengikuti Seminar Nasional Satgas PPKPT di UGM pada Juli 2024. Pertemuan nasional tersebut juga berkontribusi pada peningkatan pengetahuan serta jejaring antar perguruan tinggi besar dari berbagai daerah. Tentu saja ini menjadi motivasi bagi anggota Satgas UGR untuk terus berkembang dan berkontribusi.

”Apa yang ada saat ini di Satgas UGR, semua karena dukungan dari teman-teman LRC dan BaKTI. Tidak hanya terbatas pada dukungan peningkatan kapasitas anggota satgas saja, tetapi mempertemukan kami dengan berbagai penyedia layanan dan berjejaring dalam pencegahan dan penanganan kekerasan. Hal ini sangat penting bagi kami, mengingat segala keterbatasan yang kami miliki, mulai dari anggaran hingga ketersediaan SDM. Sehingga berkolaborasi dan berjejaring menjadi satu point penting penunjang niat kampus untuk penghapusan kekerasan”, ungkap Rini Endang Prasetyowati, Ketua Satgas PPKS UGR.

Selain itu, menurut Endang, konsep kolaborasi pentahelik sudah mulai diterapkan di UGR, tinggal bagaimana sektor swasta ini juga mampu berjejaring dengan UGR. Diakui, meskipun belum ideal, tetapi upaya yang terus dilakukan oleh pihak rektorat menunjukkan komitmen yang kuat dalam menghapus kekerasan di lingkungan kampus.



Nurhayati (kiri), salah satu penyandang disabilitas yang ikut dalam kegiatan diskusi kelompok menunjukkan bahwa ruang diskusi yang kondusif dapat memberikan kenyamanan dan keberanian bagi perempuan dan kelompok rentan untuk menyampaikan pendapat dan pemikirannya.

Partisipasi Bermakna Kelompok Rentan

Baiq Titis Yulianty

Koordinator Program INKLUSI - LRC Lombok Timur

Pelibatan kelompok rentan dan marginal dalam pengambilan keputusan di Kabupaten Lombok Timur masih relatif rendah, termasuk di dalamnya pelibatan perempuan dan disabilitas. Meskipun di beberapa tempat, sudah mulai berusaha untuk melibatkan mereka dalam berbagai forum penting dalam perencanaan pembangunan di desa. Mulai dari musyawarah di level dusun hingga level desa. Apakah pelibatan mereka telah memberikan makna?

Jika mengacu pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Lombok Timur tiga tahun terakhir memang menunjukkan tren yang relatif meningkat. Yaitu 91,33 pada tahun 2021 dan berturut-turut 92,53 dan 92,25 pada tahun 2022 dan 2023. Angka tersebut, pada tahun 2023 menempatkan Lombok Timur pada posisi kelima dari sepuluh kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sementara, jika kita mengacu pada Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), untuk tahun 2023 IDG Kabupaten Lombok Timur berada

pada angka 66,81. Berada posisi keempat dari sepuluh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jika IPG merupakan rasio antara IPM Perempuan dan IPM laki-laki, maka IDG merupakan indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peran secara aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dengan pencapaian IDG yang sebesar 66,81 tentu relatif masih sangat rendah.

Kembali pada pertanyaan pada awal tulisan, bahwa angka-angka terkait dengan IDG dan IPG yang relatif rendah telah mampu menjawab bahwa perempuan belum maksimal memberikan peran dan berdampak pada pembangunan. Tentu, ini tidak hanya menjadi tanggung jawab bagi pemerintah daerah saja. Tetapi juga berbagai pihak yang konsen terhadap isu perempuan dan kelompok rentan.

Terkait dengan hal tersebut, Lombok Research Center (LRC) sebagai salah satu mitra pembangunan di Kabupaten Lombok Timur, terus berupaya untuk mendorong peningkatan partisipasi aktif perempuan dan kelompok rentan lainnya. Meski untuk mewujudkan hal tersebut tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Membuka paradigma berfikir serta pengetahuan terkait dengan hak sebagai warga negara harus dilakukan. Namun yang terpenting adalah memberikan ruang dan kesempatan bagi perempuan dan kelompok rentan untuk mengajukan pendapat dan pemikirannya.

Ruang yang tidak lagi memandang perempuan dan kelompok rentan hanya sebagai obyek pembangunan, ruang yang tidak lagi memandang mereka sebagai “masyarakat lapisan kedua”, ruang yang

tidak lagi memandang mereka dengan tatapan intimidasi sehingga memunculkan ketakutan dan keraguan mereka untuk menyampaikan pendapat serta pemikirannya.

Dalam upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat khususnya kelompok rentan dalam politik di level desa adalah dengan memastikan bahwa kelompok rentan berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan dan forum pengambilan keputusan di level desa. Namun untuk dapat mencapai hal tersebut tentunya memerlukan berbagai penguatan kepada masyarakat dan kelompok rentan. Terkait dengan hak mereka, namun lebih penting dari itu adalah bagaimana menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri kelompok rentan untuk menyampaikan aspirasinya. Tanpa dihantui oleh rasa “takut salah” atau “disalahkan”.

Hal inilah yang coba diwujudkan oleh LRC melalui kegiatan diskusi kampung yang dilakukan di desa dampingan melalui Program INKLUSI-BaKTI. Kegiatan diskusi kampung ini menghadirkan berbagai elemen masyarakat dan pemangku pembangunan di desa. Selain itu, menghadirkan juga perwakilan dari perempuan dan kelompok rentan. Selain berdiskusi tentang isu pembangunan di desa, pada diskusi kampung juga memberikan kesempatan kepada perempuan dan kelompok rentan untuk menyampaikan berbagai permasalahan mereka kepada pemerintah desa atau pemangku pembangunan di desa.

Dari beberapa diskusi kampung yang dilakukan oleh Tim LRC, menunjukkan perubahan yang positif. Beberapa kelompok rentan yang hadir mulai berani menyampaikan pendapatnya meski dengan

kalimat yang belum terstruktur dengan baik dan masih menggunakan bahasa lokal. Kehadiran pemerintah desa pada Diskusi Kampung tersebut juga menjadi wadah untuk kelompok rentan menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi yang selama ini belum tersampaikan.

Menurut Kepala Desa Banjasari, Asmiluddin, kegiatan Diskusi Kampung ini sangat bermanfaat, tidak hanya bagi warga saja tetapi juga bagi pemerintah desa. Karena bisa langsung mendengarkan apa yang menjadi keluhan atau harapan dari warga kami yang belum tersampaikan melalui forum-forum musyawarah di desa. Diskusi Kampung ini menjadi wadah untuk melatih kemampuan menyampaikan pendapat serta mendapatkan informasi mengenai hal-hal terkait dengan mendorong pembangunan inklusif di desa.

”Kegiatan-kegiatan seperti ini perlu terus dilakukan, terlebih lagi dengan menghadirkan lebih banyak kelompok rentan. Hal-hal yang disampaikan pada diskusi kecil ini belum tentu dapat disampaikan dengan baik ketika Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di desa. Bahkan kami sebagai pemerintah desa sangat terbantu dengan diskusi seperti ini dan kerja sama ini bisa terus dilakukan karena banyak program desa yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak,” ungkap Asmiluddin.

Nurhayati, salah satu peserta yang mewakili penyandang disabilitas menyampaikan bahwa perlu ada pendampingan ekonomi bagi penyandang disabilitas di desanya. Selama ini yang dia ketahui adalah penyandang disabilitas hanya sebagai penerima bantuan saja. Hal tersebut disampaikan Nurhayati saat pertemuan diskusi

kampung. Diakuinya, apa yang disampaikan di forum diskusi kampung ini belum tentu bisa diutarakan saat hadir di Musrenbang desa. ”Kalo di diskusi ini, saya lebih berani menyampaikan pendapat saya. Semua mendengarkan saat saya bicara,” ucap Nurhayati.

Apa yang disampaikan oleh Nurhayati menunjukkan bahwa ruang diskusi yang kondusif memberikan kenyamanan dan keberanian bagi perempuan dan kelompok rentan untuk menyampaikan pendapat dan pemikirannya. Perlahan, diharapkan kelompok rentan akan semakin berani untuk menyampaikan pendapatnya. Tidak hanya pada diskusi kampung tetapi juga pada forum penting lainnya di desa. Sehingga dengan mempersiapkan kelompok rentan melalui berbagai pengetahuan dan kapasitas serta tersedianya ruang untuk mereka berpartisipasi maka kehadiran bermakna kelompok rentan di Kabupaten Lombok Timur dapat terwujud.



Pengurus Kelompok Konstituen (KK) Sehati yang ada di Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur sedang memberikan pendampingan kepada salah satu keluarga yang memiliki bayi berusia 4 bulan dan membutuhkan tindakan medis (operasi).

Menjemput Asa untuk Uni

Lalu Farouq Wardana

Program Officer INKLUSI - LRC Lombok Timur

Hariana (bukan nama sebenarnya), seorang ibu muda beranak satu. Tidak menyangka bahwa tujuannya mengunjungi Pos pelayanan terpadu (Posyandu) untuk mengetahui perkembangan tumbuh kembang anaknya, justru mendapatkan fakta yang mengejutkan. Terdapat kegagalan dari kondisi alat vital bayinya. Si bayi mungil, Uni (bukan nama sebenarnya), terindikasi tidak memiliki lubang vagina. Panik? tentu saja. Menurut Hariana, hingga 4 bulan usia bayinya, dia tidak pernah memperhatikan hal tersebut. Terlebih lagi mengingat keterbatasan ekonominya saat ini, serta suami yang berada jauh di negara lain menambah beban pikiran Hariana.

Seorang bidan desa menenangkannya. Bidan desa tersebut juga menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Hariana. Mulai dari melakukan pemeriksaan menyeluruh di Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) terdekat hingga administrasi apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan proses pemeriksaan tersebut. Melihat kebingungan Hariana, maka bidan tersebut menyarankan agar

Hariana menghubungi pengurus Kelompok Konstituen (KK) Sehati yang ada di Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.

Aduan yang disampaikan oleh Hariana diterima sekaligus didampingi oleh Fitriati, salah satu pendamping perlindungan sosial pada Layanan Berbasis Komunitas (LBK) Sehati. Hal pertama yang dilakukan oleh Fitriati, yang akrab dipanggil Fitri, adalah melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Lombok Timur. Saat di Dinas Kesehatan, Fitri diminta untuk mengurus BPJS Kesehatan terlebih dahulu agar mendapatkan layanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Lalu di hari yang sama Fitri juga menuju Dinas Sosial.

Namun karena saat berangkat, Fitri tidak membawa tanda pengenal sebagai pendamping. Sehingga saat berkoordinasi, Fitri mendapatkan kesulitan. Tidak ada solusi apapun yang diperoleh di kedua dinas tersebut kecuali diminta ke BPJS Kesehatan untuk menguruskan kartunya. Sementara untuk mendapatkan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) membutuhkan waktu yang tidak sebentar, perlu melalui proses verifikasi serta pengajuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Panjangnya jalan yang harus dilalui untuk mendapatkan layanan kesehatan untuk si kecil Uni justru menjadi pemantik semangat untuk Fitri. Saat itu juga Fitri mengajukan nama Uni sebagai salah satu nama untuk diajukan dalam data DTKS.

Melihat kesedihan Hariana, akhirnya Fitri mengajak Hariana untuk melakukan pemeriksaan di RSUD Lombok Timur melalui jalur

mandiri/umum, sembari menunggu namanya Uni muncul pada DTKS. Menurutnya yang terpenting bisa mengetahui kondisi si bayi terlebih dahulu. Namun ternyata tidak juga mudah. Setelah melakukan pendaftaran dan mengantri untuk diperiksa, ternyata hingga siang Uni tidak juga mendapatkan giliran diperiksa. Saat dikonfirmasi, petugas meminta mereka untuk datang kembali keesokan harinya. Fitri berusaha untuk tidak menunjukkan kekecewaan yang dirasakannya di hadapan Hariana dan memberikan semangat kepada Hariana, bahwa Uni pasti mendapatkan pelayanan.

Keesokannya, Uni mendapatkan pemeriksaan dari dokter pada Poli Anak. Namun karena berkaitan dengan saluran vagina maka Uni dialihkan ke Poli Kandungan. Di sana, Uni mendapatkan rujukan untuk ditangani di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat karena keterbatasan SDM untuk operasi bayi usia 4 bulan. Namun, lagi-lagi ketiadaan kartu BPJS menjadi kendala untuk mengakses layanan kesehatan secara gratis.

Kebingungan yang dihadapi Fitri disampaikan kepada Ketua KK Sehati. Selanjutnya mereka berdua menemui pihak Lombok Research Center (LRC) untuk dapat membantu berkoordinasi

“ Proses panjang yang harus kami tempuh untuk kesembuhan Uni membuat saya bertemu dengan banyak orang dan semakin tahu prosedur-prosedur dalam pendampingan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Sekarang Uni sudah sembuh dan saya mendapatkan banyak pengalaman ”

Fitriati
Pendamping Perlinsos
LBK Sehati

dengan beberapa pihak yang memungkinkan untuk dapat diakses. Saat itu, Tim Program INKLUSI LRC menyarankan untuk mengakses layanan Kesehatan gratis melalui program *Universal Health Coverage* (UHC) yang sedang dilaksanakan di level kabupaten. Namun terlebih dahulu harus mengurus surat pengantar dari pemerintah desa. Dan mengingatkan saat melakukan pengurusan tersebut, Fitri dan Ketua KK harus membawa serta kartu pengenalnya.

Saat mengurus surat pengantar di desa bertepatan dengan kunjungan Dr. Ahsanuk Khalik, Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat ke desanya. Lalu Fitri memberanikan diri untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapinya. Informasi yang sama didapatkannya seperti di LRC, bahwa ada solusi untuk masalah Uni, yaitu melalui program UHC.

Mendapatkan solusi yang sama membuat semangat Fitri semakin kuat, hal tersebut juga disampaikan Fitri kepada Hariana. Harapan baru tentu muncul setelah beberapa bulan menjalani pemeriksaan. Uni akan mendapatkan layanan.

Instruksi langsung yang diberikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur tentu mempercepat proses mengikuti program UHC tersebut. Di saat bersamaan, ternyata nama Uni masuk dalam DTKS. Dengan cepat Fitri berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dan BPJS untuk memastikan BPJS Kesehatan untuk Uni aktif. Setelah mendapatkan kedua dokumen tersebut, akhirnya Uni dirujuk ke RSUD di Mataram

pada Agustus 2024 untuk menjalani operasi dan perawatan paska operasi.

Kini, senyum cerah Hariana dan Fitri menyambut kedatangan tim LRC saat menemui mereka di kantor desa paska masa pemulihan Uni. Pengalaman yang dialami bu Fitri dan Hariana tentu menjadi pembelajaran untuk kita semua. Satu hal yang paling membanggakan bagi tim LRC adalah, Fitri tidak hanya menjadi pendamping, tetapi juga motivator bagi orang lain. Dia mampu menyalurkan semangat dan energi positif kepada Hariana untuk terus berjuang untuk kesehatan putrinya.

”Proses panjang yang harus kami tempuh untuk kesembuhan Uni membuat saya bertemu dengan banyak orang dan semakin tahu prosedur-prosedur dalam pendampingan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Sekarang Uni sudah sembuh dan saya mendapatkan banyak pengalaman,” ucap Fitri dengan wajah penuh senyum.



Ade Usman (pegang mic) saat menyampaikan pendapatnya dalam sesi diskusi pada sebuah kegiatan. Kegiatan diskusi tersebut dapat memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk menyampaikan pendapat tanpa ada perasaan tertekan.

Kita Memang Disabilitas, Tapi Kita Harus Berkualitas

Kisah Seorang Disabilitas Netra yang Ingin Terus Berdaya

Baiq Titis Yulianty

Koordinator Program INKLUSI - LRC Lombok Timur

“ Tidak semua orangtua mengetahui cara memperlakukan anak disabilitas, terkadang justru orangtua, keluarga dan lingkunganlah yang membuat kami semakin tidak berdaya”

Ade Usman

Penyandang disabilitas netra

Namanya Ade Usman, anak ketiga dari tiga bersaudara. Ade mengalami kebutaan sejak lahir namun baru diketahui oleh kedua orangtuanya ketika Ade memasuki usia 6 Bulan. Hal ini disadari oleh ibunya ketika Ade diberikan mainan namun tidak merespon, pun ketika Ade diajak bermain dan bercanda, jika hanya dengan gerakan tangan dan mimik wajah, Ade tidak akan merespon. Hal ini membuat khawatir kedua orangtuanya, dan membawa Ade untuk

menjalani pemeriksaan ke puskesmas. Ade memang dinyatakan mengalami kebutaan total karena ada gangguan pada syaraf mata. Ade bisa menjalani operasi tapi akan membutuhkan beberapa tahapan karena terkait dengan syaraf dimana akan mempengaruhi fungsi syaraf yang lain.

Mendengar hal tersebut tentu saja membuat kedua orangtua Ade bersedih, karena untuk menjalani beberapa kali operasi tentu kesulitan bagi mereka. Mengingat besaran biaya yang harus mereka keluarkan serta risiko lain yang mungkin saja Ade alami jika tetap dilakukan operasi. Sehingga kedua orang tua Ade memutuskan untuk tidak melakukan operasi.

Kini Ade telah memasuki usia 20 tahun, tapi dia tidak bergantung pada orang lain. Untuk aktivitas harian dia bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Bahkan setiap memasuki waktu sholat Ade berjalan sendirian ke Musholla yang berjarak 200 Meter dari rumahnya tanpa alat bantu. “Sudah hafal, kan sejak kecil saya memang sholat di sana terus. Tapi pernah juga sih nabrak orang,” ungkap Ade disertai tawa saat menceritakan pengalamannya menabrak orang saat menuju Musholla.

Ade juga ternyata bisa mengendarai sepeda, biasanya hanya di sekitar rumah saja. Tapi belakangan dia sudah tidak mau lagi naik sepeda setelah kejadian menabrak orang dan orang tersebut marah-marah, “ngapain naik sepeda, sudah tau juga dirinya buta!,” ucap Ade menirukan ucapan orang yang dulu pernah dia tabrak. Sejak saat itu dia sudah tidak mau lagi naik sepeda. Ucapan-ucapan seperti itu cukup sering Ade dapatkan, tapi tidak

membuatnya berkecil hati. Karena ada orangtuanya yang selalu memberikan support kepada Ade.

Memang Ade tidak pernah bersekolah, karena jarak ke tempat Sekolah Luar Biasa (SLB) dari desanya cukup jauh. Orangtuanya tidak memiliki biaya untuk antar jemput. Tapi disela-sela kesibukan orangtuanya yang bekerja sebagai buruh tani dan *ngadas sampi* (memelihara sapi milik orang lain dengan sistem bagi hasil), mereka menyempatkan untuk mengajar Ade mengaji dengan metode hafalan, hingga Ade sering dipercaya untuk Adzan di Musholla dekat rumahnya.

Selain orangtua, Ade juga memiliki beberapa teman di sekitar rumahnya yang sering menemani Ade bermain. Melalui mereka, Ade bisa mendengarkan ceramah dan pengajian dari gawai yang mereka miliki. Dari mereka pula Ade mendapatkan banyak pengetahuan tentang alam sekitarnya, bagaimana bentuk daun, matahari, waktu siang dan malam serta banyak hal yang ingin diketahuinya. Tentu hal tersebut tidak memberatkan bagi teman-temannya, karena ketika mereka memiliki masalah, justru Ade akan menjadi teman curhat mereka. Jadi tidak heran jika Ade memiliki kemampuan komunikasi dengan bahasa Indonesia yang sangat baik. “Ade itu pintar dan bisa jadi teman curhat yang menyenangkan,” ucap Hirsal, salah satu teman bermain Ade. Sayangnya, tidak semua anak disabilitas memiliki orangtua dan teman-teman seperti yang dimiliki oleh Ade.

Ketika berkesempatan hadir pada satu kegiatan yang dilaksanakan oleh LRC, Ade mengaku sangat senang karena diundang ke acara-

acara diskusi seperti yang dilakukan oleh LRC. Bahkan saat sesi diskusi kelompok Ade cukup aktif menyampaikan pendapatnya. Salah satu hal yang disampaikan adalah perlu ada media sosialisasi yang ramah disabilitas. Apalagi jika Desa Aikmel Utara benar-benar mau menjadi desa digital, pengelola sistem informasi desa bisa membuat Profil desa Aikmel Utara yang ada narasinya, sehingga orang-orang netra juga bisa mendapatkan gambaran seperti apa desa tempat mereka tinggal.

“Kami juga ingin tahu seperti apa desa kami, kami bisa kok akses informasi tersebut.” ucap Ade saat diskusi kelompok yang tentu saja disambut baik oleh anggota kelompoknya, yang kebetulan membahas tentang desa digital dan potensi desa. Sehingga muncul usulan program untuk mendorong digitalisasi desa yang ramah disabilitas.

Kegiatan yang dilakukan oleh LRC bukan kegiatan pertama yang pernah diikuti oleh Ade. Ada beberapa kegiatan yang pernah diikuti. Namun tidak semua kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada disabilitas untuk menyampaikan pendapat tanpa ada perasaan tertekan. “Saya senang di kegiatan ini, apalagi saya juga ikut maju mewakili kelompok saya untuk presentasi hasil diskusi, mungkin kalo teman-teman saya yang disabilitas lainnya juga diundang mereka pasti juga akan sangat senang. Sayangnya mereka harus ke sekolah”. Ade juga berharap kegiatan seperti ini tidak hanya hari ini saja, tetapi tetap terus dilakukan secara berkelanjutan terutama melibatkan penyandang disabilitas yang lebih banyak lagi.

Ade mengaku pernah mengikuti pelatihan wirausaha yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja, tapi waktu itu hanya dia sendiri dari Desa Aikmel Utara yang mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan tersebut. Menurutny dia ingin mengembangkan pengetahuan yang didapatkannya, tapi ada ketakutan saat membuka usaha kecil-kecilan di rumah, terutama saat melayani pembeli. Karena menurutnya cukup kesulitan ketika memberikan uang kembalian kepada pembeli. “Kalo berjualan saya butuh pendamping, karena saya gak bisa membedakan uang untuk kembalian”, ucap Ade. Meskipun Ade mengakui bahwa banyak pembeli yang baik, yang menyebutkan langsung jumlah uangnya dan tidak meminta uang kembalian. Karena kendala itulah sehingga Ade tidak lagi mau berjualan di rumah, dan memilih untuk bekerja sebagai pembungkus gula pasir pada tetangga yang membuka toko Sembako.

“Saya ingin terus bekerja menghasilkan uang buat bantu keluarga, terlebih lagi saat ini. Kakak pertama saya yang sudah menikah ternyata bercerai dan memilih menjadi buruh migran. Sementara kedua anaknya dititipkan pada ibu saya”, ucap Ade.

Mendapatkan informasi tersebut, Tim LRC melakukan konfirmasi kepada pemerintah Desa Aikmel Utara. Dan ternyata Ade merupakan salah satu disabilitas yang akan mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah desa melalui pemberdayaan masyarakat rentan dan disabilitas untuk pengentasan kemiskinan ekstrem di tahun 2025 ini. “Tahun ini kami ada pemberdayaan untuk disabilitas sebanyak 6 orang dan 4 orang akan mendapat

pembiayaan pendidikan. Sementara untuk Ade, akan mendapatkan bantuan usaha sesuai kemampuannya”, Ucap Irwan, Sekertaris Desa Aikmel Utara.

Ada satu pesan luar biasa yang disampaikan oleh Ade saat menutup presentasinya, saat itu Ade menyampaikan bahwa tidak semua orang tua mengetahui bagaimana memperlakukan anak dengan disabilitas. Terkadang justru orangtua, keluarga dan lingkungan yang membuat disabilitas semakin tidak berdaya. “Kita memang disabilitas, tapi kita harus berkualitas. Untuk itu, teman-teman disabilitas, jangan kita saja yang diwarnai. Tapi mari, kita yang mewarnai”, pungkas Ade yang disambut tepuk tangan dan haru semua peserta diskusi.



**KABUPATEN MAROS,
SULAWESI SELATAN**



Kegiatan tuntas administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Borikamase menjadi awal dari perubahan besar, di mana seluruh warga desa, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan mendapatkan akses yang setara untuk memiliki dokumen identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Inisiatif Inklusif di Desa

Syifa Ramadhani Azzahra

Program Officer INKLUSI - BaKTI Maros

Pada tahun 2024, Desa Borikamase mengambil langkah maju dan visioner dengan mengintegrasikan program-program Inklusi ke dalam Anggaran Dana Desa. Ini adalah tonggak penting dalam pembangunan desa yang menegaskan bahwa kesejahteraan harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Inisiatif ini bukan hanya sekadar wacana, tetapi diwujudkan melalui alokasi dana khusus untuk pelatihan dan penguatan penyandang disabilitas.

Langkah ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros memiliki komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa, semua warganya, tanpa terkecuali, mempunyai hak dan berkesempatan merasakan manfaat pembangunan yang sedang berlangsung.

Salah satu inisiatif nyata yang diambil oleh Pemerintah Desa Borikamase adalah pembentukan Kelompok Disabilitas Desa.

Kelompok ini tidak hanya dibentuk sebagai formalitas, tetapi juga didukung dengan bantuan konkrit berupa 100 ekor bebek petelur. Inisiatif ini memiliki dampak besar terhadap pemberdayaan ekonomi anggota kelompok, terutama bagi mereka yang sebelumnya kesulitan mendapatkan penghasilan. Bebek petelur tersebut membantu meningkatkan pendapatan anggota kelompok, sekaligus membuktikan bahwa pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas dapat terwujud dengan dukungan dan kebijakan yang tepat.

Pada Juni 2024, Pemerintah Desa Borikamase mengambil langkah lebih lanjut dengan menandatangani Komitmen Bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Maros. Kolaborasi ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan administrasi kependudukan (adminduk) di desa, sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan desa inklusif.

Masalah administrasi kependudukan adalah hal penting yang seringkali terabaikan, terutama bagi warga yang memiliki keterbatasan fisik dan keterbatasan sensorik buta. Namun, tanpa dokumen administrasi yang lengkap, akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, bisa terhalang.

Langkah awal dari kolaborasi ini diwujudkan dalam kegiatan tuntas administrasi kependudukan yang diselenggarakan pada 8 Agustus 2024. Kegiatan ini menjadi awal dari perubahan besar, di mana seluruh warga desa, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan akses yang setara untuk memiliki dokumen identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Salah satu cerita sukses yang muncul dari inisiatif ini adalah kisah Ismail, seorang penyandang disabilitas *low vision*. Ismail sebelumnya tidak memiliki KTP karena kesulitan dalam melakukan pemeriksaan iris mata, yang menjadi salah satu prosedur pengambilan data biometrik. Namun, berkat pendampingan dari Kelompok Konstituen Desa Borikamase dan bantuan dari Disdukcapil, Ismail akhirnya dapat memperoleh KTP. Ini adalah pencapaian penting yang menegaskan keberhasilan Program INKLUSI-BaKTI di Desa Borikamase.

Kepala Desa Borikamase, Aswing, menyatakan kegembiraannya atas kerja sama ini, dengan menekankan bahwa selama 11 tahun masa jabatannya, baru kali ini Disdukcapil langsung ke desa untuk melayani masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang erat antara pemerintah desa dan lembaga terkait dapat memberikan solusi nyata terhadap masalah-masalah yang selama ini menghambat akses warga desa terhadap hak-hak dasar mereka.

Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Desa Borikamase untuk menciptakan desa yang inklusif bukan hanya sekadar retorika, tetapi merupakan tindakan nyata yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Pemerintah Desa Borikamase berkomitmen untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam proses pembangunan, dan semua warganya memiliki hak serta kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkembang di dalam desa.

Konsistensi Desa Borikamase dalam mewujudkan desa inklusif sangatlah penting. Salah satu langkah awal yang sangat krusial

dalam mencapai tujuan ini adalah memastikan bahwa setiap warga desa memiliki dokumen administrasi kependudukan yang lengkap. Tanpa adminduk, warga desa tidak dapat mengakses layanan dasar yang mereka butuhkan, yang pada akhirnya dapat menutup peluang mereka untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan tidak ada lagi warga yang kesulitan dalam mendapatkan dokumen administrasi, termasuk penyandang disabilitas yang seringkali diabaikan.

Tahun 2023, Pemerintah Desa Borikamase membuat Bidang Miring di Kantor Desa Borikamase. Bidang miring ini dirancang dengan tujuan menghilangkan hambatan aksesibilitas bagi masyarakat, terutama bagi penyandang disabilitas fisik dan lanjut usia. Kini, setiap warga, tanpa memandang kondisi fisiknya, dapat dengan mudah mengakses kantor desa dan berpartisipasi dalam segala kegiatan yang diadakan di sana.

Semangat inklusifitas yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Borikamase memberikan contoh nyata bagaimana sebuah desa dapat bertransformasi menjadi komunitas yang lebih adil dan setara. Dengan memastikan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki akses terhadap layanan dasar. Desa Borikamase sedang membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain langkah yang diambil oleh Desa Borikamase, Program INKLUSI melalui Yayasan BaKTI telah mendorong 12 desa lainnya untuk mengikuti jejak yang sama. Yayasan BaKTI bekerja dengan desa-desa ini untuk merancang dan mengesahkan Peraturan Desa

(Perdes) tentang desa inklusif, sebuah regulasi yang akan memastikan bahwa prinsip inklusifitas tertanam kuat dalam kebijakan dan praktik di tingkat desa. Namun, upaya ini tidak berhenti pada pembuatan peraturan saja. Pendampingan dan pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan tersebut diimplementasikan dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi seluruh warga desa, terutama mereka yang rentan dan memiliki keterbatasan.

Dengan adanya komitmen dari berbagai pihak, baik pemerintah desa, Disdukcapil, maupun organisasi seperti Yayasan BaKTI, Desa Borikamase telah membuktikan bahwa inklusifitas dapat diimplementasikan di tingkat lokal dengan dampak yang signifikan. Tidak hanya membawa perubahan besar dalam kehidupan warga desa, tetapi juga menjadi inspirasi bagi desa-desa lain untuk mengikuti langkah yang sama.

Desa Borikamase kini bukan hanya sekadar tempat tinggal dan pemukiman, melainkan sebuah komunitas yang bersatu dalam visi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua warganya, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan.



Nenek Zaenab bersama suami di depan rumah mereka yang dibangun dari hasil kolaborasi pemerintah desa, Baznas, TNI dan masyarakat Desa Mangloreng.

Kolaborasi Di Desa Mangloreng

Syifa Ramadhani Azzahra & M. Ghufan H. Kordi K.

Program Officer INKLUSI - BaKTI Maros - Program & Publication Officer

Program INKLUSI - BaKTI

Berawal dari laporan masyarakat, ditemukan dua pasangan lanjut usia (lansia) penyandang disabilitas di Desa Mangloreng, Kecamatan Bantimurung yang hidup tanpa tempat tinggal, sehingga pasangan tersebut juga disebut sebagai gelandangan. Keduanya beristirahat dan tidur di berbagai teras rumah warga atau rumah-rumah kosong.

Kedua lansia tersebut, Nenek Zaenab dan Abdullah, suaminya, menghabiskan hari-hari mereka dengan mengemis di pinggir jalan dan di sekitar SPBU. Mengemis merupakan "pekerjaan" yang dijalani kedua lansia penyandang disabilitas tersebut, karena keduanya tidak memiliki pekerjaan dan cara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Nenek Zaenab, seorang penyandang disabilitas mental dan intelektual, hidup dalam keterbatasan fisik, sedangkan suaminya mengalami kesulitan lebih parah. Karena usia lanjut, kakinya tak lagi

mampu berdiri dan berjalan. Suaminya terpaksa bergerak dengan cara beringsut di tanah, karena kakinya tidak dapat digunakan.

Melihat kondisi ini, Kepala Desa Mangeloreng bersama Kelompok Konstituen Desa Mangeloreng segera bertindak untuk membantu pasangan lansia tersebut. Mereka menyadari bahwa Nenek Zaenab dan suaminya sangat membutuhkan tempat tinggal yang layak agar dapat menjalani hari-hari mereka dengan lebih baik dan aman.

Namun, untuk membangun sebuah rumah yang sederhana dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kepala Desa Mangeloreng bersama kelompok konstituen berdiskusi untuk mencari jalan ke luar. Beberapa pilihan didiskusikan, akhirnya jatuh pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Lembaga yang mengurus dana zakat ini sudah dikenal pemerintah desa dan kelompok konstituen, sehingga mereka memutuskan untuk mengajukan bantuan.

Untuk itu, Pemerintah Desa Mangeloreng dan Kelompok Konstituen Desa Mangeloreng mengajukan bantuan dari Baznas melalui Program Rumah Layak Huni. Program ini bertujuan menyediakan hunian bagi warga yang tidak mampu, terutama mereka yang hidup dalam keterbatasan. Terlebih bagi kedua nenek yang merupakan lansia dengan disabilitas.

Usulan pembangunan rumah untuk warga penyandang disabilitas sekaligus lansia, dari Pemerintah Desa Mangeloreng dan Kelompok Konstituen Desa Mangeloreng diterima oleh Baznas. Karena kedua penyandang disabilitas sekaligus lansia tersebut memenuhi syarat untuk menerima bantuan. Apalagi pengajuan untuk bantuan rumah tersebut berasal dari pemerintah desa dan kelompok konstituen.

Namun, bantuan tidak berhenti sampai di situ. Kepala desa dan kelompok konstituen menyadari bahwa pembangunan rumah memerlukan biaya yang juga cukup banyak. Oleh karena itu, kepala desa dan kelompok konstituen melakukan pertemuan dengan Koramil 1422-02/Bantimurung, dan menyampaikan rencana tersebut sekaligus memohon dukungan dan bantuan. Koramil 1422-02/Bantimurung pun setuju untuk ikut membantu dalam proses pembangunan rumah bagi Nenek Zaenab dan suaminya.

Pemerintah desa, kelompok konstituen, dan Koramil 1422-02/Bantimurung menunjukkan bagaimana pemerintah, masyarakat, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersinergi dan bekerja sama untuk kemanusiaan dan pembangunan. Kolaborasi multi *stakeholders* seperti ini penting untuk digalakkan dan menjadi contoh. Apalagi ini terkait dengan kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Selama pembangunan berlangsung, Pemerintah Desa Mangeloreng dan kelompok konstituen berperan aktif, tidak hanya sebagai penghubung antara berbagai pihak, tetapi juga dalam memberikan dukungan logistik. Mereka menyediakan makanan dan minuman bagi warga dan anggota Koramil yang bekerja membangun rumah.

Setelah melalui proses pembangunan yang tidak lama, akhirnya sebuah rumah layak huni berdiri kokoh di Desa Mangeloreng. Rumah tersebut kini menjadi tempat tinggal baru bagi Nenek Zaenab dan suaminya. Rumah ini memberikan mereka perlindungan dan kenyamanan yang selama ini mereka impikan. Tidak hanya rumah fisik yang dibangun, tetapi juga sebuah harapan baru bagi pasangan lansia tersebut untuk menjalani sisa hidup mereka dengan lebih layak dan manusiawi.

Selain menyediakan rumah, Pemerintah Desa Mangaloreng juga berkomitmen untuk memastikan kebutuhan dasar pasangan lansia ini terpenuhi. Mereka berupaya memastikan Nenek Zaenab dan suaminya mendapatkan pasokan makanan secara rutin, sehingga mereka tidak perlu lagi berjalan jauh dan mengemis di jalanan hanya untuk mencari nafkah. Dengan adanya rumah dan bantuan makanan ini, Nenek Zaenab dan suaminya kini dapat menjalani hari-hari mereka dengan lebih layak, tanpa rasa khawatir akan kebutuhan hidup mereka.

Kolaborasi yang terjadi di Desa Mangaloreng ini menjadi contoh baik dari sinergi lintas sektor antara pemerintah desa, masyarakat, Baznas, dan Koramil. Model kerja sama ini tidak hanya memberikan solusi bagi satu keluarga, tetapi juga bisa menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Maros dan daerah lain di Indonesia. Dengan semangat gotong royong, kolaborasi seperti ini bisa membawa perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Cerita Nenek Zaenab dan suaminya mengajarkan bahwa dengan kerja sama yang baik antara berbagai pihak, perubahan positif dapat terwujud. Kehadiran rumah layak huni dan dukungan berkelanjutan untuk kebutuhan hidup pasangan lansia ini menjadi bukti bahwa melalui kolaborasi, masyarakat bisa bersama-sama membantu mereka yang berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Mereka yang berada di 'garis batas' kehidupan yang serba sulit. Mereka tidak mempunyai kemampuan lagi untuk meraih mimpi, karena berbagai keterbatasan dan hambatan.

Nenek Zaenab dan suaminya adalah lansia yang menyandang disabilitas. Sehingga memilih menjadi pengemis adalah pilihan yang mungkin "mudah" sekaligus "sulit". Mengemis sering dianggap pekerjaan yang "mudah", namun sering dicibir sebagai bukan pekerjaan. Karenanya, memutuskan untuk menjadi pengemis adalah sesuatu yang "sulit", namun inilah yang mungkin bisa dipilih oleh Nenek Zaenab dan Kakek Abdullah.

Kolaborasi untuk membangun rumah Nenek Zaenab dan suaminya, mencerminkan semangat gotong royong yang masih kuat di Desa Mangaloreng. Di tengah kehidupan yang menggerus nilai-nilai gotong royong, Desa Mangaloreng memberi contoh, bahwa semua warga desa, yang juga sebagai warga negara, harus memperoleh hak-hak mereka. Apa pun status dan kondisi mereka, mereka tidak boleh tertinggal.



Muhammad Ali, disabilitas daksa yang juga salah seorang pengurus Komisi Disabilitas Daerah (KDD) Kabupaten Maros yang membuka jasa servis elektronik di rumahnya.

Membangun Ketenagakerjaan Inklusif

Syifa Ramadhani Azzahra

Program Officer INKLUSI - BAKTI Maros

Pada 2023, Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Maros resmi dibentuk, sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mendukung penyandang disabilitas, agar dapat mengakses peluang kerja dan mengembangkan usaha. Kehadiran ULD Ketenagakerjaan ini bertujuan untuk memberikan dukungan nyata bagi penyandang disabilitas agar lebih mudah mengakses lapangan pekerjaan dan peluang usaha.

Salah satu langkah awal yang diambil adalah mengadakan pendampingan intensif bagi para penyandang disabilitas, terutama dalam memanfaatkan program-program pemerintah, seperti Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula. Program TKM Pemula adalah sebuah program dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang bertujuan mendorong calon pebisnis pemula melalui bantuan modal dan pendampingan usaha. Program ini menjadi salah satu langkah konkrit pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja melalui pemberdayaan ekonomi berbasis usaha mikro dan kecil.

Program ini menawarkan bantuan modal usaha serta pendampingan bagi calon pebisnis pemula, termasuk kelompok-kelompok masyarakat, seperti penyandang disabilitas. Mengembangkan usaha atau bisnis tidak mudah, dibutuhkan kemauan dan ketangguhan. Apalagi bagi penyandang disabilitas, tentu lebih sulit lagi karena mereka membangun usaha di tengah masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak-hak penyandang disabilitas.

Pendamping ULD Ketenagakerjaan Kabupaten Maros dengan sigap memberikan bimbingan kepada 18 penyandang disabilitas yang berminat mengikuti program TKM Pemula 2024. Proses pendampingan meliputi membantu peserta melengkapi dokumen-dokumen persyaratan, mempersiapkan proposal usaha, serta memastikan seluruh berkas yang diajukan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Hasilnya, dari 18 peserta, terdapat empat penyandang disabilitas yang berhasil lolos dan mendapatkan bantuan TKM Pemula.

Keempat penyandang disabilitas yang berhasil memperoleh dukungan TKM Pemula adalah Syukur, seorang disabilitas daksa yang mengembangkan usaha ternak itik petelur. Cili, seorang disabilitas tuli/rungu dengan usaha ternak ayam pedaging. Muhammad Ali, disabilitas daksa yang menjalankan jasa servis elektronik, dan Syahria, seorang disabilitas tuli yang membuka usaha jasa menjahit.

Keberhasilan mereka mendapatkan bantuan ini tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga diikuti dengan pendampingan dan penguatan usaha yang berkelanjutan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Tentu, pendamping dari ULD

Ketenagakerjaan Maros juga mempunyai kewajiban untuk mendampingi dan memantau perkembangan usaha dari empat penyandang disabilitas tersebut.

Selain mendukung pengembangan usaha mandiri, Pendamping ULD Ketenagakerjaan Kabupaten Maros juga aktif melakukan pendampingan bagi penyandang disabilitas yang ingin bekerja di sektor formal. Salah satu upaya nyata yang sedang berlangsung adalah pendataan penyandang disabilitas usia produktif yang memiliki keinginan untuk bekerja. Data tersebut kemudian diolah menjadi profil yang akan ditawarkan kepada berbagai perusahaan di Kabupaten Maros, dengan tujuan mencocokkan keterampilan dan keahlian penyandang disabilitas dengan kebutuhan perusahaan.

Untuk memperkuat upaya penyaluran tenaga kerja disabilitas, ULD Ketenagakerjaan Kabupaten Maros bekerja sama dengan Komisi Daerah Disabilitas (KDD) Kabupaten Maros, dalam menyelenggarakan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan terkait kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas. Sosialisasi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya Pasal 53 ayat (1), yang mewajibkan pemerintah mempekerjakan penyandang disabilitas sebesar 2% dari total pegawai di sektor publik dan 1% di sektor swasta. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan mengedukasi perusahaan agar memahami keberagaman disabilitas dan potensi kontribusi mereka di dunia kerja.

Sebagai puncak dari upaya ini, pada tahun 2024, Kabupaten Maros berhasil menyelenggarakan *Job Fair* yang ramah disabilitas. *Job Fair* ini menjadi wadah penting untuk mempertemukan penyandang

disabilitas dengan berbagai perusahaan. Sebelum acara berlangsung, dilakukan sosialisasi intensif untuk meningkatkan kesadaran perusahaan mengenai potensi tenaga kerja disabilitas. Kegiatan ini membuahkan hasil positif, di mana beberapa penyandang disabilitas berhasil mendapatkan kesempatan wawancara kerja dan penempatan di perusahaan lokal.

Job Fair ini menjadi ajang penting, bukan hanya sebagai sarana mencari pekerjaan bagi para penyandang disabilitas, tetapi juga sebagai media edukasi bagi perusahaan agar semakin memahami potensi besar yang dimiliki oleh mereka. Kolaborasi ini menciptakan atmosfer baru di dunia ketenagakerjaan Kabupaten Maros, di mana inklusi sosial menjadi bagian integral dari pembangunan ekonomi daerah.

Aktivitas dan dedikasi yang dilakukan oleh Pendamping ULD Ketenagakerjaan Kabupaten Maros, tidak hanya berdampak di tingkat lokal tetapi juga mendapat perhatian di tingkat nasional. Kepala Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Maros diundang untuk berbagi pengalaman dan praktik baik dalam Forum Inspirasi, sebuah forum berbagi pengetahuan yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait ketenagakerjaan dari seluruh Indonesia. Kehadiran mereka di forum ini menjadi bukti bahwa kolaborasi dan komitmen yang kuat dapat menciptakan perubahan nyata bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas.

Keberhasilan berbagai inisiatif yang dijalankan oleh ULD Ketenagakerjaan Kabupaten Maros mencerminkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, komunitas disabilitas, dan sektor swasta dalam

menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Dengan semangat inklusi dan pemberdayaan, ULD Ketenagakerjaan Kabupaten Maros terus berkomitmen membuka lebih banyak peluang bagi penyandang disabilitas untuk berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat. Melalui berbagai program dan pendampingan yang berkelanjutan, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat meraih kemandirian ekonomi dan partisipasi aktif di dunia kerja.

Perubahan nyata yang telah dicapai ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas disabilitas, dan sektor swasta dapat mendorong terciptanya lapangan kerja yang lebih inklusif. ULD Ketenagakerjaan Kabupaten Maros terus berkomitmen untuk memperluas jangkauan pendampingan, memperkuat jejaring kerja sama, dan menciptakan peluang yang lebih besar bagi para penyandang disabilitas agar mereka bisa mandiri dan berkontribusi bagi kemajuan daerah.

Dengan semangat perubahan ini, harapannya Kabupaten Maros dapat menjadi contoh inspiratif bagi daerah lain dalam membangun ketenagakerjaan yang adil dan merata bagi semua kalangan.



Perwakilan tenaga pendidik dari Kabupaten Maros mengadakan kegiatan *cross learning* ke daerah-daerah yang telah lebih dahulu sukses dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif, seperti di Kota Yogyakarta dan Kota Malang.

Menuju Pendidikan Inklusif di Kabupaten Maros

Syifa Ramadhani Azzahra

Program Officer INKLUSI - BAKTI Maros

Pada tahun 2023, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros mengambil langkah maju dalam mewujudkan pendidikan inklusif bagi semua anak, termasuk anak-anak yang memiliki keterbatasan, seperti penyandang disabilitas. Keputusan strategis ini dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros Nomor 421.9/33/KPTS/DISDIKBUD tentang Penetapan Piloting Sekolah Inklusif Pada Satuan Pendidikan Tahun 2023. Dengan keputusan ini, sebanyak 42 sekolah dari berbagai jenjang—TK/PAUD, SD, dan SMP—ditetapkan sebagai sekolah piloting inklusif yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Maros.

Langkah ini bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi sebuah komitmen nyata untuk memberikan kesempatan yang setara bagi anak-anak penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan yang layak. Implementasi program ini pun diperkuat dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

800/34/KPTS/DISDIKBUD tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025.

Dalam petunjuk teknis tersebut ditegaskan bahwa setiap satuan pendidikan di Kabupaten Maros dilarang menolak peserta didik penyandang disabilitas. Bahkan, persyaratan batas usia dan ijazah bagi calon peserta didik disabilitas dikecualikan agar mereka dapat diterima di sekolah-sekolah yang telah ditetapkan.

Untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan efektif, seluruh satuan pendidikan diwajibkan membuat spanduk dan selebaran online mengenai penerimaan peserta didik jalur afirmasi bagi anak-anak penyandang disabilitas. Langkah ini bertujuan agar masyarakat luas mengetahui dan memahami hak-hak anak disabilitas dalam memperoleh pendidikan.

Adanya petunjuk teknis (juknis) mengenai penerimaan peserta didik memberikan dampak yang signifikan, terutama dalam pendataan peserta didik disabilitas di setiap satuan pendidikan. Data yang dikumpulkan menjadi lebih akurat dan terperinci, memungkinkan pemetaan yang lebih jelas terhadap ragam disabilitas yang dimiliki oleh peserta didik. Dengan data yang lebih terstruktur, sekolah dan pemerintah dapat merancang kebijakan serta mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif, baik dalam hal tenaga pendidik, fasilitas, maupun metode pembelajaran yang sesuai.

Selain itu, pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi pendidikan inklusif juga menjadi lebih mudah dilakukan, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat terus disempurnakan.

Pada akhirnya, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan inklusif, memastikan setiap peserta didik mendapatkan haknya dalam lingkungan belajar yang ramah dan sesuai dengan kebutuhannya.

Tidak berhenti di situ, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros juga berupaya memperkuat kapasitas tenaga pendidik agar lebih siap dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah mengadakan kegiatan *cross learning* yang melibatkan bidang PAUD dan SMP. Dalam kegiatan ini, perwakilan tenaga pendidik dari Kabupaten Maros dikirim ke daerah-daerah yang telah lebih dahulu sukses dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif, seperti di Kota Yogyakarta dan Kota Malang.

Dari hasil *cross learning* tersebut, banyak pembelajaran dan praktik baik yang bisa diterapkan di Kabupaten Maros. Misalnya, metode pembelajaran berbasis diferensiasi yang diterapkan di Kota Yogyakarta sangat membantu guru dalam mengakomodasi kebutuhan belajar setiap anak sesuai dengan kemampuan dan karakteristiknya. Sementara itu, Kota Malang memberikan inspirasi dalam pengelolaan sekolah inklusif yang berbasis komunitas, di mana orang tua, tenaga pendidik, dan pemerintah daerah bekerja sama dalam menciptakan lingkungan belajar yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus.

Selain itu, penguatan kapasitas tenaga pendidik terus dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai pelatihan dan workshop tentang pendidikan inklusif. Guru-guru yang tergabung dalam

sekolah piloting diberikan pemahaman mendalam mengenai cara mendampingi peserta didik dengan disabilitas, mulai dari pendekatan psikologis, metode pengajaran yang adaptif, hingga teknik komunikasi yang efektif dengan anak berkebutuhan khusus.

Di sisi lain, masyarakat pun mulai menunjukkan respons positif terhadap kebijakan ini. Jika sebelumnya masih ada stigma terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah umum, kini semakin banyak orang tua yang mendukung dan bahkan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah inklusif. Komunitas orang tua pun mulai terbentuk sebagai wadah berbagi pengalaman dan dukungan bagi keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus.

Sebagai bentuk komitmen yang lebih luas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros juga akan menggandeng berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah dan universitas, untuk mendukung pendidikan inklusif ini. Ke depannya akan dilakukan kerja sama dengan beberapa universitas dalam memberikan pelatihan kepada guru-guru di sekolah inklusif serta melakukan penelitian untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif.

Selain itu, berbagai forum diskusi dan seminar diadakan secara rutin untuk terus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif. Dinas pendidikan juga bekerja sama dengan media lokal untuk menyebarkan informasi dan cerita sukses dari sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Maros. Dengan demikian, kesadaran dan dukungan dari masyarakat terhadap pendidikan inklusif dapat terus meningkat.

Ke depan, tantangan yang masih dihadapi dalam implementasi pendidikan inklusif ini adalah keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, Dinas pendidikan terus berupaya mencari solusi, termasuk dengan mengajukan anggaran tambahan untuk pengadaan fasilitas pendukung, seperti ruang terapi, alat bantu komunikasi, dan infrastruktur ramah disabilitas di sekolah-sekolah inklusif.

Dengan langkah-langkah yang telah dilakukan, Kabupaten Maros menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang tidak hanya berhenti pada regulasi, tetapi juga benar-benar diimplementasikan secara nyata. Ke depan, diharapkan program ini dapat terus berkembang dan menjadi model bagi daerah lain dalam memberikan pendidikan yang setara bagi semua anak, tanpa terkecuali. Dengan dukungan dari semua pihak, pendidikan inklusif bukan lagi sekadar impian, tetapi kenyataan yang membawa perubahan positif bagi masa depan anak-anak penyandang disabilitas di Kabupaten Maros.

Dari Harapan Menuju Kemandirian

Syifa Ramadhani Azzahra

Program Officer INKLUSI - BaKTI Maros

Di Kabupaten Maros, inisiatif pemberdayaan ekonomi mulai menampakkan hasilnya. Enam unit usaha yang tersebar di Borikamase, Samangki, Simbang, dan Lekopancing kini telah dibentuk dan berkembang, membawa harapan bagi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan miskin, perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, dan lanjut usia (lansia). Inisiatif ini lahir dari kebutuhan untuk menciptakan peluang ekonomi bagi mereka yang sering kali mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan pelatihan usaha.

Pembentukan unit usaha ini tidak terjadi secara instan. Pada tahun 2023, melalui program pemberdayaan ekonomi yang melibatkan perencanaan dan penganggaran tingkat desa, beberapa kelompok masyarakat mulai merintis usaha. Pemerintah desa, terutama di Borikamase, memberikan bantuan bagi kelompok disabilitas yang ingin mencoba usaha ternak bebek. Usaha ini menjadi langkah awal bagi mereka untuk mandiri secara finansial, sekaligus menciptakan peluang kerja bagi sesama anggota kelompok.

Di Desa Borikamase, seorang wirausaha bernama Evi melihat peluang bisnis pada bulan Ramadhan 2024. Saat itu, ia menyadari bahwa di lingkungannya masih jarang yang menjual kripik peyek, camilan renyah yang banyak diminati. Dengan modal keberanian dan semangat berusaha, ia memulai produksi dalam skala kecil. Respons pasar yang luar biasa membuatnya semakin yakin bahwa bisnis ini memiliki prospek yang baik. Sejak saat itu, ia berkomitmen untuk terus menjalankan usahanya hingga kini, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan kualitas produknya.

Inovasi juga muncul dalam bentuk pengolahan bahan baku lokal yang melimpah. Di Desa Samangki, banyaknya pasokan pisang melahirkan ide untuk memproduksi kripik pisang. Pengusaha lokal melihat bahwa dengan mengolah pisang menjadi produk bernilai tambah, mereka tidak hanya mengurangi limbah pertanian tetapi juga meningkatkan pendapatan. Sementara itu, perempuan yang lain memproduksi *Baruasa*, kue tradisional masyarakat Bugis. Kue ini dibuat bila ada pemesan, dan selalu ada pemesannya. Begitu pula dengan seorang pemilik lahan jamur di Desa Simbang yang memiliki visi untuk mengembangkan produk olahan jamur. Melalui beberapa uji coba dan inovasi, ia berhasil menciptakan kripik jamur yang mulai diminati oleh pasar lokal dan berpotensi berkembang lebih luas.

Selain usaha camilan, tantangan dalam industri perikanan juga menjadi perhatian para wirausaha di Maros. Salah satu unit usaha yang berkembang adalah usaha Nila Frozen di Desa Lekopancing, yang lahir dari permasalahan kelebihan pasokan ikan nila yang tidak terjual. Dengan kerja sama antara pengusaha lokal dan Unit

Pembenihan Rakyat (UPR), mereka menemukan solusi inovatif untuk mengolah ikan nila menjadi produk beku yang lebih tahan lama dan bernilai jual lebih tinggi. Upaya ini tidak hanya mengurangi pemborosan, tetapi juga membuka peluang pasar baru bagi para peternak ikan.

Dengan adanya dukungan yang berkelanjutan dari berbagai pihak, diharapkan lebih banyak unit usaha yang dapat tumbuh dan berkembang, menciptakan dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan usaha ini membuktikan bahwa dengan sedikit inovasi dan kerja sama, tantangan ekonomi dapat diubah menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Kini, produk nila beku mulai dipasarkan lebih luas, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun restoran yang membutuhkan pasokan ikan berkualitas dengan daya simpan lebih lama.

Keberhasilan unit-unit usaha ini tidak terlepas dari pendampingan yang diberikan oleh berbagai pihak, termasuk Program INKLUSI-BaKTI. Para pelaku usaha mendapatkan pelatihan dalam berbagai aspek bisnis, seperti cara menghitung harga pokok produksi, menentukan titik impas, serta pencatatan keuangan yang baik. Dengan memahami aspek finansial ini, mereka menjadi lebih mampu mengelola usaha secara profesional dan memastikan keberlanjutan bisnis mereka dalam jangka panjang.

Selain itu, pelatihan juga mencakup manajemen keuangan pribadi, termasuk bagaimana membedakan dompet usaha dan dompet rumah tangga. Hal ini menjadi penting agar para pelaku usaha tidak

mencampuradukkan keuangan usaha dengan pengeluaran pribadi, yang sering kali menjadi penyebab kegagalan usaha kecil. Dengan pendekatan ini, para pelaku usaha menjadi lebih disiplin dalam mengelola keuangan mereka dan dapat merencanakan ekspansi usaha dengan lebih baik.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat legalitas usaha, pemerintah daerah juga turut serta dalam mendukung unit-unit usaha ini. Melalui kerja sama dengan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros, para pelaku usaha mendapatkan layanan pengurusan Nomor Induk Berusaha secara langsung di lokasi kegiatan. Dengan memiliki legalitas usaha, mereka kini memiliki status yang jelas, memudahkan mereka untuk mengakses berbagai program bantuan, termasuk modal usaha dan pelatihan lanjutan.

Dampak dari program ini sangat terasa di komunitas yang terlibat. Tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan baru, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri para pelaku usaha, terutama mereka yang berasal dari kelompok rentan. Bagi perempuan miskin, perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, dan lanjut usia, memiliki usaha sendiri memberikan mereka kesempatan untuk berkontribusi dalam ekonomi keluarga dan masyarakat.

Keberhasilan program ini menjadi inspirasi bagi desa-desa lain untuk mengadopsi pendekatan serupa. Dengan adanya dukungan yang berkelanjutan dari berbagai pihak, diharapkan lebih banyak unit usaha yang dapat tumbuh dan berkembang, menciptakan dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, tantangan utama adalah bagaimana memastikan keberlanjutan usaha-usaha ini dalam jangka panjang. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan memperluas jangkauan pasar, baik melalui pemasaran digital maupun kerja sama dengan jaringan distribusi yang lebih besar. Selain itu, penguatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan lanjutan dan pendampingan bisnis juga perlu terus dilakukan agar mereka dapat menghadapi dinamika pasar dengan lebih baik.

Pada akhirnya, kisah sukses unit-unit usaha di Maros membuktikan bahwa dengan dukungan yang tepat, usaha kecil dapat tumbuh dan berkembang. Dari hanya sekadar inisiatif, kini unit-unit usaha ini telah menjadi sumber penghidupan yang mandiri dan berkelanjutan bagi masyarakat. Ini adalah bukti bahwa semangat keras, inovatif, dan ketekunan dapat membawa perubahan nyata bagi komunitas.

“

Tak diinginkan, tak dicintai, tidak diperhatikan, dilupakan orang, itu merupakan derita kelaparan yang hebat, kemiskinan yang lebih besar daripada orang yang tak bisa makan. Kita harus saling merasakan hal itu.

Mother Teresa

Biarawati

**KABUPATEN TANA TORAJA, |
SULAWESI SELATAN |**



YESMa dalam mengadvokasi kebijakan sebelumnya sudah membangun komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dan DPRD Tana Toraja, sebagai pembentuk peraturan daerah di tingkat kabupaten.

Advokasi Kebijakan untuk Peningkatan Pelayanan

Matias Tanan

Koordinator Program INKLUSI - YESMa Tana Toraja

Kewajiban negara yang dilaksanakan pemerintah adalah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta melayani masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat aturan/regulasi/kebijakan. Pemerintah membuat kebijakan untuk mewujudkan keinginan dan kebutuhan masyarakat, menjaga ketertiban umum, memajukan kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam membuat kebijakan, pemerintah dapat melibatkan masyarakat, artinya masyarakat dapat mengajukan usulan dan mengadvokasi kebijakan kepada pemerintah. Hal ini disebut sebagai partisipasi publik. Partisipasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Manfaat partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan, di antaranya meningkatkan kualitas kebijakan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, meningkatkan kepercayaan masyarakat

Mengadvokasi kebijakan merupakan suatu bentuk partisipasi publik yang melalui prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

terhadap pemerintah, memperkuat demokrasi, memastikan adanya implementasi yang lebih efektif.

Pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan berlaku dari tingkat pemerintah pusat sampai ke desa/kelurahan. Pelibatan masyarakat dalam Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) adalah salah satu dari sekian banyak bentuk partisipasi publik.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan di desa adalah kunci untuk pembangunan desa yang berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pemerintah desa dapat merumuskan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan warga. Hal ini akan berdampak positif pada kesejahteraan dan kemajuan desa secara keseluruhan.

Salah satu bentuk advokasi kebijakan yang diajukan Program INKLUSI yang dilaksanakan BaKTI melalui YESMa di Tana Toraja adalah mengadvokasi peraturan daerah (perda) yang berhubungan dengan penyandang disabilitas, yang kemudian melahirkan Perda Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kabupaten Inklusi dan Pelindungan Penyandang Disabilitas. Advokasi lainnya adalah, mendorong pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), yang menghasil-

kan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Melalui Program INKLUSI, YESMa juga mendorong sejumlah kebijakan lain, di antaranya, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 462/XI/TAHUN 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Tana Toraja, Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 219/V/TAHUN 2024 Tentang Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja Tahun, dan Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 248/VI/TAHUN 2024 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Tana Toraja.

Selain itu, YESMa juga mengadvokasi peraturan desa (perdes) tentang Desa Inklusi dan Ramah Anak pada 3 lembang/desa. Kesemua peraturan itu terkait dengan kepentingan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat secara inklusif.

Mengadvokasi kebijakan merupakan suatu bentuk partisipasi publik yang melalui prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. YESMa dalam mengadvokasi kebijakan sebelumnya sudah membangun komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dan DPRD Tana Toraja,

sebagai pembentuk peraturan daerah di tingkat kabupaten. Komunikasi itu terbangun dengan baik yang diawali dengan melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan kedua lembaga tersebut. Lalu setelah itu membangun komunikasi dengan Organisasi Perangkat daerah (OPD) terkait.

Kebijakan yang akan di advokasi terlebih dahulu dikomunikasikan dengan instansi terkait, kemudian YESMa mempersiapkan konsep kebijakan yang akan diadvokasi, seperti naskah akademik dan draf Rancangan peraturan daerah (Raperda), naskah akademik dan draf Rancangan peraturan desa (Raperdes)/Rancangan peraturan lembang (Raperlem), draf Rancangan peraturan bupati (Raperbup) UPTD PPA, draf SOP UPTD PPA dan beberapa rancangan peraturan lainnya. Dalam melakukan proses itu, YESMa berkoordinasi dan konsultasi dan Program INKLUSI BaKTI di Makassar. Proses selanjutnya adalah melakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas bersama materi muatan kebijakan. Setiap perkembangan/hasil pembahasan, dikoordinasikan dengan BaKTI.

Perkembangan proses rancangan kebijakan pada tataran OPD hendaknya dikawal dengan seksama dengan mencermati setiap perubahan yang terjadi untuk memastikan apakah rancangan kebijakan itu prosesnya tetap berjalan lancar. Bila ada kendala maka perlu lagi melakukan pertemuan dengan OPD untuk mencari solusi dan mengatasi masalahnya. Sering terjadi bahwa dibutuhkan pelibatan dari pihak lain, misalnya anggota DPRD sesuai dengan komisinya untuk memberi masukan atau pemahaman kepada OPD terkait tentang kebutuhan peraturan, dalam rangka pelayanan yang

lebih baik kepada masyarakat. Bahkan juga melibatkan jurnalis, melalui forum media, sangat membantu dalam mempublikasikan setiap perkembangan dalam proses advokasi kebijakan.

Biasanya suara anggota DPRD cukup didengar oleh OPD dan pemberitaan media dapat mendorong percepatan proses advokasi. Pelibatan anggota DPRD dan forum media dalam pertemuan–pertemuan pembahasan rancangan kebijakan merupakan salah satu bentuk strategi advokasi kebijakan yang dilakukan oleh masyarakat. Karena itu, Program INKLUSI-BaKTI di Tana Toraja melalui YESMa terus membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah/OPD, DPRD, dan forum media. Membangun komunikasi yang baik dengan para pihak akan terbangun kerja sama yang baik dan meningkatkan kepercayaan terhadap Program INKLUSI.



Pendataan terhadap penyandang disabilitas, lansia, perempuan miskin, kelompok rentan, dan marginal menjadi bahan/referensi untuk mengadvokasi Peraturan Lembang/Desa (Perlem/Perdes) tentang Lembang Inklusi.

Membangun Lembang Inklusif

Matias Tanan

Koordinator Program INKLUSI - YESMa Tana Toraja

Membangun lembang/desa inklusif adalah suatu upaya untuk membuka ruang bagi semua warga lembang untuk berpartisipasi dalam pembangunan lembang/desa. Lembang inklusif juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang adil dan sejahtera bagi semua warga, tanpa memandang latar belakang atau kemampuannya.

Tanda-tanda yang tampak pada lembang inklusif antara lain: warga dapat menerima perbedaan secara positif, adanya pelayanan yang ramah bagi disabilitas, memiliki kebijakan yang mendorong partisipasi warga, mengakui keberagaman dan memperkuat nilai-nilai budaya setempat, memiliki infrastruktur yang memadai bagi semua warga tanpa kecuali.

Untuk membangun lembang inklusif, diperlukan komitmen dan perubahan cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), anak-anak, perempuan, Kelompok

marginal dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, juga perlu ada data dan informasi yang akurat mengenai penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, kelompok rentan dan marginal, serta data mengenai sarana dan prasarana yang tersedia, terutama yang dapat digunakan dengan aman bagi disabilitas, lansia, anak-anak, dan ibu hamil.

Menurut Keputusan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 518 tahun 2024 Tentang Panduan Fasilitasi Desa Inklusif, ada 15 indikator desa inklusif, yaitu: (1) Tersedianya surat keputusan kepala desa terkait pembentukan kader desa inklusif; (2) Terdapat setidaknya sebesar 50% keterlibatan kelompok rentan dan marginal sebagai kader desa inklusif; (3) Terdapatnya forum diskusi pergalian usulan kegiatan desa inklusif; (4) Tersedianya dokumen usulan kegiatan desa; (5) Meningkatnya partisipasi kelompok marginal dan rentan setidaknya sebesar 50% dalam dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa; (6) Meningkatnya partisipasi kelompok marginal dan rentan setidaknya sebesar 30% dalam kegiatan publik di desa; (7) Terlaksananya kegiatan desa inklusif bagi kelompok perempuan; (8) Terlaksananya kegiatan desa inklusif bagi kelompok difabel; (9) Terlaksananya kegiatan desa inklusif bagi kelompok lansia; (10) Terlaksananya kegiatan desa inklusif bagi kelompok anak dan remaja; (11) Terlaksananya kegiatan desa inklusif bagi kelompok minoritas agama, kepercayaan dan adat tertentu; (12) Terlaksananya kegiatan desa inklusif bagi kelompok resiliensi dan kelompok lainnya (contoh: mantan napi, mantan ODDP/orang dengan disabilitas psikososial, masyarakat dalam rehabilitasi, dan

lain-lain); (13) Terlaksananya desa yang mendukung keberlanjutan program/kegiatan kelompok marginal dan rentan di desa; (14) Tersedianya dukungan penganggaran bagi keberlanjutan desa inklusif yang bersumber dari supra desa (pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat); (15) Tersedianya nota kesepahaman (MoU) dengan pihak ketiga (swasta, akademisi, organisasi nirlaba/LSM/NGO).

Pendapat pihak pemerhati dan aktivis mengenai desa inklusif layak juga untuk menjadi bahan masukan sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan menteri. Menurut Joni Yulianto (dalam Temu Inklusi 2024 di Yogyakarta) ada 9 indikator Desa Inklusi, yaitu: (1) Memiliki data dan informasi tentang aset desa yang komprehensif dan terus diperbarui, termasuk data difabel; (2) Ada wadah bagi warga difabel; (3) Ada jaminan keterlibatan dalam proses pengambilan kebijakan; (4) Adanya perencanaan anggaran yang mengarusutamakan inklusi difabel (proses, alokasi anggaran, realisasi dan evaluasinya); (5) Regulasi yang mendukung (peraturan desa); (6) Kesetaraan akses pada layanan umum di desa; (7) Keberadaan sarana fisik yang lebih aksesibel; (8) Adanya bentuk tanggungjawab sosial dari masyarakat; dan (9) Adanya ruang untuk berinovasi dan berjejaring.

Program INKLUSI-BaKTI di Tana Toraja yang dilaksanakan oleh YESMa juga mendorong terbentuknya lembang/desa inklusif. Ada 3 lembang di Tana Toraja yang didorong menjadi lembang inklusif, yaitu Lebang Lea, Limbong, dan Randan Batu. Tahapan yang dilakukan untuk mendorong lembang inklusif, sebagaimana yang

dilakukan YESMa, dimulai dengan melakukan pendataan terhadap penyandang disabilitas, lansia, perempuan miskin, kelompok rentan, dan marginal. Data itu penting untuk mengetahui keberadaan kelompok masyarakat yang selama ini kurang mendapat perhatian dan terabaikan dalam kebijakan pemerintah. Dengan adanya data penyandang disabilitas dan kelompok marginal serta kelompok rentan lainnya, maka akan sangat membantu meyakinkan pemerintah lembang dan para pihak lainnya bahwa masih ada masyarakat yang belum mendapat perhatian dan terabaikan dari para pembuat kebijakan.

Data itu juga menjadi bahan/referensi untuk mengadvokasi Peraturan Lembang/Desa (Perlem/Perdes) tentang Lembang Inklusif. Program INKLUSI memproses penyusunan Perdes pada ketiga lembang ini dan telah disahkan oleh pemerintah lembang setelah melalui proses pembahasan naskah akademik dan rancangan Perdes bersama Badan Permusyawaratan Lembang/Desa (BPL).

Pembentukan Perdes Lembang Inklusi diawali dengan diskusi dengan kepala lembang dan Ketua BPL di 15 lembang/kelurahan, pada acara penguatan kapasitas kelompok konstituen. Dalam diskusi itu, YESMa menyampaikan rencana mendorong pembentukan Peraturan Lembang tentang Lembang Inklusi untuk mendukung implementasi Peraturan Daerah Tana Toraja Nomor 5 tahun 2023 tentang Kabupaten Inklusi dan Pelindungan Penyandang disabilitas. Dari 15 lembang/kelurahan wilayah program di Tana Toraja ada 12 desa dan 3 kelurahan.

Dengan adanya Perlem Inklusi semakin banyak kesempatan untuk mendorong pelibatan masyarakat dalam proses penetapan kebijakan di lembang dengan melakukan komunikasi yang efektif dengan pemerintah lembang untuk menghadirkan kelompok rentan.

Tana Toraja yang memiliki Perlem lembang inklusif sehingga semakin besar pula harapan akan adanya lembang inklusif di Tana Toraja.

Sejak itu, YESMa mulai memproses penyusunan rancangan perlem dengan melakukan pendataan dan menghimpun informasi untuk menjadi bahan dalam naskah akademik perlem. Rancangan Perlem dan naskah akademik dibawa dalam pertemuan konsultasi publik di lembang. Kepala lembang mengundang BPL, perangkat lembang, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pimpinan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), penyandang disabilitas, lansia, kelompok rentan dan marginal. Tiga lembang melaksanakan Konsultasi Publik Raperlem dan naskah akademik. Banyak masukan yang diberikan oleh peserta untuk menjadi bahan untuk penyempurnaan Raperlem.

Dari 12 lembang itu, ada 3 kepala lembang yang menyambut baik dan antusias memiliki perlem itu dan bersedia memberi dukungan data dan informasi untuk penyusunan peraturan lembang. Dari ketiga kepala lembang itu adalah Lembang Randan Batu, Kecamatan Makale Selatan, Lembang Lea, Kecamatan Makale, dan Lembang Limbong, Kecamatan Rembon. Dukungan pemerintah lembang memberi harapan akan adanya lembang di

Setelah melengkapi berbagai masukan dalam konsultasi publik, tahap berikutnya adalah pemerintah lembang mengadakan pertemuan bersama BPL untuk menetapkan Raperlem Lembang Inklusif dan Ramah Anak menjadi Perlem Lembang Inklusif dan Ramah Anak.

Proses pembentukan peraturan di lembang menjadi pembelajaran demokrasi yang menarik dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pemerintah desa, BPL dan semua komponen masyarakat. Lagi pula dengan adanya Perlem Inklusi semakin banyak kesempatan untuk mendorong pelibatan masyarakat dalam proses penetapan kebijakan di lembang dengan melakukan komunikasi yang efektif dengan pemerintah lembang untuk menghadirkan para penyandang disabilitas, kelompok perempuan, lansia dan masyarakat miskin dalam Musrenbang tingkat lembang. Hal ini dapat juga dilakukan di kelurahan. Kehadiran penyandang disabilitas, kelompok perempuan, lansia dan masyarakat miskin tidak untuk sekadar datang di pertemuan, tetapi terutama memberi kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan pendapat, masukan, kebutuhan dan harapan mereka untuk dimasukkan dalam perencanaan pembangunan dan anggaran desa.

Program INKLUSI juga mendorong terbentuknya wadah organisasi tempat berhimpun para penyandang disabilitas untuk menyalurkan atau memperjuangkan aspirasi, wadah untuk meningkatkan kapasitas dan bahkan lebih dari itu menjadi perwakilan kelompok penyandang disabilitas dalam penetapan kebijakan di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi karena memang tidak semua

penyandang disabilitas dapat dihadirkan dalam pertemuan di kabupaten, provinsi dan di tingkat nasional.

Program INKLUSI di Tana Toraja, melalui YESMa telah memfasilitasi terbentuknya organisasi Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) di Tana Toraja, tetapi masih pada tingkat kabupaten, belum di lembang. Namun dengan lahirnya PPDI di kabupaten maka dapat diharapkan akan terbentuk juga di tingkat lembang/kelurahan bila terdapat cukup banyak penyandang disabilitas dan layak untuk membentuk organisasi.

Berkaitan dengan anggaran untuk mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas, YESMa telah mendorong termuatnya dalam APBDes anggaran untuk pembangunan fasilitas ramah disabilitas, terutama pada fasilitas bangunan pemerintah, misalnya: kantor lembang, posyandu, sekolah, poskedes dan fasilitas pemerintah lainnya. Bahkan juga anggaran untuk sosialisasi lembang ramah disabilitas. Harapannya semua ini dapat direalisasikan tahun 2025.

Catatan: Leimbang adalah sebutan desa di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara.



Pelatihan menjahit yang diadakan oleh pemerintah lembang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penjahit untuk menghasilkan jahitan yang berkualitas sehingga dapat bersaing.

Mendukung Pengembangan Usaha di Kelompok

Matias Tanan

Koordinator Program INKLUSI - YESMa Tana Toraja

Penyelenggaraan Pelayanan dan Dukungan Pendanaan

Tak dapat dipungkiri bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh kelompok konstituen membutuhkan biaya, apalagi bila terkait dengan kepentingan kebutuhan masyarakat. Kepentingan yang dimaksud adalah pelayanan bagi kelompok rentan dan marginal yang butuh pendampingan dalam mengakses layanan publik atau layanan pemerintah.

Kelompok konstituen tidak punya sumber dana yang tersedia untuk menyelenggarakan pelayanan, sehingga jika ada rujukan kasus yang akan ditangani maka mereka menggunakan uang pribadi. Tentunya hal seperti itu agak susah bila berlangsung terus-menerus, karena pendamping memiliki kebutuhan juga yang harus mereka biayai, terutama kebutuhan rumah tangga, biaya anak sekolah, dan kebutuhan lainnya yang mungkin sangat mendesak.

Agar supaya pelayanan pengaduan dan kasus rujukan dapat tetap berjalan maka perlu adanya dukungan, yang salah satunya adalah

adanya kelompok usaha ekonomi yang dikelola bersama, sehingga ada sumber pendapatan kelompok yang bisa membantu dalam permasalahan biaya pendampingan. Kelompok usaha ekonomi diharapkan dapat menjadi solusi dalam menciptakan kemandirian kelompok konstituen dalam menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat kelompok rentan dan marginal.

Upaya untuk mendukung terwujudnya pelayanan kelompok konstituen terhadap pengaduan masyarakat berjalan secara kontinu, maka Program INKLUSI-BaKTI di Tana Toraja, melalui YESMa, mendorong terbentuknya unit usaha ekonomi kelompok maupun individu di semua wilayah dampingan.

Asesmen dan Penguatan Kelompok Usaha

Langkah awal yang dilakukan untuk mendorong terbentuknya unit usaha ekonomi adalah melakukan asesmen di 15 lembang/desa/kelurahan untuk mendapatkan informasi tentang potensi dan peluang pengembangan usaha di masing-masing wilayah. Asesmen itu dilakukan dengan diskusi bersama pengurus kelompok dan anggota, terutama kelompok rentan dan marginal karena sasaran utama terbentuknya unit usaha adalah, kelompok rentan dan marginal mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Hasil asesmen menjadi bahan untuk menentukan calon unit usaha yang bisa didampingi untuk penguatannya.

Salah satu kelompok konstituen yang telah memiliki unit usaha kelompok adalah Kelompok Konstituen Sipakaboro', Lembang To'Pao dengan nama kelompok menjahit Beautiful To'pao. Kegiatan usahanya bergerak dalam bidang bisnis menjahit pakaian. Awalnya

YESMa ketika mulai mendorong dan mengembangkan kelompok usaha, tidak memulai dengan membentuk kelompok usaha yang baru, tetapi mendukung pengembangan kelompok usaha yang ada.

kelompok ini menjahit pakaian perempuan, baik pakaian seragam, pesta adat, maupun pakaian yang dipesan secara perorangan. Untuk pengembangan produk, kelompok menjahit Beautiful To'pao kini merambah ke produk pakaian laki – laki.

Kelompok ini beranggotakan perempuan kepala keluarga, perempuan miskin, dan beberapa orang pengurus kelompok konstituen. Pada awal berdirinya, kelompok ini menggunakan mesin jahit yang disediakan oleh pemerintah lembang sebanyak 7 unit, yang pengadaannya dari anggaran dana desa tahun 2023 sebesar 17 juta rupiah.

Mereka mendapat pelatihan dasar-dasar menjahit yang difasilitasi oleh pemerintah lembang, sampai benar-benar terampil. Dengan modal keterampilan dan mesin jahit milik lembang mereka menerima orderan. Hasilnya sebagian dipakai mencicil mesin jahit dan mereka memulai bekerja di rumah, namun tetap dalam ikatan kelompok yang saling mendukung, baik untuk penyelenggaraan pelayanan dalam penanganan kasus maupun saling berbagi pengetahuan dan informasi.

Pelatihan Ketrampilan Menjahit

Ketika program INKLUSI hadir di Lembang To'pao, berdasarkan permintaan sesuai kebutuhan kelompok, YESMa memfasilitasi

pelatihan menjahit pakaian laki-laki dengan mendatangkan pelatih/narasumber Yosef Tupa, seorang penjahit profesional dan berpengalaman menjadi pelatih di berbagai pelatihan menjahit. Pelatihan dilaksanakan pada bulan Desember 2024 bertempat di Sekretariat Kelompok Konstituen Pakaboro' To'pao.

Peserta pelatihan adalah warga Lembang To'pao yang berminat dan memiliki dasar-dasar menjahit, khususnya pakaian perempuan. Berdasarkan kesepakatan bersama bahwa mereka membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan menjahit pakaian laki-laki untuk meningkatkan jumlah pesanan dan pelanggan, khususnya dari laki-laki. Karena menurut mereka selama ini laki-laki menjahit pakaian di luar lembang/desa karena tidak ada penjahit pakaian laki-laki di dalam lembang.

Pelatihan ini diharapkan meningkatkan kapasitas penjahit Lembang To'pao, terutama dalam menjahit pakaian laki-laki, namun mereka juga meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan jahitan yang berkualitas sehingga dapat bersaing. Jika penjahit yang ada di Lembang To'pao telah mempunyai kemampuan menjahit pakaian laki-laki, dan hasil jahitan mereka lebih berkualitas, maka mereka tidak hanya mendapatkan pelanggan dari Lembang To'pao, tetapi juga di lembang sekitarnya.

Kini beberapa anggota kelompok menjahit Beautiful To'pao menerima pesanan menjahit celana panjang laki-laki, terutama saat menjelang Natal dan Tahun Baru. Mereka juga berbagi jahitan kepada sesama teman bila ada yang mendapat banyak pesanan, sehingga yang lain juga bisa mendapat orderan. Diharapkan dengan

kerja sama seperti itu, mereka dapat berkontribusi dalam membiayai pelayanan penanganan kasus, khususnya untuk biaya transpor pendampingan dalam melakukan rujukan kasus.

YESMa sebagai mitra BaKTI dalam Program INKLUSI di Tana Toraja, ketika mulai mendorong dan mengembangkan kelompok usaha, tidak memulai dengan membentuk kelompok usaha yang baru, tetapi mendukung pengembangan kelompok usaha yang ada, salah satunya Kelompok Penjahit Beautyful To'pao tersebut. Cara ini ditempuh YESMa, karena membentuk sesuatu yang baru, apalagi harus memulai dari awal, selain tidak mudah, kelompok konstituen juga bukanlah orang-orang yang hanya fokus pada kelompok saja, tetapi mempunyai aktivitas lain. Pengurus kelompok konstituen adalah petani, ibu rumah tangga, pengurus gereja, guru, perempuan kepala keluarga, dan sebagainya.

Pengurus kelompok konstituen adalah orang-orang yang peduli dan menyediakan waktunya untuk membantu mereka yang membutuhkan dukungan dan pendampingan. Karena itu, berdasarkan pengalaman selama ini, YESMa menggunakan pendekatan-pendekatan yang memungkinkan untuk didukung dan berkembang di dalam masyarakat, tidak memaksakan hal-hal baru yang dianggap ideal, tetapi kemudian tidak berkembang di dalam kelompok konstituen.



UPTD PPA Tana Toraja dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, yang sering disebut sebagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/KtA) sudah menggunakan SOP standar sesuai yang ditentukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

Mengenal UPTD PPA Tana Toraja

Matias Tanan & Lenynda Tondok

Koordinator Program dan Program Officer INKLUSI - YESMa Tana Toraja

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Tana Toraja telah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

Terbentuknya UPTD PPA melalui proses dan waktu yang tidak terlalu lama. Demikian juga dengan kebijakan prosedur penanganan kasus atau *Standard Operating Procedure* (SOP) layanannya. Karena adanya komitmen dan kemauan dari pemerintah daerah, dalam hal ini DP3AP2KB dan mendapat dukungan dari DP3AP2KB Provinsi Sulawesi Selatan, serta Tim Program INKLUSI-BaKTI di Makassar dan YESMa di Tana Toraja. Dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, UPTD PPA mendapat dana Dana Alokasi Khusus

(DAK) dari pemerintah pusat sebesar 500 juta rupiah pada tahun 2024. Dana DAK untuk UPTD PPA Tana Toraja didapatkan atas dukungan DP3AP2KB Provinsi Sulawesi Selatan.

Saat ini UPTD PPA Tana Toraja dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, yang sering disebut sebagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/KtA) sudah menggunakan SOP standar sesuai yang ditentukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), dan ketersediaan anggaran yang cukup memadai untuk biaya operasional dan rujukan kasus.

Data kasus kekerasan diinput ke dalam sistem informasi secara *online* (SIMFONI) yang langsung terkoneksi ke KPPPA. Sebelumnya, pengisian data kasus hanya dilakukan oleh UPTD PPA, padahal sebenarnya pengisian data ke dalam SIMFONI dapat juga dilakukan oleh lembaga layanan lainnya, sekalipun lembaga non pemerintah, yang bergerak dalam bidang perlindungan perempuan dan anak yang berkolaborasi dengan pelayanan UPTD PPA.

Namun saat ini YESMa, sebagai lembaga layanan yang berkolaborasi dengan UPTD PPA dan telah mendapat kepercayaan dalam penanganan kasus tingkat pertama (menerima pengaduan langsung dari masyarakat dan melakukan rujukan ke UPTD PPA), sudah diberi akses untuk menginput data ke SIMFONI dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan UPTD PPA. Untuk menginput data, membutuhkan akun dan *password* dari UPTD PPA dan tidak sembarang orang diberikan. Hanya lembaga pemerintah terkait dan lembaga pelayanan non pemerintah yang sudah lama bekerja sama

dengan UPTD PPA dan telah dipercaya karena telah menunjukkan hasil kerja yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh UPTD PPA. YESMa telah mendapat kepercayaan itu dari UPTD PPA dan satu-satunya lembaga non pemerintah yang mendapat kepercayaan untuk menginput data ke SIMFONI.

Sampai Januari 2025, YESMa telah menginput data kasus KtP/KtA sebanyak 3 kasus KtA (2 kasus kekerasan seksual dan 1 kekerasan fisik) yang telah dirujuk ke UPTD PPA dan Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Tana Toraja. Ketiga kasus KtA itu diadakan oleh keluarga korban ke pendamping Layanan Berbasis Komunitas–Kelompok Konstituen (LBK-KK) lalu dikoordinasikan ke YESMa untuk mendapat pendampingan dari YESMa.

Selain sistem layanan penanganan kasus KtP/KtA yang sudah mulai berjalan dengan baik, namun ada juga permasalahan yang dihadapi oleh UPTD PPA yaitu pengisian jabatan lowong belum dilakukan, terutama pimpinan UPTD PPA. Masalah ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja lembaga, terutama dalam pengambilan keputusan dan solusi jika ada permasalahan yang dihadapi, baik dalam penanganan kasus maupun yang terkait dengan operasional pelayanan dan manajemen lembaga. Masalah kekosongan pejabat di UPTD PPA terungkap dalam diskusi bersama petugas pendamping korban kasus KtP/KtA. Permasalahan ini juga turut dirasakan oleh YESMa yang sering berkoordinasi dengan UPTD PPA. Semoga permasalahan ini dapat segera ada solusinya dan koordinasi dapat berjalan lebih baik lagi dan semakin efektif.

Dalam perkembangan selanjutnya, koordinasi YESMa dan UPTD PPA semakin intens dalam menyelenggarakan pelayanan kepada penanganan dan pendampingan Kasus KtP/KtA. Pengaduan kasus yang diterima oleh kelompok konstituen disampaikan ke YESMa selanjutnya dikoordinasikan dengan UPTD PPA dan dengan mengacu pada SOP layanannya, UPTD PPA menindaklanjuti pengaduan dari kelompok konstituen. Dalam proses penanganan kasus, YESMa senantiasa melakukan pendampingan dan penguatan terhadap korban dan berkoordinasi UPTD PPA. Dari pengalaman kerjasama itu, YESMa, UPTD PPA, dan DP3AP2KB memiliki hubungan yang semakin harmonis. Dalam beberapa kesempatan untuk penilaian kinerja, DP3AP2KB meminta dukungan dari YESMa dalam hal adanya kerja sama antara DP3AP2KB dengan lembaga layanan non pemerintah dan swasta.

Dalam pengalaman kerja sama itu, DP3AP2KB dengan YESMa, Kepala Bidang PPA DP3AP2KB, Emilia Sappetau menyampaikan "Program INKLUSI sangat besar dukungannya dalam pembentukan UPTD PPA, penyusunan SOP, sampai pada penyelenggaraan layanan yang dilakukan oleh UPTD PPA. Dari dukungan yang sangat nyata itu, tumbuh kesadaran kami bahwa Program INKLUSI, melalui BaKTI dan YESMa, sangat dipercaya dalam membangun kerja sama untuk kinerja OPD yang lebih baik".

Dalam penyelenggaraan pelayanannya, UPTD PPA mendapat tanggapan yang cukup baik dari Yuspina Boroan, salah satu pendamping LBK-KK Sangkaran dari Lembang Kolesawangan, yang mendampingi kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Berikut komentar Yuspina Boroan terhadap layanan UPTD

PPA ketika mendampingi kasus KtP/KtA di UPTD PPA: "Kasus rujukan ke UPTD PPA yang saya dampingi adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Awalnya saya ragu apakah saya dapat melakukan tugas ini karena dalam pikiran saya akan ada konsekuensi kalau saya pergi melapor, namun setelah berkoordinasi dengan YESMa, yaitu dengan Ibu Yurni Somalinggi', saya mendapat kesan bahwa ternyata tidak rumit dan tidak susah untuk melakukan pendampingan korban, karena di UPTD PPA kami mendapat penjelasan bahwa kasus ini akan ditangani dengan prosedur standar dan akan mendapat pendampingan dari UPTD PPA. Kami pendamping dari lembang cukup datang melapor, bisa datang bersama korban atau korban tidak usah diikuti karena UPTD PPA yang akan mendatangi korban. Mulai dari situ pikiran saya terbuka bahwa ternyata UPTD PPA memiliki standar pelayanan yang tidak menyusahkan pelapor, apalagi korban".



YESMa memfasilitasi penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara UKI Toraja dengan Komisi Nasional Disabilitas. Tindak lanjut untuk implementasi dari kerja sama ini, YESMa melakukan berbagai kegiatan dengan UKI Toraja untuk bersama mengawal terbentuknya Prodi PLB di UKI Toraja dengan mendapat dukungan dari Komisi Nasional Disabilitas.

Kerja Sama untuk Pembukaan Program Studi PLB

Matias Tanan & Lenynda Tondok

Koordinator Program dan Program Officer INKLUSI - YESMa Tana Toraja

Membangun Kabupaten Tana Toraja yang inklusif tidak hanya mendorong pemerintah daerah yang melakukan, tetapi semua pihak, termasuk lembaga pendidikan tinggi yang diharapkan dapat mempercepat proses inklusi tas di masyarakat. Perguruan tinggi memiliki peran yang besar untuk menciptakan masyarakat yang inklusif. Peran perguruan tinggi dalam hal ini bagaimana menghasilkan guru untuk pendidikan luar biasa (PLB) - pendidikan khusus yang juga dapat menerima siswa berkebutuhan khusus, tanpa memisahkan mereka dari siswa lainnya.

Sudah ada aturan yang berkaitan dengan penerimaan calon siswa penyandang disabilitas yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009, yang mengatur pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus (ABK). Permendiknas juga mengatur agar sekolah wajib menyediakan fasilitas tambahan untuk ABK, seperti guru pendamping. Guru pendamping sangat penting, karena penanganan ABK harus dilakukan oleh guru-guru yang terlatih.

Data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tana Toraja bahwa beberapa sekolah telah memiliki siswa berkebutuhan khusus, namun belum memiliki guru yang dapat melayani siswa berkebutuhan khusus. Memang sudah ada guru yang sudah mengikuti pelatihan mengajar untuk menangani siswa berkebutuhan khusus, namun belum cukup optimal dalam menjalankan tugasnya. Karena itu dibutuhkan guru lulusan program studi (prodi) pendidikan luar biasa untuk memenuhi kebutuhan sekolah inklusi. Guru Pendidikan Luar Biasa (PLB) membutuhkan berbagai keahlian dan pengetahuan untuk dapat mendampingi ABK.

Program INKLUSI-BaKTI melalui YESMa sebagai sub mitra di Tana Toraja mengadvokasi Prodi PLB untuk penyediaan tenaga guru pada sekolah inklusif. Advokasi dilakukan pada Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja yang memiliki program studi (prodi) pendidikan dan telah menghasilkan lulusan yang tersebar ke berbagai daerah menjadi guru di berbagai sekolah.

Proses yang dilakukan pertama-tama adalah dengan pendekatan kelembagaan yaitu melakukan audiensi kepada pimpinan atau Rektor UKI Toraja untuk menyampaikan tentang Program INKLUSI-BaKTI yang dijalankan oleh YESMa di Tana Toraja. YESMa memberikan gambaran umum program, apa tujuan yang hendak dicapai oleh program, bagaimana melakukan dan siapa saja *stakeholder* dalam program ini INKLUSI, dan juga menyampaikan tentang adanya dukungan dari lembaga nasional, dalam hal ini Komisi Nasional Disabilitas (KND), terhadap upaya untuk mendorong dibukanya Prodi PLB pada perguruan tinggi yang ada di Tana Toraja.

Dalam proses selanjutnya dilakukan pertemuan-pertemuan dalam bentuk mentoring yang diisi dengan diskusi yang terfokus membangun kerjasama dalam pengembangan tri dharma, dan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi, yang hasilnya diharapkan bersama adanya Nota Kesepahaman (MoU) YESMa dengan UKI Toraja. YESMa diminta untuk memfasilitasi lahirnya Nota Kesepahaman UKI Toraja dengan Komisi Nasional Disabilitas (KND). Konsep Nota Kesepahaman YESMa dengan UKI Toraja disusun bersama. Harapan itu terwujud setelah YESMa yang diwakili oleh Direktornya Welem Salasa dan UKI Toraja yang diwakili oleh Rektor Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran telah menandatangani Nota Kesepahaman.

Dalam sambutannya pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman, Rektor UKI Toraja menyampaikan, "Saat ini UKI Toraja sedang mencari terobosan baru untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja, terutama bagaimana menarik minat calon siswa dari berbagai daerah, dan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, khususnya Pendidikan Luar Biasa, adalah salah satu jurusan pendidikan yang baru ada di Universitas Negeri Makassar (UNM). Kami berterima kasih kepada YESMa sebagai pelaksana Program INKLUSI-BaKTI di Tana Toraja, yang didukung oleh mitra utamanya yaitu Yayasan BaKTI di Makassar, yang mendorong adanya Prodi PLB di UKI Toraja. Kami juga berharap Program INKLUSI dari BaKTI dapat memfasilitasi UKI Toraja untuk pertemuan dengan KND dalam rangka mendapat dukungan untuk rencana itu".

Dalam memfasilitasi Nota Kesepahaman UKI Toraja dengan KND, YESMa melakukan koordinasi dengan BaKTI. Dan selanjutnya BaKTI melakukan komunikasi dan koordinasi dengan KND. Informasi dari BaKTI disampaikan kepada Rektor UKI Toraja.

Tindak lanjut untuk implementasi dari kerja sama dengan UKI Toraja, YESMa melakukan berbagai kegiatan dengan UKI Toraja untuk bersama mengawal terbentuknya Prodi PLB di UKI Toraja dengan mendapat dukungan dari Komisi Nasional Disabilitas.

Program INKLUSI telah memfasilitasi pertemuan UKI Toraja dengan Komisioner KND Jonna Aman Damanik. Dalam sambutan pertemuan dengan Rektor UKI Toraja, yang dihadiri oleh para wakil rektor dan sekretaris rektor, Komisioner KND Jonna Aman Damanik menyampaikan bahwa KND sangat mendukung terbentuknya prodi pendidikan khusus perguruan tinggi, khususnya di UKI Toraja, dan akan melakukan upaya untuk mewujudkan hal itu karena sudah ada pengalaman KND mendorong terbentuknya prodi pendidikan khusus di beberapa perguruan tinggi. Saat ini, UNM di Makassar yang merupakan satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia Timur yang memiliki prodi itu, karena itu UKI Toraja tentunya memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan calon mahasiswa yang berminat menjadi guru untuk pendidikan luar biasa yang tidak tertampung di UNM. Pengalaman KND dalam membuka Prodi PLB sudah cukup banyak, sehingga tentunya akan lebih mudah dan lebih cepat mengurusnya. Itulah advokasi yang dilakukan KND untuk membuka ruang dan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam mewujudkan

harapan akan keadilan dalam bidang pendidikan untuk menuju kesejahteraan mereka dan keluarganya nantinya.

Semoga harapan akan terbentuknya Prodi PLB dapat segera terwujud, supaya sekolah-sekolah yang ada, semuanya dapat menerima anak didik yang didaftarkan tanpa kecuali, termasuk anak berkebutuhan khusus.

“

Tidak ada kebijakan berperspektif gender
tanpa kehadiran perempuan di politik.
Tiada kesetaraan gender tanpa
kesungguhan semua pihak mendukung
perempuan Indonesia untuk maju.
Demokrasi pincang tanpa kehadiran
perempuan sebagai penentu.

GKR Hemas

Senator dari D.I. Yogyakarta

A blue-tinted photograph of a large 3D sign on a hillside. The sign reads "ambon city of music" in a lowercase, sans-serif font. The letters are white and three-dimensional, standing on a stone base. The hillside is covered in dry, cracked earth. In the background, there are trees and a utility pole with wires. The sky is blue with some white clouds.

ambon city of music

KOTA AMBON, |
MALUKU |



Megawanto Renwarin, seorang difabel intelektual yang difasilitasi oleh Lembaga Rumah Generasi untuk melakukan magang di swalayan Sinar Alfa.

Magang, Membuka Akses Kerja untuk Disabilitas

Yunita Luhulima

Asisten Program INKLUSI - Rumah Generasi Ambon

Berbeda dengan anak nondisabilitas, anak dengan disabilitas di Kota Ambon belum memiliki kesempatan yang luas untuk mengikuti magang, khususnya di Tingkat Sekolah Menengah Atas. Karena itu, upaya-upaya untuk magang bagi anak dengan disabilitas di Kota Ambon didorong oleh Lembaga Rumah Generasi (LRG), termasuk melalui Program INKLUSI-BaKTI, di mana LRG sebagai salah satu mitra BaKTI.

Melalui pertemuan dan diskusi dengan bersama dinas-dinas di Kota Ambon, yang berkerja sama dengan LRG, termasuk *stakeholder* yang dilibatkan dalam kegiatan dan agenda diskusi LRG untuk menghubungkan orang dengan disabilitas pada dinas dan *stakeholder*. Proses ini tidak dilalui dengan mudah, namun mendapat respon yang baik. Pertemuan serta diskusi-diskusi bersama stakeholders sudah terbangun sejak tahun 2023.

Dalam upaya ini swalayan Sinar Alfa memberikan kesempatan magang bagi anak disabilitas atas nama Megawanto Renwarin,

seorang disabilitas intelektual untuk melakukan magang selama 1 bulan. Proses magang ini diharapkan dapat menyiapkan anak dengan disabilitas yaitu Mega—nama panggilan Megawanto Renwarin—untuk memasuki dunia kerja, dan tidak merasa minder atau malu dengan keadaan dirinya, dan bagaimana Mega dapat bersosialisasi di lingkungan tempat kerjanya, dimana setiap hari akan melihat banyak orang dan akan bertemu dengan banyak orang, yakni pembeli serta rekan-rekan kerja.

Kesempatan ini awalnya menjadi tantangan bagi Mega, karena minder dengan kekurangannya. Akan tetapi setelah LRG tetap memberikan support bagi Mega, sehingga setelah 3 hari pertama Mega magang/bekerja, dia tidak menjadi minder tapi percaya diri, bahwa dia bisa dalam melakukan pekerjaannya dengan baik. Mega bertugas di swalayan Sinar Alfa untuk mengatur barang jualan sesuai dengan tempatnya. Dan dalam seluruh proses ini Mega dapat melakukannya dengan baik, dan masih dijalankan sampai saat ini.

Pimpinan dan seluruh karyawan swalayan Sinar Alfa memiliki perspektif yang baik terkait dengan disabilitas sehingga mereka tidak lagi mengucilkan atau memberikan pandangan yang tidak baik bagi Mega. Mereka memberikan dukungan bagi Mega dengan cara merangkul dan mengajak Mega setiap kali waktu siang, sehingga Mega tidak merasa dikucilkan atau dijauhi karena kekurangannya namun merasa diterima.

Hal yang sama juga diterima oleh Josias Atajalim seorang disabilitas intelektual Sekolah Luar Biasa (SLB) ABCD Leleani 2 yang telah lulus dan melakukan magang pada sebuah usaha, UD Ronawiska,

yang bergerak di bidang jasa sewa tenda, meja, kursi, dekorasi, dan pengadaan barang keperluan lainnya. Di mana Josias diberikan kepercayaan untuk menjaga salah satu wilayah usaha yang berada di Negeri Latuhalat, untuk acara-acara besar seperti pernikahan dan acara lainnya. Tempat kerja yang dekat dengan rumah memberikan kesempatan kerja yang baik bagi Josias, karenanya proses magang itu selanjutnya terus berjalan dan saat ini Josias telah diterima berkerja di Ronawiska.

Josias kemudian mulai dikenalkan dengan pekerjaan lain yaitu pemasangan tenda pada daerah Kota Ambon dan tidak hanya pada Negeri Latuhalat, sehingga Josias dapat bertemu dengan banyak orang dan bersosialisasi. Dalam diskusi bersama Ibu Yen yang adalah pemilik Ronawiska, dia menyampaikan bahwa sangat senang karena Josias dapat berkerja dengan sangat baik dan dengan tanggung jawab yang diberikan kepada dirinya untuk menjaga wilayah usaha serta membersihkan lingkungan dan memastikan lampu-lampu pada daerah Ronawiska Latuhalat akan menyala dan padam sesuai dengan jamnya.

Selain itu Ibu Yen juga menyampaikan bahwa Ronawiskan mendukung Josias, karena sebelum Josias berkerja pada Ronawiska, Josias memiliki usaha kecil yaitu menjual minyak tanah, dimana seluruh proses pengurusan izin minyak tanah adalah kerja sama LRG bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ambon, dan minyak tanahnya sendiri merupakan bantuan dari LRG. Dan proses jualan itu masih berjalan bersamaan dengan kerjanya saat ini, karena itu ibu Yen dan seluruh karyawan Ronawiska yang memiliki kendaraan motor diwajibkan untuk membeli minyak tanah dari

Josias, proses membelinya adalah dengan menitipkan Jerigen minyak tanah dari Ronawiska pada mobil drop barang dari Ronawiska pusat ke tempat acara Negeri Latuhalat. Hal ini membuat minyak tanah yang di jual oleh Josias cepat habis, sehingga Josias dapat melakukan orderan untuk pengisian berikutnya. Kesempatan ini disambut dengan kebahagiaan, di mana LRG dapat mendorong anak dengan disabilitas untuk memiliki usaha dan mendorong untuk dapat berkerja dengan menjadi penghubung bagi mereka.

Kesempatan magang juga diberikan bagi Marco Thenu anak dengan disabilitas, dengan ragam disabilitas sensorik bisu tuli. Marco berasal dari SLB Negeri Kota Ambon dan tinggal di Negeri Passo, yang merupakan negeri dampingan Program INKLUSI. Marco baru saja lulus untuk magang di Kantor LRG. Dalam proses magang ini Marco dilibatkan dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh LRG, baik di desa/negeri lewat kegiatan Program INKLUSI maupun kegiatan lainnya. Hal ini dilakukan agar Marco dapat bersosiliasi dengan orang lain dan dalam jumlah banyak dan bersama banyak pihak. Marco menjadi sebuah cerita bagi LRG bahwa kita dapat memberikan kesempatan bagi orang dengan disabilitas untuk berkerja atau bahkan magang dan dimulai dari kita terlebih dahulu yaitu LRG.

Contoh ini disampaikan dalam pertemuan bersama dinas-dinas yang kemudian diharapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Ambon dapat melakukan hal yang sama, dengan memberikan kesempatan kepada disabilitas untuk berkerja atau paling tidak memberikan mereka kesempatan untuk magang. Kami percaya bahwa dengan kesempatan magang yang diberikan dinas atau

bahkan *stakeholder*, maka mereka dapat belajar secara langsung layanan apa saja yang tepat untuk diberikan bagi orang dengan disabilitas, serta bagaimana setiap dinas atau bahkan stakeholder dapat memastikan semua layanan orang dengan disabilitas yang akan disediakan, dan telah sesuai dengan kebutuhan orang dengan disabilitas.

Berdasarkan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon yang saat ini dikepalai oleh Bapak Vedy Kuncoro, bulan Agustus 2025 nanti anak dengan disabilitas akan magang di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon. Hal ini selaras dengan kebutuhan Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon telah memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan. Diperlukan anak dengan disabilitas dapat magang di sana, sehingga Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon dapat memastikan seluruh layanan bagi orang dengan disabilitas dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan mereka.



Dengan data yang dimiliki oleh Pokja Inklusi Manggurebe Maju, Negeri Passo, mereka berhasil mengadvokasi Dinas Sosial Kota Ambon guna membantu warganya yang memiliki anak dengan disabilitas fisik (lumpuh) untuk mendapatkan bantuan kursi roda.

Kerja Kecil yang Membuat Orang Tersenyum

Fianty Fristianty

Asisten Program INKLUSI - Rumah Generasi Ambon

Advokasi adalah upaya untuk membela atau memperjuangkan satu tujuan atau kepentingan tertentu. Advokasi memiliki peran penting dalam kerja-kerja sosial yang dilakukan. Salah satunya adalah advokasi terhadap kelompok rentan dan marginal. Advokasi terhadap kelompok rentan dan marginal adalah upaya untuk memperjuangkan hak-hak kelompok tersebut dalam artian kelompok rentan dan marginal juga memiliki hak yang sama. Hak kelompok rentan dan marginal meliputi hak atas pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.

Program INKLUSI (Kemitraan Australia Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif) melalui Yayasan BaKTI dan Rumah Generasi sebagai mitranya di Kota Ambon, mendorong perubahan dari sisi perspektif dan perubahan keputusan level desa/negeri, maupun pada Pemerintah Kota Ambon. Tujuan dari Program INKLUSI adalah menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan

lainnya, meningkatkan ketersediaan akses layanan dasar yang inklusif, menguatkan kolaborasi multipihak untuk melindungi dan memastikan pemenuhan hak-hak kelompok rentan dan marginal, menghapuskan diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok rentan. Pihak yang mendapatkan manfaat dari program ini adalah penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga, perempuan dan anak korban kekerasan, serta kelompok rentan dan marginal lainnya.

Pembentukan Kelompok kerja (Pokja) Inklusi di 15 desa/negeri memperkuat hal yang ingin diterapkan. Selain mendampingi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan marginal. Pokja Inklusi juga berperan aktif dalam advokasi ke basis desa/negeri maupun ke Pemerintah Kota Ambon.

Pokja Inklusi Manggurebe Maju, Negeri Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon adalah salah satu Pokja yang melakukan advokasi terhadap hak kelompok rentan dan marginal. Awalnya dengan melakukan pendataan kelompok rentan dan marginal. Pendataan merupakan salah satu kegiatan Pokja Inklusi, yang juga merupakan Program INKLUSI-BaKTI, untuk mengetahui jumlah kelompok rentan dan marginal, serta bagaimana kondisi mereka terkait dengan akses pada layanan sosial pemerintah.

Dengan data yang dimiliki tersebut, Pokja Inklusi Manggurebe Maju kemudian menggunakannya untuk mengadvokasi ke Pemerintah Negeri Passo maupun instansi terkait. Karena Pokja tidak sekadar

berbicara, tetapi juga memiliki data yang diperoleh langsung dari lapangan.

Tidak mudah melakukan kerja advokasi, butuh strategi dan energi. Membangun jaringan dengan pemangku kepentingan menjadi hal yang perlu dijaga. Bekerja berdasarkan fakta dan bukti menjadi hal yang esensial yang tetap dilakukan oleh Pokja Inklusi. Untuk itu data menjadi hal yang penting untuk menguatkan peran advokasi dari Pokja Inklusi, dan menjawab kebutuhan kelompok rentan dan marginal.

Pokja Inklusi Manggurebe Maju Negeri Passo mempunyai pengalaman dalam mengadvokasi dengan menggunakan data. Dengan data yang dimiliki dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Pokja, terdapat 2 orang anak disabilitas fisik (lumpuh) dengan kondisi keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Hal ini menjadi kegelisahan bagi Pokja Inklusi Manggurebe Maju untuk melakukan advokasi ke Dinas Sosial Kota Ambon.

Melalui tahap kunjungan ke rumah 2 orang anak dengan disabilitas fisik yang bernama Paulus Loupaty dan Poli Stevanus, untuk melihat kondisi dan kebutuhan anak, dan didapati adalah kedua anak disabilitas ini membutuhkan kursi roda, karena kalau mau kemana-mana harus dibopong oleh orang tua anak tersebut.

Selain itu Pokja Inklusi juga mendampingi Paulus dan Poli untuk belajar sambil bermain. Kedua anak ini tidak bersekolah karena kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi memiliki keinginan untuk bersekolah yang tinggi, terbukti ketika diajak belajar mereka bisa

mengenal huruf abjad dengan baik meskipun selama ini hanya belajar di rumah.

Dari data dan hasil kunjungan tersebut, Pokja Inklusi Manggurebe Maju langsung melakukan advokasi ke Dinas Sosial Kota Ambon dengan memasukan data anak dan kelengkapan dokumen. Dinas Sosial Kota Ambon meresponi dengan baik dan melalui proses identifikasi data dan kelengkapan, kedua anak tersebut mendapatkan dua buah kursi roda dari Dinas Sosial Kota Ambon. Dua kursi roda tersebut diantar langsung oleh Dinas Sosial Kota Ambon, didampingi oleh Pokja Inklusi Manggurebe Maju dan Pemerintah Negeri Passo.

Senyum terpancar dari wajah kedua anak tersebut dan juga dari keluarganya. Pokja Inkusi Manggurebe Maju merasakan harus lebih semangat mengerjakan advokasi untuk memberikan senyuman dan secercah harapan bagi orang-orang yang selama ini sulit mendapatkan akses dan layanan.

Hal ini tidak terlepas dari dukungan banyak pihak seperti Pemerintah Negeri Passo maupun Pemerintah Kota Ambon lewat Dinas Sosial Kota Ambon. Ini hanya kerja-kerja kecil yang akan berdampak dan memberikan kehidupan bagi penerima manfaat. Semoga perlahan-lahan dimulai dari desa/negeri di Kota Ambon lewat kerja Pokja Inklusi dapat memberikan perubahan yang berkelanjutan sampai Kota Ambon menjadi kota yang inklusif.

Salah satu anak disabilitas fisik penerima manfaat bernama Poli mengungkapkan perasaan senangnya telah mendapatkan kursi

roda. "Mama tidak perlu menggendong saya lagi, saya bisa belajar di rumah dengan menggunakan kursi roda ini" ungkap Poli.

Ibu Fien Manoppo sebagai Ketua Pokja Inklusi Manggurebe Maju-Negeri Passo, merasa hidupnya bermanfaat bagi orang lain. "Lewat data yang kita miliki kita bisa bersuara dan mengadvokasi bahwa memang masih banyak orang dengan disabilitas yang membutuhkan bantuan, setidaknya kita bisa membuka akses dan memberikan kemudahan. Semoga kerja kita ke depan memberikan dampak yang bagi orang dan melihat perubahan di negeri tempat kita makan dan hidup" ungkapnya.



Dokter penyakit kulit RS. Umarella, Negeri Tulehu, dr. Valentine Hursepuny, SPKK menjelaskan kepada peserta kegiatan bahwa penyakit kusta dapat disembuhkan. kegiatan ini merupakan hal yang penting untuk menurunkan dan menghapus stigma warga terhadap mereka yang mengidap penyakit kusta dan penyakit menular lainnya.

Menghapus Stigma terhadap Orang dengan Kusta

Fianty Fristianty & M. Ghufan H. Kordi K.

Asisten Program INKLUSI - Rumah Generasi Ambon &
Program & Publication Officer INKLUSI - BaKTI

Penyakit kusta adalah penyakit yang menular kronis yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium leprae*, karena itu penyakitnya disebut penyakit lepra. Penyakit ini menyerang kulit, saraf tepi, dan jaringan tubuh lainnya. Indonesia merupakan negara ketiga di dunia dengan jumlah kasus kusta terbanyak, setelah India dan Brasil yang menempati posisi pertama dan kedua. Jumlah kasus kusta di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 14.376 kasus. Sedangkan India dan Brasil masing-masing sebanyak 107.851 kasus dan 22.773 kasus.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia melaporkan, prevalensi kasus kusta di Indonesia sebesar 0,55 per 10.000 penduduk pada 2022. Artinya ada kenaikan dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 0,5 per 10.000 penduduk. Hal itu seiring adanya 15.052 kasus kusta yang terdaftar pada 2022. Sedangkan, pada 12.095 kasus kusta baru yang ditemukan di dalam negeri sepanjang tahun 2021. Tahun 2023 jumlah kasus baru



Penyakit kusta adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, karena itu menular. Karena disebabkan oleh bakteri, maka penyakit kusta dapat disembuhkan”.

dr. Valentine Hursepuny, SPKK

Dokter penyakit kulit RS. Umarella, Negeri Tulehu

mencapai 14.376. Adapun, proporsi kasus kusta tanpa catat di Indonesia sebanyak 82,87%. Proporsi pasien kusta yang mengalami cacat tingkat dua sebesar 6,37%. Sementara itu, proporsi kasus kusta yang diderita anak di Indonesia sebanyak 9,89% pada 2022.

Data Kemenkes menunjukkan, Papua Barat menjadi provinsi dengan prevalensi kusta tertinggi di Indonesia, yakni 9,89 per 10.000 penduduk. Posisi Papua Barat itu diikuti oleh Maluku Utara dengan prevalensi kusta sebesar 5,32 per 10.000 penduduk. Prevalensi kusta di Papua tercatat sebesar 4,18 per 10.000 penduduk. Kemudian, prevalensi kusta per 10.000 penduduk di Maluku dan Sulawesi Utara masing-masing sebesar 2,08 dan 1,94. Sementara itu, Sumatra Barat menjadi wilayah dengan prevalensi kusta paling sedikit, yakni 0,1 per 10.000 penduduk. Di atasnya ada Sumatra Utara dan Jambi dengan prevalensi kusta sama-sama sebesar 0,11 per 10.000 penduduk (<https://indonesia.go.id/>, diakses 14 Februari 2025).

Penyakit kusta dipercaya sebagai penyakit kutukan dan sering dihubungkan dengan dosa, hukuman, dan karma. Pemahaman ini juga dimiliki oleh orang-orang di Kota Ambon dan sekitarnya. Hal ini menyebabkan orang yang mengalami kusta sering didiskriminasi dan

dikucilkan dari pergaulan dan lingkungan sosial. Mereka juga mengalami stigma atau cap sebagai orang-orang dikutuk.

Stigma dan diskriminasi menyebabkan mereka yang mengidap penyakit kusta mengalami eksklusi dan marginalisasi. Mereka kesulitan mendapatkan layanan sosial pemerintah maupun non pemerintah, karena eksklusi tersebut. Mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh lapangan kerja, karena pengusaha atau pemberi kerja tidak mau merekrut dan mempekerjakan penderita kusta atau Orang Yang Pernah Mengalami Kusta (OYPMK). Mereka juga sulit mengembangkan usaha secara mandiri karena kesulitan memperoleh dukungan dana, pelatihan, maupun pemasaran.

Tingginya stigma masyarakat terhadap mereka yang menyandang penyakit kusta, menjadi perhatian bagi Pokja (Kelompok kerja) Inklusi Ina Ama. Pokja Inklusi Ina Ama merasa perlu memberikan edukasi pada masyarakat mengenai penyakit kusta. Perspektif yang perlu diluruskan adalah kusta bukan penyakit turunan ataupun kutukan tapi kusta adalah penyakit menular yang dapat disembuhkan.

Stigma dan diskriminasi di masyarakat kepada penderita kusta berpengaruh terhadap pengobatan kusta. Adanya pandangan negatif terhadap penderita kusta membuat seseorang yang terkena kusta enggan untuk berobat karena takut diketahui dan dijauhi masyarakat. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari perlakukan diskriminasi juga terjadi seperti saat mencari pekerjaan, beribadah, menggunakan kendaraan umum, dan lain lain.

Tak jarang perlakuan negatif tersebut membuat penderita kusta mengalami tekanan psikis. Pokja Inklusi Ina Ama, Desa Hunuth, Kecamatan Teluk Ambon, dalam mendampingi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan perlindungan sosial merasa penting untuk melakukan edukasi ke masyarakat Desa Hunuth, karena penyandang kusta juga merupakan kelompok yang rentan dan marginal, yang selama ini dikucilkan dan mengalami diskriminasi.

Pokja Inklusi Ina Ama bekerja sama dengan Pemerintah Desa Hunuth, pada 16 Agustus 2024, melakukan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Pokja Inklusi terkait dengan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TBC, Kusta, & HIV AIDS). Mereka yang hadir di kegiatan ini sebanyak 45 orang terdiri dari penyandang disabilitas, orang yang pernah mengalami kusta (OYPMK), perempuan kepala keluarga, dan lanjut usia (lansia). Dengan menghadirkan narasumber dr. Valentine Hursepuny, SPKK, dokter penyakit kulit dari Rumah Sakit Umarella, Negeri Tulehu, Ambon, dan narasumber kedua dari Rumah Generasi.

Dokter penyakit kulit menjelaskan berbagai jenis penyakit menular dan cara untuk mencegah dan pengobatannya. Dokter menjelaskan bahwa penyakit kusta adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, karena itu menular. Karena disebabkan oleh bakteri, maka penyakit kusta dapat disembuhkan.

Sementara Sofia Siahaya dari Rumah Generasi menjelaskan penanganan korban kekerasan dan perlindungan sosial. Sofia menjelaskan mekanisme penanganan kasus kekerasan terhadap

perempuan dan anak, dan bagaimana etika berinteraksi dengan disabilitas ketika ada kasus. Hal ini mendapat respon yang positif, karena ada beberapa peserta yang mengaku selama ini tidak dapat berbicara saat mengalami korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena malu. Kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di dalam rumah tangga dianggap sebagai aib, sehingga tidak perlu dibuka atau dilaporkan.

Sofia juga menjelaskan apa yang harus dilakukan, jika ada warga yang datang ke Pokja Inklusi Ina Ama, dan mengadukan kasus kekerasan atau masalah perlindungan sosial. Pengurus Pokja Inklusi Ina Ama merespon dan menceritakan apa-apa yang telah mereka lakukan untuk membantu bila ada yang mengadu.

Pokja Inklusi Ina Ama, Desa Hunuth merasakan bahwa kegiatan seperti ini merupakan hal yang penting untuk menurunkan dan menghapus stigma warga terhadap mereka yang mengidap penyakit kusta dan penyakit menular lainnya, serta mendukung program pemerintah untuk mengeliminasi kusta, yaitu dukungan dan perhatian keluarga dan masyarakat terhadap penderita kusta dan penyakit menular lainnya.



Putri Pariwisata Kota Ambon memperlihatkan produk yang dihasilkan oleh UMKM dari kelompok usaha Pokja INKLUSI (Kelompok Konstituen) yang berasal dari desa dampingan Program INKLUSI di Kota Ambon.

Memfasilitasi dan Memperkuat Kelompok Usaha

Yunita Luhulima

Asisten Program INKLUSI - Rumah Generasi Ambon

Rumah Generasi sebagai mitra Yayasan BaKTI dalam Program INKLUSI, salah satu kegiatannya adalah membentuk dan memperkuat unit usaha. Unit usaha dimaksudkan meningkatkan pendapatan bagi kelompok rentan dan marginal, serta membuka lapangan kerja untuk kelompok-kelompok tersebut.

Rumah Generasi melakukan asesmen untuk mengetahui peluang-peluang usaha yang dapat didukung untuk pengembangannya. Beberapa kelompok usaha yang terbentuk di desa/negeri selama ini, sebagian sudah mendapatkan bantuan dana desa. Namun, kelompok usaha yang ada tidak mendapatkan pendampingan dan dukungan yang memadai, sehingga mereka tidak terhubung dengan lembaga-lembaga pendukung lain, seperti untuk pengurusan izin, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan sebagainya.

Melalui Program INKLUSI pendampingan kelompok usaha yang ada di desa/negeri dilakukan dengan lebih maksimal. Kelompok

Pendampingan kelompok usaha ini juga melatih kelompok-kelompok usaha untuk mengelola keuangan secara sistematis dan terstruktur sampai menghitung harga pokok penjualan, pencatatan tunai, pencatatan hutang dan piutang.

usaha juga dihubungkan dengan instansi/dinas terkait untuk pengembangan usaha. Rumah Generasi mengundang beberapa instansi dan dinas untuk menyampaikan berbagai persyaratan mengenai pendirian dan pengembangan usaha, di antaranya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ambon, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Ambon, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon, Otoritas Jasa Keuangan, serta beberapa bank yang ada di Kota Ambon.

Pendampingan dan penguatan kelompok usaha yang dilakukan terhadap 4 Kelompok usaha dari Pokja Inklusi Negeri Hukurila untuk jenis usaha perikanan, Desa Poka dengan usaha rajutan berupa tas, baju, kain. Negeri Rutong usaha berupa wine pala, tomitomi dan Negeri Batu Merah dengan produk Teh Herbal Fatimah, yang dikembangkan dengan menggunakan bahan-bahan herbal.

Keempat kelompok usaha yang didampingi Rumah Generasi terdiri dari kelompok Pokja inklusi, forum disabilitas, anak muda, dan juga penyandang disabilitas. Proses pendampingan ini ternyata berdampak lewat hadirnya Badan Usaha Milik Daerah dan *stakeholder* lainnya untuk mendukung usaha yang ada, di antaranya PT. Pos Indonesia.

Pada 22 Juli 2024 Rumah Generasi melakukan dengan pertemuan PT. Pos Indonesia Maluku. Pada pertemuan tersebut, PT. Pos Indonesia Maluku berkomitmen mendukung pengembangan usaha yang dilakukan oleh Rumah Generasi. Rumah Generasi mengkomunikasikan komitmen PT. Pos Indonesia Maluku kepada Pokja Inklusi, dan mereka menyambut dengan gembira.

PT. Pos Indonesia Maluku memfasilitasi pertemuan yang dilakukan pada 9 Agustus 2024. Semua kelompok usaha yang ada di 15 desa/negeri yang merupakan wilayah Program INKLUSI-BaKTI hadir dalam kegiatan, yaitu Galala, Passo, Nania, Hunut, Poka, Laha, Batu Merah, Latuhalat, Lata, Seilale, Amahusu, Kilang, Hukurila, Leahari, dan Rutong.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan kelompok usaha, Rumah Generasi, dan PT. Pos Indonesia Maluku. Pimpinan PT. Pos Indonesia Maluku sangat senang dimana dalam sambutannya mengawali kegiatan ini, menyampaikan bahwa kerja-kerja kolaborasi ini diharapkan dapat terus terjalin dan masyarakat khususnya kelompok usaha dapat merasakan manfaatnya. Dalam kegiatan ini PT. Pos Indonesia Maluku memberikan peningkatan kapasitas terkait dengan usaha-usaha yang sementara ini sedang dijalankan serta kemudahan-kemudahan yang dapat diakses sebagai mitra PT. Pos Indonesia Maluku, di antaranya proses pengiriman usaha antar kota, bahkan untuk provinsi akan mendapat diskon pengiriman dan juga gratis biaya pengiriman.

Hal ini membuat perwakilan kelompok usaha menjadi antusias untuk menjadi mitra PT. Pos Indonesia Maluku. Kelompok usaha

juga mendapatkan materi terkait agen PT. Pos Indonesia Maluku, dimana kelompok usaha dapat menjadi agen. PT. Pos Indonesia Maluku untuk menerima transaksi elektronik lewat aplikasi Pospay yang merupakan aplikasi resmi agen Pos Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aplikasi ini kemudian dapat menjadi sumber mata pencaharian bagi kelompok usaha, jika di kelompok usaha ingin melihat ini sebagai peluang, karena setiap hari terdapat berbagai macam transaksi keuangan dengan platform digital yang dilakukan setiap orangnya sehingga peluang ini menjadi sangat penting untuk diambil, dan diaplikasikan atau dibuat pada setiap tempat tinggal mereka. Dalam Kegiatan tersebut semua kelompok usaha dengan semangat menggebu ingin menjadi mitra PT. Pos Indonesia Maluku dan mendaftar agen Pospay. Selain itu pimpinan PT. Pos Indonesia Maluku juga berjanji akan memberikan reward bagi transaksi elektronik terbanyak dan reward itu berupa uang sebesar 1 juta rupiah.

Sebuah angin segar yang ditanggapi dengan semangat oleh Pokja inklusi ini menjadikan PT. Pos Indonesia Maluku dan Rumah Generasi semakin dekat. PT. Pos juga sangat berterima kasih akan kolaborasi bersama ini serta harapannya semua produk-produk usaha dari kelompok usaha dapat dibawa ke Kantor Pos Indonesia Maluku, untuk nantinya akan dipajang pada tempat produk PT. Pos Indonesia Maluku. Ini menjadi bagian promosi yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia Maluku untuk produk-produk kelompok usaha dampingan Rumah Generasi, dengan harapan produk-produk tersebut akan semakin dikenal dan diterima dengan baik oleh

masyarakat. Harapannya usaha-usaha ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya kelompok usaha.

Kelompok usaha yang telah menjadi mitra PT. Pos Indonesia Maluku telah menjadi agen Pospay di masyarakat dan mulai melayani transaksi keuangan. Seorang pengurus Pokja Inklusi dari Negeri Passo, Ibu Henny memberikan tanggapan bahwa ia senang menjadi agen Pospay karena ia dapat menambah penghasilan, dan memudahkan masyarakat di sekitar tempat tinggal untuk tidak lagi melakukan transaksi yang jauh dari tempat tinggal mereka.

Sementara menurut pengurus kelompok usaha Negeri Rutong, Once Parera, bahwa proses pendampingan ini membantu kelompok usaha untuk memiliki izin usaha, serta kolaborasi bersama dengan Bank Indonesia dalam proses pelatihan membuat kemasan yang menarik. Pendampingan kelompok usaha ini juga melatih kelompok-kelompok usaha untuk mengelola keuangan secara sistematis dan terstruktur sampai menghitung harga pokok penjualan, pencatatan tunai, pencatatan hutang dan piutang, sehingga pendampingan ini sangat bermanfaat bagi kelompok usaha.



Josias salah seorang penyandang disabilitas mental/grahita penerima bantuan pemberdayaan ekonomi untuk usaha penjualan minyak tanah dari Pemerintah Kota Ambon.

Pemberdayaan Ekonomi Bagi Disabilitas

Yunita Luhulima & M. Ghufan H. Kordi K.

Asisten Program INKLUSI - Rumah Generasi Ambon &
Program & Publication Officer INKLUSI - BaKTI

Josias adalah seorang anak disabilitas, dengan ragam disabilitas grahita atau disabilitas mental, yang duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) Kelas 3 pada Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Leleani 2. Josias tumbuh dan dibesarkan oleh oma (nenek) dan opa (kakek)-nya. Dalam kekurangan dan keterbatasannya, Josias tetap ingin untuk menghargai hidup yang dimilikinya. Josias merasa senang dapat belajar di SLB Leleani 2 bersama teman-teman, dan dikasihi oleh guru-guru SLB Negeri Leleani 2.

Dalam proses belajar di sekolah Josias aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan. Josias selalu bersemangat dalam mengikuti kegiatan, dia tidak mengeluh dalam mengikuti proses di sekolah. Menurut guru-gurunya, Josias termasuk siswa yang aktif, rajin, dan percaya diri. Dia juga mudah mengikuti proses-proses pembelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya.

Jika ada kegiatan di luar sekolah, Josias juga antusias untuk mengikutinya tanpa mengeluh. Karena itu, jika ada kegiatan-

kegiatan di luar sekolah, Josias termasuk salah satu siswa yang sering diikuti. Dengan melibatkannya pada kegiatan-kegiatan di luar sekolah, Josias makin percaya diri, termasuk ketika berinteraksi dengan orang lain. Ini menjadi hal positif tersendiri bagi Josias, sehingga dia mempunyai peluang untuk mengakses bantuan atau dukungan bagi peningkatan kapasitas.

Ketika Lembaga Rumah Generasi melakukan beberapa kegiatan peningkatan kapasitas, Josias menjadi salah satu peserta yang diikuti. Beberapa kegiatan yang diikuti oleh Josias antara lain, sosialisasi perilaku hidup sehat dan bersih, hak kesehatan seksual dan reproduksi, wisata edukasi ke Kantor Walikota dan Kantor DPRD Kota Ambon, serta beberapa kegiatan lain yang melibatkan penyandang disabilitas.

Josias adalah penyandang disabilitas yang belajar untuk percaya pada dirinya sendiri dan tidak merasa minder akan kekurangannya, serta menjadikan kekurangan sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan kepercayaan dirinya. Dengan motivasi tersebut dalam hasil asesmen bersama Rumah Generasi yang dilakukan, Josias menerima bantuan pemberdayaan ekonomi untuk usaha penjualan minyak tanah.

Josias mempunyai kemampuan untuk mengelola usaha, tentu dengan dukungan dari pihak-pihak yang ada di sekitarnya. Sebagai sebuah lembaga yang melakukan beberapa program, di mana penerima manfaatnya termasuk penyandang disabilitas, maka Rumah Generasi bersedia dan mempunyai waktu untuk mendampingi Josias dalam mengelola usaha.

Pemerintah Negeri Latuhalat merasa bahwa pemberian bantuan ini sangat berdampak secara langsung bagi anak-anak Negeri Latuhalat. Sehingga pemerintah negeri juga dapat memikirkan dukungan untuk pemberdayaan disabilitas melalui perencanaan menggunakan anggaran desa.

Pada tahap awal, Josias mulai berusaha dengan penjualan minyak tanah. Namun, dalam waktu yang akan datang, mungkin Josias bisa menambah usaha dengan jenis atau barang yang lain. Tentu harus dilakukan secara bertahap dan perlu pendampingan, sehingga Josias juga mempunyai kesempatan untuk belajar dari proses-proses tersebut.

Untuk memulai usaha penjualan minyak tanah, maka Rumah Generasi berkomunikasi dengan Penjabat Walikota Ambon, Bodewin Wattimena. Dan Bodewin merespon positif usaha Rumah Generasi untuk Josias. Kemudian, Bodewin Wattimena memberi tanggung jawab kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ambon, untuk mengurus izin usaha penjualan minyak tanah untuk Josias. Sehingga proses pendaftaran izin, bahkan survei lokasi tempat tinggal Josias, pembukaan buku rekening bank mandiri, dan penandatanganan penjanjian penjualan minyak dengan agen berjalan dengan lancar.

Pada tahap awal, Josias mendapat bantuan 2 drum minyak tanah, dan dapat habis dalam 2 minggu. Josias sangat bersemangat dalam segala proses persiapan dokumen sampai penandatanganan penjanjian

bersama agen, karena ini merupakan kali pertama bagi Josias memiliki usaha sendiri. Josias sangat antusias dan sangat senang.

Dalam proses daftar tunggu, agen yang ternyata telah penuh di tahun 2023 maka Josias mendapat pengantaran minyak tanah di tahun 2024. Dalam kurun waktu 2 minggu 2 drum minyak tanah telah habis, sehingga Josias melakukan penyetoran lagi untuk pengantaran minyak tanah berikutnya. Proses ini terus berjalan lancar sampai saat ini.

Pihak sekolah dalam hal ini Kepala SLB Negeri Leleani 2, Frida Autansye Tuasula merasa sangat senang, dan berterima kasih karena dengan adanya pemberian bantuan ini, Josias menjadi lebih mandiri dan percaya diri bahwa dia dapat melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Ibu Farida menyampaikan, "saya merasa sangat senang karena kolaborasi bersama Rumah Generasi maka pemberdayaan ekonomi ini dapat dilakukan kepada Josias. Ini menjadi contoh bagi anak-anak disabilitas lainnya yang ada di sekolah kami bahwa, anak disabilitas juga dapat berdaya, memiliki usaha, dan dapat mengelola usaha mereka sendiri."

Karena itu, Farida berharap Josias dapat terus mengelola usaha penjualan minyak tanah ini, untuk memenuhi kebutuhannya secara pribadi tetapi juga bermanfaat bagi keluarga. Harapannya juga, penyandang disabilitas yang lainnya dapat menjadikan Josias sebagai contoh mengenai percaya diri dan kemandirian.

Pemerintah Negeri Latuhalat juga merasa bahwa pemberian bantuan ini sangat berdampak secara langsung bagi anak-anak

Negeri Latuhalat. Josias dapat menjadi contoh, sehingga pemerintah negeri juga dapat memikirkan dukungan untuk pemberdayaan disabilitas melalui perencanaan menggunakan anggaran desa.

Sementara keluarga Josias, dalam hal ini oma dan opanya merasa bahwa bantuan ini membuat Josias belajar untuk lebih bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan. Mereka mendukung dan berharap Josias selalu tekun dan telaten untuk mengurus usahanya ini. Keluarga Josias juga menyampaikan terima kasih semua pihak yang telah mendukung dan memberikan bantuan pada Josias.

Raja Negeri Latuhalat, Audy Salhuteru, menyampaikan bahwa Josias akan dijadikan contoh positif dalam memberdayakan anak disabilitas yang ada di Negeri Latuhalat, serta masyarakat akan dihimbau secara keseluruhan untuk mendukung Josias dalam usahanya dengan membeli minyak tanah yang dijual Josias. Sebagai raja, Audy Salhuteru, berharap Rumah Generasi dan lembaga lainnya perlu mendukung pemberdayaan anak dengan disabilitas, sehingga menjadikan anak-anak dengan disabilitas dan penyandang disabilitas lebih mandiri.



Tim Rumah Generasi melakukan pertemuan dengan tim Fakultas Hukum Universitas Pattimura dalam proses advokasi penyusunan peraturan desa/peraturan negeri.

Pembentukan Peraturan Desa dan Negeri Inklusif

Oktofjanus Pattikawa

Wakil Direktur Rumah Generasi Ambon

Desa inklusif, istilah yang mulai dikenal, namun belum banyak yang mengetahuinya. Desa Inklusif adalah tatanan masyarakat desa yang mengakui, menghormati, memenuhi, melindungi serta melayani hak-hak seluruh warga desa termasuk masyarakat rentan dan marginal. Setiap warga desa idealnya bersedia secara sukarela membuka ruang bagi semua pihak dan meniadakan hambatan untuk berpartisipasi secara setara, saling menghargai serta merangkul setiap perbedaan.

Pemerintah desa dan pemerintah negeri memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa/negeri adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman, dan berkeadilan.

Lembaga Rumah Generasi (LRG) melalui Program INKLUSI (Kerjasama Australia–Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif)-

BaKTI bersama pemerintah desa/negeri berusaha mewujudkan desa/negeri inklusi dengan membuat peraturan desa/negeri (perdes/perneg). Keputusan tersebut menandai pertama kalinya desa/negeri di Kota Ambon memiliki regulasi resmi untuk mewujudkan pemerintahan inklusif.

Tujuan utama dari perdes/perneg inklusif adalah untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana seluruh anggota masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pemerintahan desa, tanpa ancaman atau eksklusif. Perdes/perneg tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Negeri Inklusi, tidak hanya mengatur tentang penyandang disabilitas tetapi juga mengatur tentang kelompok rentan dan marginal lainnya yang tergolong dalam pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

Sebanyak dua desa dan dua negeri di Kota Ambon yakni Desa Galala, Desa Latta, dan Negeri Passo di Kecamatan Baguala, serta Negeri Hukurila di Kecamatan Leitimur Selatan adalah desa/negeri dari 50 desa/negeri dan kelurahan yang ada di kota Ambon telah menetapkan Peraturan Desa/Negeri tentang Desa/Negeri Inklusif.

Proses pembentukan peraturan desa/negeri (perdes/perneg) di dua desa dan dua negeri tersebut melalui tahap-tahap sesuai dengan petunjuk pembentukan perdes/perneg dan pembentukan perundang-undangan. Tahap-tahap ini dilakukan, selain mengikuti tata aturan ditentukan dalam pembentukan setiap perdes/perneg, juga dimaksudkan untuk "membudayakan" pembentukan perdes/perneg, sehingga dapat menjadi kebiasaan pemerintah dan masyarakat desa/negeri.

Pembentukan perdes/perneg tidak mudah, apalagi mengimplementasikan perdes/perneg yang sudah dibuat, tentu juga tidak mudah. Karena implementasi perdes/perneg, di antaranya membutuhkan alokasi anggaran.

Di mulai dengan asesmen atau penilaian di desa untuk mengumpulkan informasi dan berbagai masalah yang akan dijadikan sebagai data dalam penyusunan perdes/perneg. Pemerintah desa/negeri dibantu oleh Program INKLUSI melakukan asesmen, yang hasilnya digunakan selanjutnya untuk menyusun pokok-pokok pikiran atau semacam naskah akademik. Pokok-pokok pikiran ini kemudian didiskusikan dengan masyarakat, yang diwakili oleh berbagai kelompok, untuk memberi masukan dan koreksi.

Pokok-pokok pikiran yang telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak di dalam desa/negeri, kemudian digunakan tim untuk menyusun draf rancangan peraturan desa/negeri inklusif. Tim didukung oleh Program INKLUSI untuk mematangkan materi rancangan, yang selanjutnya melalui tahap konsultasi publik. Tim penyusun draf rancangan peraturan desa/negeri inklusif bekerja cukup intensif, karena mereka ingin membuat sejarah bahwa, pekerjaan mereka adalah yang pertama di wilayah Kota Ambon.

Tahap berikutnya adalah konsultasi publik draf rancangan peraturan desa/negeri. Proses konsultasi publik telah dilakukan di empat desa/negeri, dari tanggal 23–31 Agustus 2023 bertempat di

kantor desa/negeri masing-masing, yang dihadiri oleh pemerintah desa/negeri, Saniri/Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh agama, tokoh masyarakat, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Ambon, staf ahli dari Universitas Pattimura dan Lembaga Rumah Generasi.

Setelah konsultasi publik, pemerintah desa/negeri dan Saniri melakukan rapat untuk menetapkan draf rancangan peraturan desa/negeri inklusif, menjadi Perdes/Perneg tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Negeri Inklusif. Peraturan tersebut merupakan langkah awal, namun komitmen pemerintah desa/negeri untuk mengimplementasikan perdes/perneg tersebut perlu diapresiasi dan didukung.

Pembentukan perdes/perneg tidak mudah, apalagi mengimplementasikan perdes/perneg yang sudah dibuat, tentu juga tidak mudah. Karena implementasi perdes/perneg, di antaranya membutuhkan alokasi anggaran. Namun, untuk pemenuhan hak-hak kelompok rentan dan marginal, maka secara bertahap dan prioritas, perdes/perneg harus diimplementasikan.

Desa Inklusif

Hingga tahun 2024 sebutan desa inklusif merujuk pada indikator yang dibuat oleh pemikir dan aktivitis yang selama ini bergerak di dalam advokasi hak-hak dan pemberdayaan disabilitas, terutama yang dimotori Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB). Pemikir dan aktivis disabilitas mengembangkan 9 Indikator Desa Inklusif (Salim et al., 2020), sebagai berikut: (1) membangun perspektif disabilitas dan inklusi sosial; (2) data

disabilitas dan kelompok marginal/minoritas lainnya yang selalu tervalidasi; (3) pengorganisasian disabilitas dan kelompok marginal; (4) melibatkan disabilitas dan kelompok marginal/minoritas dalam pembentukan dan pengambilan kebijakan; (5) perencanaan dan implementasi anggaran yang inklusif disabilitas dan kelompok marginal/minoritas; (6) pembentukan regulasi desa yang inklusif; (7) membangun aksesibilitas infrastruktur; (8) membangun sistem informasi; dan (9) mengembangkan proses pembelajaran bersama untuk membangun desa inklusif.

Tahun 2024 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, melalui Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 518 tahun 2024 tentang Panduan Fasilitasi Desa Inklusif, mengeluarkan 15 indikator desa inklusif, sebagai berikut: (1). Tersedianya surat keputusan kepala desa terkait pembentukan kader desa inklusif; (2) Terdapat setidaknya sebesar 50% keterlibatan kelompok rentan dan marginal sebagai kader desa inklusif; (3) Terdapatnya forum diskusi pergalian usulan kegiatan desa inklusif; (4) Tersedianya dokumen usulan kegiatan desa; (5) Meningkatnya partisipasi kelompok marginal dan rentan setidaknya sebesar 50% dalam dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa; (6) Meningkatnya partisipasi kelompok marginal dan rentan setidaknya sebesar 30% dalam kegiatan publik di desa; (7) Terlaksananya kegiatan desa inklusif bagi kelompok perempuan; (8) Terlaksananya kegiatan desa inklusif bagi kelompok difabel; (9) Terlaksananya kegiatan desa inklusif bagi kelompok Lansia; (10) Terlaksananya kegiatan desa inklusif bagi kelompok anak dan remaja; (11) Terlaksananya kegiatan desa

inklusif bagi kelompok minoritas agama, kepercayaan dan adat tertentu; (12) Terlaksananya kegiatan desa inklusif bagi kelompok resiliensi dan kelompok lainnya (contoh: mantan napi, mantan ODDP, masyarakat dalam rehabilitasi, dan lainlain); (13) Terlaksananya desa yang mendukung keberlanjutan program/kegiatan kelompok marginal dan rentan di desa; (14) Tersedianya dukungan penganggaran bagi keberlanjutan desa inklusif yang bersumber dari supra desa (pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat); (15) Tersedianya nota kesepahaman (MoU) dengan pihak ketiga (swasta, akademisi, organisasi nirlaba/LSM/NGO).

Dua indikator tersebut di atas dapat digunakan untuk mendorong pengembangan desa/negeri inklusif, termasuk menyusun peraturan desa/negeri inklusif. Namun, yang paling penting adalah proses-proses pengembangan desa/negeri inklusif harus sesuai dengan kondisi faktual di desa/negeri.

Catatan: Negeri adalah sebutan desa adat di Provinsi Maluku.



**KOTA KENDARI, |
SULAWESI TENGGARA**



Dukungan secara langsung dari Komisi Nasional Disabilitas (KND), yang hadir untuk memberikan masukan substansi dalam pembahasan penyusunan Ranperda Hak-Hak Disabilitas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan di Kota Kendari.

Advokasi Perda Disabilitas

Sulhani

Program Officer INKLUSI - Rumpun Perempuan Sultra Kendari

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Kendari tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas cukup lama dinantikan oleh organisasi penyandang disabilitas (opdis). Berbagai upaya telah dilakukan oleh opdis dan organisasi nonpemerintah (ornop), yang mendesak DPRD Kota Kendari, namun tak kunjung dibahas. Raperda tersebut diinisiasi oleh DPRD Kota Kendari, namun tidak selesai hingga tahun 2022, dan hanya menyisakan rancangan naskah akademis dan Raperda Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Kehadiran Program INKLUSI-BaKTI di Kota Kendari sejak tahun 2022 menjawab keluhan kesah bagi penyandang disabilitas. Salah satu upaya Rumpun Perempuan Sultra (RPS) melalui Program INKLUSI adalah pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Hak Penyandang Disabilitas. Pemerintah Kota Kendari dan legislatif (DPRD), dan beberapa pihak juga berupaya mewujudkan semangat inklusivitas dalam berbagai aspek kebijakan dan pembangunan di Kota Kendari, termasuk dengan membuat regulasi.

RPS menilai pentingnya kebijakan yang inklusif dalam memberikan perlindungan bagi kelompok rentan dan marginal terhadap akses pada layanan publik serta membuka ruang partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dan pembentukan kebijakan.

RPS memulai Program INKLUSI dengan pengorganisasian kelompok konstituen, yang di dalamnya terdapat kelompok rentan dan marginal, yang mengalami diskriminasi dan kekerasan. Mereka juga memiliki keterbatasan akses terhadap layanan publik dan tidak terlibat dalam perencanaan pembangunan dan pembentukan kebijakan.

Pada pertemuan pembentukan dan penguatan kelompok konstituen untuk penerimaan pengaduan dan penyediaan layanan komunitas di Kelurahan Watu-Watu yang melibatkan disabilitas, lanjut usia (lansia) dan kelompok rentan lainnya. Salah satu peserta penyandang disabilitas yaitu Nasrun, penyandang disabilitas low vision mengungkapkan senang sekali bisa dipertemukan dengan RPS yang membahas isu-isu disabilitas, yang selama ini tidak pernah diperhatikan.

Nasrun menyatakan, "tahun 2018 kami dari organisasi disabilitas telah menyampaikan kepada DPRD dengan menyerahkan draft ranperda disabilitas tetapi tidak disahuti hingga saat ini, kami butuh perlindungan tentang hak-hak disabilitas yang belum mendapatkan perhatian khusus bagi penyandang disabilitas, sementara aturan nasional telah ada, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sebaiknya ada turunan dalam bentuk Perda Disabilitas yang memperhatikan kami. dengan adanya RPS bisa



Melalui Program INKLUSI yang melibatkan kami dalam mendorong Raperda ini, kami sangat berterima kasih, karena perda ini akan menentukan pemenuhan hak-hak disabilitas. Dengan ini organisasi disabilitas sangat lantang menyuarakan lahirnya perda disabilitas yang akan mengangkat derajat kami sebagai disabilitas, selama ini masih dipinggirkan dan termarjinalkan.”

Junaid

Ketua PERTUNI Kota Kendari

bersama-sama mendesak DPRD Kota Kendari untuk segera membahas perda disabilitas ini.”

RPS merespon desakan organisasi disabilitas untuk menjembatani usulan tersebut. RPS sebagai pengelola Program INKLUSI, melalui pertemuan dan diskusi dengan beberapa anggota DPRD, Kabag Hukum DPRD Kota Kendari, dan Ketua Bapemperda terkait perkembangan Raperda Disabilitas yang tertunda.

Diskusi mendapat tanggapan dari anggota DPRD Kota Kendari, Ilham Hamra yang menjelaskan bahwa Ranperda ini telah dibahas 5

tahun yang lalu (tahun 2018) hanya saja terjadi pergantian pemerintahan dan DPRD menjadi tidak prioritas. Pun dokumen naskah akademik tidak terarsip di Sekretariat DPRD dan harus ditelusuri di Universitas Halu Oleo Kendari di Fakultas Hukum yang membuat naskah tersebut.

Atas dukungan Ketua DPRD, Bapemperda, dan Bagian Hukum DPRD sebagai *Champion*, yang meminta kepada RPS untuk menelusuri dokumen tersebut, maka RPS menghubungi pihak-pihak yang sebelumnya terlibat dalam penyusunan dan pembahasan Raperda Disabilitas, dan akhirnya dokumen ditemukan.

Atas desakan sejumlah opdis dan RPS maka Raperda Disabilitas, oleh DPRD Kota Kendari dimasukkan ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2023 untuk dibahas. RPS mendorong dan memastikan, agar DPRD yang memiliki kewenangan dalam membuat perda dapat membahas Raperda Disabilitas. Hal ini untuk memberi perlindungan bagi disabilitas, serta mendukung terwujudnya pembangunan inklusif dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terkait penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam setiap pembangunan.

Untuk mempercepat pembahasan Raperda Disabilitas, maka RPS melakukan serial diskusi dan workshop untuk pembahasan Raperda sebanyak 5 kali, dengan melibatkan *stakeholder* terkait yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas PUPR, BPBD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pariwisata, Bagian

Hukum DPRD, Bagian Hukum Pemerintah Kota Kendari, perwakilan Kemenkumham, organisasi disabilitas, dan perwakilan kelompok konstituen di 15 kelurahan. Diskusi membahas judul hingga pasal demi pasal.

Selanjutnya pembahasan Raperda untuk penyempurnaan di tingkat DPRD Kota Kendari di lakukan 2 hari secara berturut -turut bersama dinas terkait di Gedung DPRD. Namun terlebih dulu Raperda dilakukan harmonisasi oleh Kemenkumham sebagai salah satu dari rangkaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya disharmonisasi hukum.

Setiap proses pembahasan Raperda difasilitasi oleh bagian Hukum DPRD memastikan kehadiran *stakeholder* terkait dan organisasi disabilitas. Selain itu, dukungan secara langsung dari Komisi Nasional Disabilitas (KND), yang hadir dalam pembahasan untuk memberikan masukan substansi Raperda dengan menyesuaikan kebutuhan lokal di Kota Kendari.

Keaktifan organisasi penyandang disabilitas dalam pembahasan raperda membawa pengaruh positif terhadap keberadaan organisasi disabilitas. Hal ini desakan kepada DPRD terus disuarakan segera mengesahkan Raperda tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas di Kota Kendari. Karena Perda ini akan menjadi panduan yang menentukan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Junaid, Ketua Pertuni Kota Kendari yang hadir setiap pembahasan Raperda sangat bersyukur dan berterima kasih kepada RPS. Junaid

menyatakan, ”melalui Program INKLUSI yang melibatkan kami dalam mendorong raperda ini, kami sangat berertima kasih, karena perda ini akan menentukan pemenuhan hak-hak disabilitas. Dengan ini organisasi disabilitas sangat lantang menyuarakan lahirnya perda disabilitas yang akan mengangkat derajat kami sebagai disabilitas, selama ini masih dipinggirkan dan termarjinalkan.”

Sepanjang proses pembahasan Raperda ini, juga banyak mengalami tantangan, terutama kesibukan anggota DPRD dan sulit ditemui, karena saat itu anggota DPRD intens melakukan kunjungan di dapil masing-masing menuju pemilihan DPRD, DPR RI, DPD dan pemilihan presiden dan wakil presiden secara serentak. Setiap kali ada kesepakatan waktu antara RPS dan anggota DPRD selalu ditunda atau berubah. Tidak hanya itu, anggota DPRD perempuan sebagai keterwakilan perempuan di parlemen jarang hadir pada setiap pembahasan Raperda.

Dengan berbagai tantangan dalam proses penyusunan Ranperda telah mendapatkan hasil yang baik. Pada bulan Agustus 2024, DPRD melaksanakan sidang paripurna bersama Pemerintah Kota Kendari untuk menyetujui Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, di mana dokumen final Ranperda diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk diregistrasi dan diberi penomoran. Hasil dari perjuangan panjang yang dilalui sepanjang tahun 2023-2024 akhirnya ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPRD menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Disabilitas.

Ditetapkannya Perda Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Disabilitas, disambut baik oleh organisasi disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang selama ini merasakan ada perlakuan diskriminatif yang menyebabkan mereka tereksklusi dalam masyarakat. Perda ini memberikan ruang yang lebih terbuka bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pembangunan.



Proses pendampingan yang dilakukan oleh anggota Kelompok Konstituen bersama tim RPS kepada salah satu keluarga terkait masalah perlintas yaitu tidak memiliki kartu BPJS untuk berobat.

Kerja Pendamping di Kelompok Konstituen

Wa Erni

Asisten Program INKLUSI - Rumpun Perempuan Sultra Kendari

Melalui upaya bersama, Kelompok Konstituen menciptakan ruang aman bagi korban untuk melapor dan mendapatkan bantuan. Kini, masyarakat lebih berani untuk melaporkan kasus kekerasan, dan semakin banyak perempuan serta anak yang mendapatkan perlindungan dan dukungan.

Rumpun Perempuan Sultra (RPS) adalah mitra Program INKLUSI-BaKTI di Kota Kendari. Salah satu kegiatan dari program adalah memberdayakan masyarakat melalui kelompok yang disebut sebagai kelompok konstituen. Kelompok konstituen di Kota Kendari terbentuk karena kepedulian yang sama terhadap permasalahan sosial yang terjadi.

Awalnya kelompok konstituen menghadapi banyak tantangan, termasuk kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka sebagai warga negara dan cara mengadvokasi perubahan. Namun, setelah mengikuti serangkaian pelatihan yang diadakan oleh RPS, kapasitas mereka mulai meningkat secara signifikan.

Melalui pelatihan tersebut, anggota kelompok belajar tentang hak-hak warga, hak perempuan, berbagai bentuk kekerasan, hukum yang melindungi perempuan dan anak, serta strategi advokasi yang efektif. Mereka mulai memahami pentingnya melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta bagaimana cara mendukung dan mendampingi korban.

Dengan pengetahuan yang baru diperoleh, kelompok ini mulai melakukan diskusi di kelompok dan lingkungan mereka. Kelompok konstituen mengajak masyarakat untuk berbicara tentang isu kekerasan dan pentingnya perlindungan sosial. Kelompok juga menjalin kerja sama dengan pihak terkait di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Dinas Sosial, dan dinas terkait untuk memastikan bahwa setiap laporan kekerasan dan perlindungan sosial ditangani dengan serius.

Perubahan yang paling mencolok terlihat ketika kelompok konstituen ini berhasil mendampingi beberapa kasus kekerasan dan perlindungan sosial. Dengan rasa percaya diri, kelompok konstituen mendampingi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Kelompok konstituen juga mendampingi warga yang membutuhkan pengurusan administrasi, seperti Kartu

Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, dan Akta Kematian.

Melalui upaya bersama, mereka menciptakan ruang aman bagi korban untuk melapor dan mendapatkan bantuan. Kini, masyarakat lebih berani untuk melaporkan kasus kekerasan, dan semakin banyak perempuan serta anak yang mendapatkan perlindungan dan dukungan. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas kelompok konstituen, tetapi juga menciptakan kesadaran kolektif di komunitas tentang pentingnya melindungi hak-hak perempuan dan anak. Dengan semangat, kelompok konstituen berkomitmen untuk terus berjuang demi keadilan dan perlindungan sosial yang lebih baik bagi semua.

Pada Jumat 14 Juni 2024 Pukul 14:30, pendamping kelurahan yang ada di Kelurahan Mataiwoi menerima aduan terkait perlindungan sosial yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS). Seorang anak bernama Dhiva Ramadhani Syam, berusia 5 tahun mengalami luka melepuh akibat tersiram air panas tanpa sengaja. Anak itu dilarikan ke rumah sakit provinsi, Rumah Sakit Bahteramas dan harus dilakukan operasi, yang tentu saja biayanya tidak sedikit, sementara anak ini tidak memiliki BPJS/KIS. Pendamping berkoordinasi dengan RPS terkait solusi dan upaya yang harus dilakukan.

RPS mengarahkan pendamping dan keluarganya untuk mengurus Jamkesda atau BPJS yang dibiayai oleh pemerintah daerah, yang dikhususkan untuk warga Kota Kendari yang tidak mampu dan sudah dirawat di rumah sakit (terutama untuk situasi mendesak),

karena Kota Kendari telah menerapkan *Universal Health Coverage* (UHC).

Pendamping kelompok konstituen Mepokoaso, Nirawati dan pihak keluarga melengkapi persyaratan yang harus dilengkapi yaitu, KK, KTP orang tua, pengantar dari RT/RW, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pihak Kelurahan Mataiwoi dan surat keterangan rawat inap dan rumah sakit.

Setelah dokumen yang dibutuhkan lengkap, pendamping dan keluarga menuju ke Dinas Sosial Kota Kendari untuk meminta rekomendasi agar dapat mengurus KIS Jamkesda. Setelah dari Dinas Sosial mereka pergi ke Dinas Kesehatan Kota Kendari untuk pengusulan Jamkesda. Selanjutnya pihak keluarga harus menunggu informasi dari Dinas Kesehatan Kota Kendari.

Pihak Rumah Sakit Bahteramas memberikan waktu untuk berurusan selama 3x24 jam (3 hari) pada hari kerja. Sore hari pukul 17:00 pihak keluarga mendapat info bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) pasien tidak *online*, sedangkan perkantoran sudah tutup dan tidak ada lagi pelayanan.

Pada Sabtu, pihak keluarga panik karena BPJS pasien belum aktif karena kendala NIK pasien. Karena sudah memiliki jejaring dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kendari, maka pendamping menghubungi pihak Disdukcapil bagian Teknis Data Base untuk meminta pengaktifan NIK atas nama Dhiva Ramadhani Syam, dan pada hari itu juga NIK atas nama tersebut langsung aktif.

Berkat kerja Kelompok Konstituen Mepokoaso, Pasien atas nama Dhiva Ramadhani Syam bisa dirawat selama 1 minggu di Rumah Sakit Bahteramas dan setelah itu melakukan rawat jalan tanpa membayar biaya sepersen pun.

Pada Senin 17 Juni 2024 bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha sehingga perkantoran masih libur, pihak Rumah Sakit Bahteramas terus melakukan pengecekan pada sistem apakah KIS atas nama Dhiva Ramadhani Syam sudah aktif atau belum, dan ternyata belum aktif. Pihak keluarga panik karena mereka takut untuk berlaku umum dan harus membayar biaya operasi dan perawatan yang mencapai 48 juta rupiah, ibu Korban menghubungi pendamping RPS dan menceritakan permasalahan yang dialaminya.

RPS menghubungi pihak Rumah Sakit Bahteramas untuk meminta kebijakan terkait perpanjangan waktu untuk berurusan. Ibu Masita, mantan bagian humas di Rumah Sakit Bahteramas akan membantu membicarakan dengan pihak rumah sakit, karena Masita sudah pensiun. Hasil negosiasi itu pihak rumah sakit memberi waktu sampai hari Rabu 19 Juni 2024 untuk berurusan, karena hari Selasa adalah cuti bersama.

Pada Rabu 19 Juni 2024, KIS atas nama Dhiva Ramadhani Syam belum aktif, pihak keluarga panik dan menghubungi pendamping kelompok konstituen, Nirawati dan menceritakan kecemasan mereka. Nirawati menghubungi Yeni, staf Dinas Kesehatan Kota Kendari dan menanyakan terkait KIS yang belum aktif dan jawaban mereka adalah Dinas Kesehatan Kota Kendari sudah mengusulkan dan yang mengaktifkan adalah BPJS.

Pada pukul 15:48, BPJS atas nama Dhiva Ramadhani Syam belum aktif juga, sehingga staf RPS, Wa Erni dan pendamping kelompok konstituen, Nirawati berinisiatif untuk ke kantor BPJS dan menanyakan apa yang menjadi kendala sehingga BPJS itu tidak diaktifkan. Pada saat sampai dikantor BPJS nomor antrian sudah tidak dibuka lagi karena sudah sore. Wa Erni dan Nirawati berbicara dengan security dan menyampaikan maksud dan tujuan. *Security* langsung mengonfirmasi ke *customer service* dan Bidang Pengaduan terkait Usulan dari Dinas Kesehatan Kota Kendari. Setelah dicek ternyata usulan itu belum diproses karena belum melihat usulan itu di *Whatsapp Group* antara BPJS dan Dinas Kesehatan.

Sambil menunggu dokumen diproses oleh pihak BPJS, Wa Erni dan Nirawati terus berkomunikasi dengan ibu korban dan menyampaikan perkembangan dari hasil pendampingan. Pada pukul 16:54, pihak BPJS menyampaikan bahwa BPJS atas nama Dhiva Ramadhani Syam sudah aktif dan sudah bisa digunakan. Pendamping langsung menghubungi ibu korban dan menyampaikan kabar gembira itu,

pihak keluarga sangat bersyukur dan bahagia karena tidak harus membayar biaya rumah sakit sebesar 48 juta rupiah.

Pasien atas nama Dhiva Ramadhani Syam dirawat selama seminggu di Rumah Sakit Bahteramas dan setelah itu melakukan rawat jalan tanpa membayar biaya sepeserpun. Ini berkat kerja Kelompok Konstituen Mepokoaso.



Ketua KK Meohai, Hariani (duduk di kiri) sedang mendampingi pelaporan kasus kekerasan anak di UPTD PPA Kendari.

Memperkuat Layanan Berbasis Komunitas

Sulhani

Program Officer INKLUSI - Rumpun Perempuan Sultra Kendari

Permasalahan sosial, khususnya kemiskinan tak kunjung usai. Pemerintah terus berupaya mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem dan kemiskinan. Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrem merupakan salah satu pemicu potensi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara kasus kekerasan pada perempuan dan anak terus meningkat setiap tahunnya. Data dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Kendari menyebutkan pada Tahun 2023 kasus kekerasan perempuan dan anak sebanyak 26 kasus dan tahun 2024 sebanyak 39 kasus terdiri dari kekerasan psikis, fisik, seksual dan penelantaran. Data Rumpun Perempuan Sultra (RPS) menunjukkan sebanyak 13 kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 5 kasus. Sementara data perlindungan sosial sejumlah 2.265 jiwa dari 15 Kelurahan.

Data ini menunjukkan meningkatnya kelompok rentan dan marginal mengalami diskriminasi dan kekerasan. Karena itu, pemerintah perlu menjadikan perhatian khusus dalam mengurangi kekerasan

melalui pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta deteksi dini pada kelompok anak remaja.

Hadirnya Program INKLUSI-BaKTI di Kota Kendari pada Tahun 2022, di mana RPS sebagai salah satu mitra Yayasan BaKTI dalam Program INKLUSI, bekerja sama dengan Pemerintah Kota Kendari, yang menysasar kelompok rentan dan kelompok marginal lainnya. Program ini diharapkan memberi manfaat besar bagi kelompok rentan yang belum menjadi perhatian khusus dari pemerintah untuk mendapatkan manfaat pembangunan dan mengakses layanan untuk pemenuhan hak-haknya.

Sebagai awal pelaksanaan program, RPS membentuk kelompok konstituen (KK) sebagai salah satu kelompok untuk mengadvokasi hak-hak kelompok rentan dan marginal, di dalamnya terdapat Layanan Berbasis Komunitas (LBK). LBK berperan menjadi pendamping kelurahan yang berada di 15 Kelurahan. Pendamping kelurahan sebanyak 120 orang (laki-laki: 3 orang dan Perempuan: 117 orang), pada setiap kelurahan terdapat 8 orang, 4 orang pendamping kekerasan dan 4 orang lainnya sebagai pendamping penanganan perlindungan sosial.

Keberadaan kelompok konstituen sebagai LBK merupakan organisasi di tingkat kelurahan, yang menghimpun berbagai unsur, seperti perempuan kepala keluarga, lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas. Namun, kelompok konstituen juga menghimpun tokoh masyarakat dan kader, yang telah mempunyai pengalaman dalam mengadvokasi layanan dan membantu warga yang membutuhkan.

Kerja pendampingan merupakan kegiatan yang telah dilakukan. Pengurus kelompok berbagai tugas, meskipun secara keseluruhan pendamping belum aktif, dan penanganan kasus masih terbatas, di

mana kasus yang ditangani merupakan kasus-kasus di lingkungan sekitar. Namun setelah RPS memberikan penguatan kapasitas tentang mekanisme penanganan kasus kekerasan dan penanganan masalah perlindungan sosial, melalui diskusi regular kampung dan workshop, mereka aktif berperan mendampingi kasus pengaduan di tingkat kelurahannya.

Beberapa pendamping yang sudah aktif mendampingi kasus, baik kekerasan maupun perlindungan sosial, di antaranya Megawati (KK Melati Kelurahan Punggolaka), Hariani, Andi Nursakti, Gusmawati, Isratin, Herniati (KK Meohai Kelurahan Anawai), Suismini, Asriani Abbas, Nirawati (KK Mepokoaso Kelurahan Mataiwoi), Limania, Wa Ode Zaibatun (KK Watu-Watu Kelurahan Watu-Watu), Asriani (KK Lestari Kelurahan Petoaha), Rosnambe, Nining (KK Matahari Kelurahan Kemaraya) Saharia, Satriani (KK Watubangga Kelurahan Watubangga), Samdia, Kurniati (KK Kaseiseha Kelurahan Bonggoeya), Ekawati, Dinar (KK Medulu Kelurahan Anggalomelai), dan Rahmatia (KK Lestari Kelurahan Tobimeita).

Dalam penyelesaian kasus kekerasan perempuan dan anak, KK bekerja sama dengan UPTD PPA, kepolisian, dan LBH (Lembaga Bantuan Hukum), organisasi atau mereka yang peduli pada isu-isu kekerasan. Kasus yang dirujuk menyesuaikan permintaan korban, karena tidak semua kasus dirujuk tetapi diselesaikan secara mediasi dengan melibatkan aparat pemerintah kelurahan. Pendamping juga harus memastikan kasus yang didampingi di UPTD PPA memasukan ke dalam Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) di UPTD PPA. SIMPONI merupakan sistem pendataan berbasis *online* di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

Sementara penyelesaian pengaduan perlindungan sosial, pendamping KK bersinergi dengan dinas terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan. Melalui penguatan KK, pendamping mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai tugas pokok dan fungsi instansi/lembaga terkait.

Salah satu pendampingan yang dilakukan oleh pendamping adalah pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akte kelahiran dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang belum dimiliki penyandang disabilitas. Selama ini sebagian penyandang disabilitas tidak mempunyai dokumen terkait administrasi kependudukan, karena dianggap aib bagi keluarganya. Kelompok rentan lainnya yang mendapat pendampingan untuk pengurusan dokumen kependudukan adalah warga miskin, lanjut usia, dan perempuan kepala keluarga, sehingga mereka dapat mengakses layanan sosial, seperti program keluarga harapan, bantuan sosial non tunai, dan beras pangan, juga bantuan bedah rumah melalui dana aspirasi DPRD Kota Kendari.

Data yang didampingi oleh KK dipastikan masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke dalam sistem aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Nex Generation (SIKS-Ng) Pusdatin Kementerian Sosial, sebagai syarat mendapatkan bantuan sosial pemerintah yang dikelola Kementerian Sosial.

Keterlibatan pendamping tidak hanya penanganan pengaduan saja, tetapi juga aktif mengikuti kegiatan politik di kelurahan seperti Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), musyawarah kecamatan, dan Reses DPRD. Inarto Ketua DPRD Kota Kendari dari Partai Golkar dan Simon Manton dari Partai Gerindra, serta Yuli dari PKS melibatkan KK di setiap reses. Yuli mengadakan

reses partisipatif melibatkan KK dan pendamping di Kelurahan Tobimeita, mendengarkan keluhan masyarakat yang disampaikan pendamping tentang adanya disabilitas berjumlah 13 orang belum memiliki kartu identitas (KTP dan Akta kelahiran) dan tidak bisa mengakses bantuan sosial pemerintah, karena alasan identitas tidak lengkap. Yuli merespon dengan baik dan menghubungi langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kendari, dan esok harinya pihak Disdukcapil melakukan penjangkauan perekaman KTP bertempat di kelurahan yang dikoordinir pendamping. Hal ini juga terealisasinya usulan kelompok seperti pembangunan jalan setapak, penerangan jalan, dan sumur bor, serta bedah rumah di kelurahan masing-masing.

Sebagai organisasi di tingkat kelurahan, KK telah menjadi mitra pemerintah dan DPRD, dan diakui kerja-kerja pendampingan oleh pemerintah khususnya UPTD PPA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta DPRD, dan bersinergi dalam pemenuhan hak-hak dan perlindungan warga, terutama mereka yang selama ini tergolong kelompok miskin, marginal, dan rentan lainnya. Saat ini (2023), pendamping kelurahan dijadikan sebagai Satgas PPA yang dibentuk UPTD PPA, berjumlah 15 orang dari kelurahan untuk bekerja berkolaborasi di setiap kecamatan melalui keputusan walikota. Pendamping bermitra dan berjejaring, serta saling menguatkan untuk memudahkan koordinasi dalam penyelesaian penanganan kasus yang diajukan masyarakat.



RPS melalui Program INKLUSI memberikan penguatan kapasitas kepada jurnalis dalam bentuk pembentukan forum media inklusif, pelatihan peningkatan kapasitas, dan berbagai rangkaian diskusi maupun kerjasama kegiatan-kegiatan dengan tema gender dan inklusif.

Jurnalis dan Media sebagai Mitra dalam Advokasi

Sitti Zahara

Koordinator Program INKLUSI - Rumpun Perempuan Sultra Kendari

Peran media sangat penting dalam melakukan advokasi, termasuk dalam pembentukan kebijakan pemerintah. Hal ini karena media dan jurnalis turut memberitakan dan menyebarkan informasi terkait dengan pembentukan kebijakan yang akan mengatur setiap hal yang terkait pembangunan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah salah satu mitra kerja Rumpun Perempuan Sultra (RPS) dalam Program INKLUSI-BaKTI melalui kesepahaman bersama. Dalam program tersebut RPS bersama DPRD berkomitmen mendorong kebijakan daerah yang inklusif, salah satunya melalui peraturan daerah (perda). Pada bulan Desember 2022, DPRD Kota Kendari memutuskan dokumen Program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) 2023, yang salah satunya mendorong Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyandang Disabilitas.

Dari Propemperda tersebut, RPS melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka mengadvokasi pembahasan Ranperda Penyandang

Disabilitas. Dalam advokasi tersebut keterlibatan Bapemperda DPRD sangat penting, demikian pula Bagian Hukum sekretariat DPRD Kota Kendari, khususnya dalam merancang dan menyusun draft Raperda yang diberi judul Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Di balik penyusunan Raperda tersebut, tidak hanya tentang penyusunan draft namun juga berbagai agenda advokasi dilakukan kepada pihak DPRD untuk berkomitmen membahas, dan mensahkan menjadi peraturan daerah (perda). Peran multipihak dalam advokasi raperda ini di antaranya organisasi penyandang disabilitas, kelompok rentan, kelompok konstituen dan yang tidak kalah penting adalah peran media atau jurnalis di Kota Kendari.

Jurnalis juga merupakan mitra RPS dalam implementasi Program INKLUSI-BaKTI. Melalui Program INKLUSI, RPS memberikan penguatan kapasitas kepada jurnalis dalam bentuk pembentukan forum media inklusif, pelatihan peningkatan kapasitas, dan berbagai rangkaian diskusi maupun kerjasama kegiatan-kegiatan dengan tema gender dan inklusif sejak tahun 2022.

Jurnalis yang telah mendapatkan pelatihan pemberitaan responsif *Gender Equality Disability and Social Inclusion* (GEDSI) mulai peka terhadap kondisi yang menunjukkan bentuk ketidakadilan kepada perempuan, anak dan juga kelompok rentan serta hal-hal eksklusif yang merugikan kelompok rentan. Secara teknis penggunaan istilah-istilah yang tidak berpihak kepada korban, kelompok rentan maupun kelompok marginal telah dihilangkan oleh jurnalis sebelum masuk ke meja redaktur. Dalam diskusi dengan Kepala

Jurnalis bersama medianya turut aktif memberitakan perkembangan raperda tersebut agar sesuai dengan tahapan dan hasil yang diharapkan. Terbukti dengan adanya beberapa pemberitaan yang dilakukan oleh jurnalis atau media tentang perkembangan Raperda Penyandang Disabilitas khususnya di DPRD,

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Kendari, Kepala UPTD PPA Hizal Joisman pernah mengatakan bahwa ”pemberitaan media di Kendari sudah lebih baik dari sebelumnya”, sontak salah satu jurnalis mengatakan sambil bercanda; ”kami lebih berhati-hati lagi dalam pemberitaan tentang perempuan dan anak karena ada RPS yang memantau dan sudah melatih jurnalis”.

Peran media dalam advokasi kebijakan juga sangat penting karena media dapat membantu menyampaikan pesan, memengaruhi opini publik, dan memperkuat suara masyarakat agar diperjuangkan oleh DPRD dalam bentuk kebijakan. Di Kota Kendari peran jurnalis dalam advokasi kebijakan inklusif cukup signifikan, seperti dalam advokasi Raperda Kota Kendari tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Jurnalis beberapa media turut terlibat dalam memberikan input data dan informasi pada pertemuan menjangkau aspirasi ataupun informasi

stakeholder dan masyarakat luas. Sehingga informasi dari jurnalis turut memperkaya data dan informasi bagi tim penyusun Raperda Penyandang Disabilitas.

Dalam perkembangan tahapan pembahasan ranperda, media turut mengawal dan memastikan bahwa proses pembahasan maupun advokasi berjalan dengan baik. Jurnalis bersama organisasi penyandang disabilitas dan kelompok konstituen dan kelompok rentan, ikut terlibat dalam dialog bersama RPS di DPRD Kota Kendari, dalam rangka mendorong dan mem-*pressure* DPRD untuk segera membahas dan mensahkan ranperda tersebut.

Tidak hanya itu, jurnalis bersama medianya turut aktif memberitakan perkembangan raperda tersebut agar sesuai dengan tahapan dan hasil yang diharapkan. Terbukti dengan adanya beberapa pemberitaan yang dilakukan oleh jurnalis atau media tentang perkembangan Raperda Penyandang Disabilitas khususnya di DPRD, maka banyak pihak membicarakannya. Jurnalis mengikuti proses tersebut tahap demi tahap melalui pemberitaan, hingga disahkan menjadi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 tahun 2024 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Kerja kolaborasi RPS dan forum media juga terjalin dalam berbagai diskusi sharing pengetahuan tentang isu perempuan dan anak, isu GEDSI, kebijakan publik hingga momen pemilu dan aksi kolektif.

Dalam menyongsong pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada bulan November 2024 di provinsi dan kabupaten/kota,

beberapa partai memberikan dukungan kepada bakal calon kepala daerah perempuan; bakal calon gubernur, bakal calon walikota dan bakal calon wakil walikota, bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati. Apakah kehadiran bakal calon dari unsur perempuan juga mencerminkan perjuangan isu perempuan dan kelompok rentan. RPS bersama jurnalis (khususnya jurnalis perempuan) menggelar diskusi untuk memetakan peluang perempuan dan kelompok rentan memberikan dukungan kepada para calon termasuk menawarkan konsep tentang hak-hak perempuan, hak-hak disabilitas, hak-hak kelompok rentan untuk diperjuangkan dalam visi misi para calon kepala daerah. Jurnalis dan RPS telah mendiskusikan dan merefleksikan peran-peran jurnalis dan aktivis perempuan dalam mendorong isu perempuan, disabilitas, dan kelompok rentan dalam menyongsong pilkada serentak 2024.

Jurnalis dan RPS menyuarakan isu GEDSI agar dicantumkan dalam visi misi bakal calon kepala daerah. Isu GEDSI yang berkaitan dengan kondisi kelompok rentan dan marginal yang selama ini hanya menjadi "objek" yang dimanfaatkan suaranya untuk mendapatkan kursi kekuasaan oleh para politisi, sementara isu-isu pembangunan yang berdampak pada kehidupan dan penghidupan kelompok rentan dan marginal tidak serius dituntaskan permasalahannya.

Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kelompok rentan penerima dampak operasi perusahaan pertambangan dan perusahaan sawit atas kerusakan lingkungan dan permasalahan sosial yang terjadi merupakan isu yang tidak serius "digarap" untuk menjadi prioritas dalam penjabaran visi, misi, strategi dan program

kerja kepala daerah. Termasuk isu layanan publik di bidang kesehatan, pendidikan dan layanan publik lainnya.

Pada momen peringatan 16 Hari anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HaKTP) RPS bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari yang anggotanya juga merupakan anggota forum media, bersama Forum Alumni HMI Wati (FORHATI) wilayah Sulawesi Tenggara dalam rangka kampanye stop kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam bentuk Diskusi Kelompok Terfokus tentang kondisi kekerasan perempuan dan anak sebagai rekomendasi bagi pemerintahan baru, baik gubernur maupun bupati/walikota terpilih, serta DPRD provinsi/kabupaten/kota. Rekomendasi akan dirumuskan oleh tim perumus dan akan disampaikan setelah pelantikan kepala daerah terpilih di Sulawesi Tenggara.

Peran-peran strategis jurnalis dan media dalam pembangunan inklusif tentu saja memiliki tantangan tersendiri, sebagai berikut:

- a. jurnalis semakin baik perspektifnya dalam menulis berita dengan perspektif GEDSI, namun masih perlu peningkatan kapasitas terus-menerus sehingga jurnalis semakin sensitif atas isu GEDSI;
- b. pemahaman gender masih perlu ditingkatkan, namun alokasi anggaran untuk media relatif kecil baik oleh pemerintah daerah khususnya dinas komunikasi dan informasi (kominfo) yang memiliki "kewajiban" dalam peningkatan kapasitas jurnalis/

- media, maupun dari lembaga donor yang memiliki program yang bersinergi dengan media massa;
- c. pemahaman redaktur butuh ditingkatkan agar apa yg ditulis/ diberitakan oleh jurnalis bisa diterima, jurnalis juga masih perlu dilatih penulisan/pemberitaan investigasi yang inklusif; dan
 - d. masih banyak peran-peran jurnalis yang perlu ditingkatkan misalnya dalam kajian dan analisis APBD yang responsif gender, dan lain-lain.



Penandatanganan kerja sama antara Rumpun Perempuan Sultra dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari tentang fasilitasi pembentukan ULD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari.

Sekolah Inklusif, Pendidikan untuk Semua

Sitti Zahara

Koordinator Program INKLUSI - Rumpun Perempuan Sultra Kendari

Latar Belakang dan Kebijakan Pendidikan Inklusif

Hak warga negara atas pendidikan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini menjadi jaminan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan apapun kondisinya, yang diperkuat oleh UUD 1945 Pasal 28H ayat (2) menyebutkan bahwa, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. UUD 1945 ini menjadi dasar lahirnya kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab IV menyebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus karena kondisi fisik, emosional, mental, dan sosial atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusi, baik pada tingkat dasar maupun menengah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2016 tentang Penyandang Disabilitas turut memperkuat pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 menyebutkan bahwa, peserta didik berkebutuhan khusus berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan.

Menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Demikian pula Kota Kendari yang juga mengeluarkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikmudora) Nomor 800/10754/2023 tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Jenjang SD dan SMP.

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusif Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi mengeluarkan kebijakan Permendikbudristek Nomor 48 tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. Lahirnya Permendikbudristek ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Kendari dengan membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) Pendidikan melalui Keputusan Walikota Kendari Nomor 1857 Tahun 2024 tentang Pembentukan ULD Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari.

Kota Kendari memiliki 168 Taman Kanak-Kanak (TK), 155 Sekolah Dasar (SD) terdiri dari 129 SD di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Kendari, 26 Madrasah Ibtidiyah oleh Kementerian Agama Kota Kendari, 65 Sekolah Menengah Pertama (SMP), terdiri dari 42 Sekolah Menengah Pertama di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Kendari, dan 23 Madrasah Tsanawiyah di bawah Kementerian Agama Kota Kendari.

Dalam menginisiasi penyelenggaraan pendidikan inklusif, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikmudora) Kota Kendari bersama Rumpun Perempuan Sultra (RPS) melalui Program INKLUSI-BaKTI melaksanakan asesmen untuk menilai kesiapan sekolah dan memilih salah satu sekolah sebagai *pilot project* penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sekolah yang terpilih sebagai *pilot project* pendampingan penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah SMPN 2 Kendari. Sekolah lainnya tetap diarahkan menyelenggarakan pendidikan inklusif sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kota Kendari Nomor 800/10754/2023.

SMPN 2 Kota Kendari yang dipimpin oleh Bapak Abdul Wahid menyambut baik penunjukan SMPN 2 Kendari sebagai *pilot project* pendampingan penyelenggaraan pendidikan Inklusif. Melalui pendampingan Dinas Dikbud dan RPS, SMPN 2 melakukan banyak inovasi dalam menyediakan akomodasi yang layak sebagai penyelenggara pendidikan inklusif, mulai dari kebijakan sekolah, anggaran, penyesuaian kurikulum dan proses belajar mengajar serta pembangunan sarana dan prasarana sekolah.

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kota Kendari bersama SMPN 2 Kendari kini menjadi rujukan untuk melihat penerapan pendidikan inklusif di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari. Kepala dinas dan kepala bidang di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kota Kendari selalu menjadi narasumber untuk mendiskusikan pendidikan inklusif.

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SMPN 2 Kendari

1. Kebijakan dan Anggaran Pendidikan Inklusif. SMPN 2 Kendari mengeluarkan kebijakan dalam penerimaan siswa baru melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sejak tahun 2023 memberikan kuota 5% bagi anak berkebutuhan khusus. SMPN 2 Kendari juga mengalokasikan anggaran untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan inklusif.
2. Penerapan pembelajaran yang inklusif hingga budaya inklusif. SMPN 2 melakukan asesmen di awal ketika proses PPDB untuk mengetahui jenis dan ragam disabilitas dari calon peserta didik. Dari asesmen tersebut sekolah bisa mengetahui kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) dan mulai menyusun penerapan pembelajaran inklusif sesuai dengan kemampuan/ kapasitas yang dimiliki oleh sekolah.
3. Kolaborasi dan kerjasama antara guru dan peserta didik reguler dan PDPD sangat penting dalam membangun akomodasi layak

dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Termasuk pelibatan seluruh elemen sekolah yaitu tenaga kependidikan hingga sekuriti sekolah.

4. Disamping itu kurikulum yang digunakan dilakukan penyesuaian dengan mengadaptasi Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) yang telah ada dengan penyesuaian sesuai dengan ragam disabilitas Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD).

ULD Bidang Pendidikan

Pada Juli 2024 melalui Surat Keputusan Walikota Kendari, maka Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kota Kendari, membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Pendidikan, dengan merujuk pada Permendikbudristek Nomor 48 tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi.

Personil ULD Bidang Pendidikan terdiri dari berbagai latar belakang; di antaranya pemerintah, praktisi dan unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kolaborasi multipihak pada tim ULD Bidang Pendidikan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkuat ULD Bidang Pendidikan, serta kinerja ULD untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Kendari.

Ketika memasuki halaman kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kota Kendari, kita akan menemukan sarana dan prasarana yang telah menyesuaikan dengan kebutuhan penyandang

disabilitas seperti bidang miring dan jalur khusus penyandang disabilitas. Hal yang sebelumnya tidak ditemui di kantor tersebut.

Tidak hanya merombak tampilan Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga yang lebih inklusif, dinas juga telah menyediakan sarana dan prasarana berupa gedung dan mebeler untuk operasional tim ULD.

Komitmen membentuk ULD adalah upaya yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan akomodasi layak bagi peserta didik penyandang disabilitas di seluruh sekolah. Terutama kebutuhan sumberdaya manusia seperti guru pendamping khusus yang perlu diadakan di setiap sekolah baik jenjang TK, SD, maupun SMP se Kota Kendari.

Tim ULD Bidang Pendidikan telah menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) Layanan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kota Kendari. ULD masih akan menyusun SOP lainnya dalam rangka penyediaan akomodasi layak bagi peserta didik penyandang disabilitas dan juga mewujudkan kualitas penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Tahun 2023 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga juga memberikan sosialisasi pendidikan inklusif, pelatihan Guru Pendamping Khusus (GPK) bagi guru TK, SD, dan SMP se-kota Kendari, serta mengajak kepala sekolah dan guru jenjang SMP melaksanakan studi tiru ke Kota Jogjakarta dan Surabaya.

Menindaklanjuti pendampingan sekolah inklusif, di tahun 2024 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga melaksanakan

pemetaan PDPD pada jenjang TK dan SD sebagai langkah awal untuk memberikan pendampingan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada kedua jenjang tersebut menyusul pendampingan penyelenggaraan pendidikan inklusif sebelumnya pada SMP.

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kota Kendari bersama SMPN 2 Kendari kini menjadi rujukan untuk melihat penerapan pendidikan inklusif di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari. Kepala dinas dan kepala bidang di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kota Kendari selalu menjadi narasumber untuk mendiskusikan pendidikan inklusif.

Demikian pula kepala sekolah SMPN 2 Kendari yang juga selalu menjadi narasumber dalam kegiatan yang mengangkat tema pendidikan inklusif, baik yang diadakan oleh pemerintah seperti Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) maupun oleh media massa seperti RRI (Radio Republik Indonesia), Kendari Pos, dan beberapa media online lainnya.

Tantangan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

1. Kerjasama antara orangtua PDPD yang belum menerima bahwa anaknya memiliki kebutuhan khusus, sehingga dukungan orang tua untuk anak PDPD sangat kurang dalam menyokong anak PDPD belajar khususnya di rumah.
2. Siswa reguler (non PDPD) belum seluruhnya memahami kondisi anak berkebutuhan khusus, sehingga perlu terus menerus disosialisasikan dan diedukasi agar anak-anak bisa



Sosialisasi Unit Layanan Disabilitas (ULD) pendidikan inklusif yang diadakan oleh lembaga RPS bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari untuk sekolah SD, SMP dan SMA se kota Kendari.

mewujudkan akomodasi layak bagi kawannya yang menjadi PDPD.

3. Fasilitas sekolah seperti ruang khusus untuk penanganan anak PDPD belum tersedia, namun sudah direncanakan akan dibangun pada tahun 2025, sehingga anak PDPD bisa terpenuhi kebutuhan khususnya.
4. Beberapa sekolah yang didampingi belum memahami teknis perencanaan Dana BOS bagi pembangunan sarana dan

prasarana pendidikan inklusif, sehingga Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga perlu memberikan pendampingan dan asistensi bagi kepala sekolah dan bendahara Dana BOS agar mereka memahami dan bisa mengalokasikan anggaran untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Rencana Ke depan dalam Meningkatkan Pendidikan Inklusif

1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kota Kendari akan memperkuat ULD Pendidikan, akan bekerjasama dengan stakeholder pendukung seperti Himpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI) Cabang Kendari, Perguruan Tinggi dan lembaga relevan lainnya.
- 2 ULD Pendidikan akan menyusun beberapa SOP untuk memperkuat peran dan kinerja ULD dalam mewujudkan akomodasi layak bagi PDPD sesuai amanat Permendikbudristek Nomor 48 tahun 2023.



Ketersediaan ikan yang melimpah membuat pengurus kelompok konstituen (KK) Mekar di Kelurahan Sodohoa berinisiatif untuk memanfaatkan sumber daya tersebut, dengan membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pembuatan abon ikan.

Penguatan Ekonomi di Kelompok Konstituen

Sarsina

Asisten Program INKLUSI - Rumpun Perempuan Sultra Kendari

Pembentukan kelompok konstituen adalah salah satu pendekatan Program INKLUSI-BaKTI untuk mendorong akses layanan sosial dan pemberdayaan masyarakat marginal dan rentan. Kelompok konstituen merupakan organisasi yang dibentuk oleh warga berbasis pada kepentingan warga dengan tanpa membedakan latar belakang atau alasan apapun, seperti status sosial, agama, suku, ras, laki-laki dan perempuan, serta penyandang disabilitas. Selain itu, kelompok konstituen merupakan perkumpulan yang bersama-sama memperjuangkan apa yang menjadi hak dan kepentingan warga serta kewajibannya. Kelompok Konstituen Mekar di Kelurahan Sodohoa dibentuk dan diakui oleh Pemerintah Kelurahan Sodohoa melalui pemberian surat keputusan, dengan harapan dapat membawa suasana dan kekuatan bagi bagi komunitas di kelurahan tersebut.

Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara adalah salah satu wilayah dampingan (Rumpun

Perempuan Sultra (RPS) pada Program INKLUSI-BaKTI. Kelurahan Sodohoa memiliki 18 RT dan 7 RW, total jumlah Kepala Keluarga 752, jumlah penduduk di periode Oktober 2024 sebanyak 2.842 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.396 jiwa dan perempuan 1.446 jiwa. Mayoritas mata pencaharian terdiri dari pegawai negeri sipil, TNI, Polri karyawan swasta, tukang becak, dan nelayan.

Perumahan penduduk sebagian besar berada di wilayah pesisir. Adapun wilayah pesisir di Kelurahan Sodohoa terdapat 6 RT antara lain RT 03, RT 04, RT 05, RT 06, RT 10, dan RT 11. Sebagian penduduk memiliki penghasilan yang didapatkan dari sumber daya laut, yang merupakan kegiatan ekonomi mereka. Hasil-hasil laut dari penduduk setempat tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat setempat, akan tetapi dikonsumsi juga masyarakat dari luar. Hal ini ditandai dengan adanya tempat pelelangan ikan yang menjual berbagai jenis hasil laut sehingga memudahkan masyarakat sekitar untuk mendapatkan ikan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ketersediaan ikan yang melimpah membuat pengurus kelompok konstituen berinisiatif untuk memanfaatkan sumber daya tersebut, dengan membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Usaha yang dikembangkan adalah pembuatan abon ikan. Kelompok yang telah dibentuk melalui hasil diskusi dengan jumlah anggota sebanyak 10 orang pengurus dari latar belakang yang berbeda-beda, yakni penjual kue, ibu rumah tangga, pedagang, dan penjual gorengan. Tujuan pembentukan kelompok usaha ini adalah untuk mencukupi kebutuhan keluarga, menumbuhkan jiwa wirausaha, memupuk rasa kekeluargaan, dan pengembangan potensi lokal.

Kemandirian ekonomi terus ditingkatkan, dalam memberdayakan potensi sumber daya kelompok, menambah pengetahuan dan keterampilan dalam pengolahan, pemasaran dan pencatatan hasil produksi, namun inisiasi yang telah dilakukan masih membutuhkan pendampingan untuk pengembangan usaha berbasis kelompok. Selain itu, pemberdayaan ekonomi kelompok dapat mengubah kondisi masyarakat dalam memecahkan berbagai persoalan terkait peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan, serta memotivasi potensi yang dimiliki. Untuk itu, RPS akan melakukan pemetaan dan asesmen kapasitas dan potensi sumber daya ikan di Kelurahan Sodohoa.

Adapun tujuan dari pemetaan ini adalah untuk mengetahui potensi sumber daya ikan yang ada di tempat pelelangan ikan, peluang pemanfaatan sumber daya ikan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota kelompok, meningkatnya perlindungan sosial untuk anggota kelompok, serta mengurangi pengeluaran rumah tangga.

Bersama anggota kelompok, kemudian mendiskusikan bagaimana pengembangan usaha. Poin-poin penting di antaranya: segi produksi, pemasaran, dompet keluarga, dan dompet usaha. Hasil penjelasan yang diberikan oleh anggota kelompok mengenai kebutuhan produksi dimulai dengan membeli bahan dasar abon, yakni bumbu dapur, ikan, kemasan, dan gas. Kemudian dilanjutkan dengan mengolah bumbu dan membersihkan ikan, proses pengukusan ikan, hingga dimulai proses produksi yang membutuhkan waktu hingga 7-8 jam. Dalam proses produksi ini melibatkan seluruh anggota kelompok.

Bahan baku ikan dan bumbu secara keseluruhan dapat diperoleh di dalam wilayah Kelurahan Sodohoa, yakni tersedia di pasar lokal dan tempat pelelangan ikan. Produksi yang dapat dicapai dalam waktu seminggu dapat menghasilkan 17 kg abon ikan yang siap dipasarkan secara langsung, seperti teman, keluarga, tetangga, dan media *online*, seperti *whatsapp*. Permintaan produk yang makin banyak tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi anggota kelompok. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan ikan pada musim tertentu yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan stok ikan yang segar dan baik, selain itu dalam proses produksi menyesuaikan waktu dan kesempatan anggotanya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, anggota kelompok menyepakati untuk membangun jejaring dan kerja sama dengan pengepul ikan, ketika musim berganti ketersediaan bahan baku tetap ada. Faktor lainnya adalah membangun komitmen sesama anggota untuk meluangkan dan membagi waktu dalam proses produksi, serta menambah intensitas produksi agar dapat memenuhi permintaan konsumen.

Upaya-upaya ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk RPS agar menghubungkan kelompok dengan pihak lain, sehingga kelompok makin terhubung dengan pihak lain. Kelompok ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan dan dapat mengembangkan sistem untuk mengakses sumber daya yang diperlukan guna kesejahteraan kelompok itu sendiri.

Pemberdayaan kelompok tentunya membawa dampak yang baik dan positif. Pertama, adalah kelompok lebih mandiri. Artinya

anggota kelompoklah yang menjalankan perekonomiannya sendiri dan menentukan apa saja potensi yang telah diangkat serta menjalankan potensi tersebut. Kedua, dapat membangun kemitraan dengan pihak lain yang telah maju dan berkembang, sehingga dapat menjalankan perekonomian yang kuat. Pengembangan usaha berbasis kelompok yang telah digagas oleh pengurus Kelompok Konstituen Mekar di Kelurahan Sodohoa. Saat ini menjadi strategi penting percepatan dalam meningkatkan kesejahteraan yang mampu memberikan dampak yang baik yang tidak hanya dirasakan oleh anggota kelompok itu sendiri, akan tetapi dirasakan juga oleh individu yang ada dalam kepengurusan, serta masyarakat sekitar.

Kolaborasi yang telah dibangun dalam usaha kelompok bersama, membuat anggota kelompok dengan bakat dan keterampilan yang berbeda-beda dapat saling melengkapi dan berkontribusi sehingga menghasilkan capaian yang besar jika dibandingkan mereka bekerja sendiri.

“

Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.

Yvonne Pierre

Penulis & Advokat



monumen
 cinta sejati
 Habibie Alwir

KOTA PARE PARE,
SULAWESI SELATAN



Kelompok Konstituen (KK) Bahagia, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soerang, Kota Parepare yang dibentuk oleh YLP2EM mengembangkan usaha camilan Bakso Goreng (Basreng) yang berbahan baku ikan. Usaha dari KK ini telah mendapatkan bantuan dan pendampingan dari CSR Pertamina mulai dari bantuan peralatan, perizinan dan sertifikasi halal.

Dari dan untuk Kelompok Rentan

Sappe Angka

Asisten Program INKLUSI - YLP2EM Parepare

“ Kami punya mimpi, dengan berkembangnya usaha ini, kami akan mempekerjakan kelompok rentan lainnya yang tidak mendapatkan akses bekerja di luar sana, kami bisa meringankan beban kehidupan kelompok rentan yang tidak punya akses pekerjaan menjadi berpenghasilan. Karena bagi kami tidak ada yang tidak mungkin selagi ada usaha dan kemauan”.

Nurjannah

Ketua Kelompok Konstituen Bahagia

Nurjannah adalah Ketua Kelompok Konstituen (KK) Bahagia. Kelompok tersebut berada di Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soerang, Kota Parepare. Kelompok Konstituen Bahagia dibentuk oleh YLP2EM sebagai salah satu sub mitra Yayasan BaKTI dalam Program INKLUSI. Pengurus KK Bahagia sebanyak 35 orang, dengan susunan struktur terdiri dari: ketua, sekretaris, dan

bendahara sebagai pengurus inti, dilengkapi lima divisi atau bidang yaitu advokasi, data, humas, LBK, dan ekonomi. Pengurus terdiri dari beberapa unsur termasuk kelompok marginal dan rentan, seperti perempuan kepala keluarga (pekka), perempuan miskin, lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan transgender. Pengurus KK mendapat legitimasi berupa surat keputusan dari lurah.

Di tengah sulitnya ekonomi dan kurangnya lapangan kerja yang bisa diakses beberapa unsur yang tergolong kelompok marginal dan rentan, Nurjannah Ketua KK Bahagia menemui langsung Lurah Wattang Soreang, dan menyampaikan akan membentuk sebuah kelompok usaha. Usaha yang tersebut memanfaatkan hasil laut, yang pastinya bahan baku mudah didapatkan, karena Kelurahan Wattang Soreang terletak di pesisir pantai dan sangat dekat dari pasar, serta adanya tempat pelelangan ikan, sehingga sangat berpotensi untuk membuat camilan dengan menggunakan ikan sebagai bahan baku.

Camilan Bakso Goreng (Basreng) kemudian dipilih untuk diproduksi, karena diyakini akan digemari oleh anak-anak dan remaja. Selain disukai oleh anak-anak dan remaja, bakso goreng berbahan baku ikan juga mengandung nutrisi tinggi, sehingga baik bagi pertumbuhan dan perkembangan anak dan remaja. Ikan mengandung nutrisi yang tinggi dan merupakan bahan makanan yang mudah dicerna.

Dengan demikian, membuat bakso goreng, diharapkan selain menyediakan usaha bagi kelompok konstituen, juga dapat mempromosikan ikan sebagai makanan sehat melalui camilan.

Kota Parepare adalah kota yang berada di pesisir, sehingga penduduk Parepare telah akrab dengan ikan. Namun, menyediakan ikan dalam bentuk bakso atau bakso goreng masih terbatas.

Setelah berbagai diskusi dan pertimbangan, serta mendapat masukan dari berbagai pihak, maka dikembangkanlah bakso goreng dengan menggunakan ikan tuna sebagai bahan baku. Ikan tuna yang digunakan sebagai bahan baku dipilih ikan tuna yang segar, agar bakso goreng yang dihasilkan pun berkualitas tinggi.

Pada tahap awal, bakso goreng dibuat berukuran setengah kilo dengan menggunakan kemasan dari plastik biasa, dan dijual dengan harga 5 ribu rupiah. Namun, dengan menggunakan plastik biasa tampilannya sangat tidak bagus serta cepat masa kadaluwarsa/*expired*-nya, dan cepat melempen/lembek sehingga belum bisa mendapatkan keuntungan.

Pada akhir tahun 2022, Lurah Wattang Soreang memfasilitasi pertemuan Nurjannah dengan Firman selaku pendamping *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pertamina. Harapannya, usaha yang dikembangkan KK Bahagia mendapat pendampingan dari Pertamina, dengan pertimbangan wilayah Wattang Soreang merupakan ring satu jarak dari Pertamina. Jika mendapat dukungan dana CSR dan pendampingan dari Pertamina, maka usaha akan lebih berkembang dan bersaing.

Seiring dengan persetujuan dari CSR Pertamina, maka dibuatlah berita acara pembentukan kelompok usaha yang ditandatangani oleh Lurah Wattang Soreang dan pendamping CSR Pertamina.

Kelompok usaha yang dibentuk diberi nama Kelompok Usaha Wanita Berkarya Basreng Marasa, dengan Ketua Hj Asia (lansia), Sekertaris Jumriah (perempuan miskin), Bendahara Nurjannah (pekka), anggota Nurlina (pekka) dan Erna Abbas (perempuan miskin).

Setelah adanya pendampingan dari CSR Pertamina, maka Kelompok Usaha Basreng Marasa, pertama diberikan pelatihan pembuatan bakso goreng, kemudian diberikan peralatan berupa wajan, baskon, coper dan freezer untuk menyimpan bahan baku. Selanjutnya diberikan pelatihan bagaimana cara pengemasan serta difasilitasi dengan kemasan. CSR Pertamina juga memfasilitasi pengurusan semua surat perizinan mulai dari NIB, PIRT dan serta sertifikat halalnya.

Sampai tahun 2024, Basreng Marasa telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Permintaan Basreng Marasa juga sudah datang dari luar Kota Parepare, seperti Balikpapan dan Kendari. Untuk di Parepare, Basreng Marasa telah ada di Bakmi 45, Pojok UMKM yang juga merupakan binaan dari CSR Pertamina, warung-warung yang ada di wilyah Wattang Soreang serta toko usaha Indo Tuo YLP2EM.

Awal pembuatan Basreng Marasa sebanyak dilakukan setiap minggu dengan hasil 54 pcs dengan harga 15 ribu rupiah per piece. Dengan bertambahnya konsumen, saat ini sudah meningkat sampai 3 kali produksi per minggu, dan sudah ada yang bisa diberikan kepada anggota kelompok.

Basreng Marasa ada beberapa varian rasa, rasa balado, jagung bakar, rasa pedas, dan original. Namun terkendala oleh peralatan karena coper yang diberikan CSR Pertamina terlalu kecil, sehingga tidak cocok untuk mengelola basreng, sehingga di bawa ke pasar untuk dilakukan penggilingan. Hal ini biasa tidak menetap adonannya serta cara mengirisnya masih menggunakan manual sehingga hasilnya kadang agak keras.

Untuk saat ini, usaha kelompok Basreng Marasa masih mempunyai kendala termasuk di peralatan dan pemasarannya. Hal ini belum bisa mempekerjakan orang di luar dari kelompok usaha. Harapan kelompok usaha ini, kiranya ada yang bisa membantu untuk mempromosikan Basreng sehingga lebih banyak dicari konsumen. Basreng dari ikan ini mempunyai posisi tawar yang baik dan cukup menjanjikan. Jika usaha ini berkembang, maka dapat mempekerjakan kelompok rentan.

Untuk saat ini lima anggota kelompok usaha yang bergabung. Hasil usaha sudah dapat meningkatkan pendapatan kelompok usaha, terutama untuk menambah pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Namun, harapan dan mimpi terbesar pada pengelola usaha ini adalah mempekerjakan kelompok rentan dan marginal.



Staf lembaga YLP2EM mengikuti lokakarya pengukuran kapasitas organisasi bagi mitra INKLUSI dengan metode *Organization Capacity Assesment (OCA)* yang dikembangkan oleh YAPPIKA.

Membedah “Jantung” YLP2EM dengan OCA

Ibrahim Fattah

Direktur YLP2EM Parepare

Selama tiga hari, 15-17 Januari 2025, Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat atau YLP2EM difasilitasi oleh Yayasan BaKTI dan YAPPIKA Jakarta, atas dukungan Program INKLUSI, melakukan analisis kapasitas organisasi. Analisis kapasitas organisasi tersebut menggunakan alat analisis OCA atau *Organization Capacity Assesment*. Sebuah alat analisis untuk menilai kapasitas organisasi masyarakat sipil yang dikembangkan oleh YAPPIKA.

YAPPIKA telah lama dikenal sebagai organisasi nonpemerintah atau *Non Government Organization* (NGO) yang mengembangkan berbagai metode dan alat untuk pengembangan dan penguatan NGO di Indonesia. YAPPIKA juga mengembangkan metode dan alat untuk peningkatan kapasitas lembaga, pemberdayaan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi program. Sebagai sebuah NGO dan lembaga konsultan yang berpengalaman,

YAPPIKA tidak hanya mendukung pengembangan dan penguatan kapasitas NGO, tetapi juga menjadi model dalam kemandirian NGO di tanah air.

Jauh hari sebelum pelaksanaan OCA, tim BaKTI mengirimkan alat OCA ke YLP2EM untuk diisi secara daring. Masing-masing staf YLP2EM melakukan pengisian dan mengirimkan secara online kepada BaKTI. Mengisi penilaian OCA butuh waktu dan kesabaran karena jumlah pertanyaannya cukup banyak yaitu 57 item pertanyaan. Selain itu, pengisi harus membaca dan memahami secara cermat pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jawaban yang diberikan harus 'obyektif', karena ini terkait dengan kepentingan YLP2EM. Staf YLP2EM diminta untuk melakukan pengisian sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya.

Kegiatan OCA di hari pertama diawali sambutan Direktur Yayasan BaKTI, Muhammad Yusran Laitupa. Mengawali sambutannya, Muhammad Yusran Laitupa menyatakan, tim BaKTI juga sudah melalui proses penilaian kapasitas lembaga seperti yang kawan-kawan tim YLP2EM ikuti hari ini dan selama 3 hari ke depan. Penilaian kapasitas ini penting, sehingga lembaga bisa melihat dan mengukur kemampuannya, bagaimana sumber daya manusia yang ada, bagaimana fasilitas yang tersedia, bagaimana instrumen atau aturan di dalam lembaga, dan seterusnya.

Pada sesi orientasi, Dhany Munggoro dari YAPPIKA, menjelaskan apa pentingnya OCA ini bagi organisasi, salah satunya untuk melihat organisasi seperti fungsi organ pada manusia sehingga organisasi itu punya "nafas" seperti pada manusia. Organisasi itu

merupakan ekosistem sosial. OCA yang digunakan merupakan alat analisis untuk menilai kapasitas organisasi kita sendiri, orang dalam yang menilai organisasinya sendiri yang dinilai secara individu, kemudian direkap menjadi penilaian kolektif organisasi pada aspek; 1) kapasitas teknis, 2) kapasitas fungsional, 3) kapasitas transformasional, dan 4) ekosistem organisasi.

Sedangkan pada aspek ekosistem organisasi, penilaiannya pada bagaimana keterkaitan dan saling mempengaruhi secara kolektif dengan pihak lain. Namun untuk mencapai ekosistem yang mampu mempengaruhi pihak lain, maka secara internal, organisasi harus lebih dahulu mengukur kapasitasnya.

Metode analisis OCA dilakukan dengan 2 tahap yaitu tahap pertama, sebelum pertemuan, dan tahap kedua pada saat pertemuan 3 hari. Pada tahap pertama, setiap individu menilai secara kuantitatif kapasitas organisasi dengan skor 1-4. Semakin tinggi angka penilaiannya berarti kapasitas organisasi semakin baik, demikian pula sebaliknya.

Tahap kedua yaitu di dalam kelas selama 3 hari, metodenya partisipatif. Peserta YLP2EM dibagi dalam 2 kelompok yaitu kelompok senior dan kelompok junior. Kelompok senior menganalisis kelembagaan secara makro sedang kelompok junior menganalisis kelembagaan secara mikro.

Pembagian kelompok senior dan junior dilakukan untuk kebutuhan terkait dengan dua hal. Pertama, pengetahuan dan pengalaman yang berbeda, dan kedua terkait senior-junior dalam bias informasi dan

bias relasi kuasa. Dengan pembedaan seperti ini diharapkan, kelompok senior dapat mengeksplorasi perjalanan lembaga yang cukup panjang, dan pengalaman dalam bersama naik turunnya lembaga. Sementara kelompok junior yang belum terlalu lama bersama lembaga, dapat memberikan penilaian secara mikro, dengan berbagai tantangan dan kebersamaannya di dalam lembaga.

Semua orang bebas berpendapat dan disimpulkan bersama dalam diskusi masing-masing kelompok. Bebas berpendapat secara setara adalah hal mendasar dalam pendirian dan pengelolaan NGO—atau dikenal sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM). Namun, harus diakui bahwa untuk memberi ruang kepada semua orang tidaklah mudah, apalagi terkait dengan hal-hal yang dianggap krusial dalam lembaga. Belum lagi soal senior-junior dan posisi yang kadang menjadi kendala.

Selain menilai kapasitas organisasi, juga ada sesi menilai diri sendiri sebagai faktor penghambat kemajuan individu yang bersangkutan. Semua peserta diberi kesempatan menilai dirinya sendiri dan membangun komitmen personal untuk lebih baik ke depan.

Kedua penilaian ini (organisasi dan personal) sesungguhnya akan menuju pada ekosistem *thinking*—meminjam istilah fasilitator Dhany Munggoro. Di mana keduanya saling terkait dan saling berpengaruh satu sama lainnya. Meski kapasitas organisasi meningkat tetapi jika *character building* personalnya tidak mendukung, maka kapasitas organisasi juga tidak mudah berkembang.

Dari kegiatan OCA selama 3 hari lahir beberapa RTL (Rencana tindak lanjut) yaitu: (1) revisi organ yayasan; (2) perbaikan tata kelola YLP2EM; (3) perbaikan manajemen YLP2EM; (4) memaksimalkan informasi dan komunikasi semua kegiatan YLP2EM melalui website lembaga dan pada semua platform media sosial; (5) memperluas komunikasi dengan pihak lain untuk memperkenalkan fasilitasi peningkatan kapasitas dan jasa konsultan; (6) YLP2EM fokus pada isu inklusi/GEDSI dan perubahan iklim (*branding issue*); dan (7) memperluas jangkauan wilayah kerja YLP2EM dengan pendekatan kawasan.

Semoga kegiatan OCA ini menjadi langkah optimis untuk menata kelembagaan lebih baik ke depan dan YLP2EM menjadi inisiator kolaborasi multipihak, dimana hasil-hasil pembelajaran bersama itu mampu memengaruhi multi pihak itu agar melembagakan dan menginternalisasi pembangunan yang responsif terhadap perubahan iklim dan terwujudnya pembangunan yang inklusif/GEDSI.



Ibu Siangka, warga Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare memanfaatkan pekarangan dan lahan kosong di sekitar rumahnya untuk budi daya kunyit. Tepung kunyit dikemas dan dijual hingga menjadi sumber pendapatan buat keluarga.

Dari Usaha Pribadi Menjadi Usaha Kelompok

Andi Erniyani Engka

Asisten Program INKLUSI - YLP2EM Parepare

Tepung kunyit terbuat dari kunyit mentah yang dijemur hingga kering. Kemudian dihaluskan menggunakan mesin giling. Tepung kunyit ini, bagi masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya digunakan sebagai bumbu untuk memasak ikan dan daging. Kunyit juga digunakan sebagai pewarna makanan, seperti nasi kuning.

Tanaman rempah ini tumbuh subur di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Selain sebagai bumbu masak, kunyit juga digunakan obat herbal sejak lama.

Tanam rizoma ini dibudidayakan warga untuk menambah penghasilan. Seorang warga Kelurahan Lemoe, bernama Siangka, sejak lama bekerja sebagai petani kunyit. Perempuan 35 tahun ini, memanfaatkan pekarangan rumahnya dan lahan kosong di sekitar rumahnya untuk budi daya kunyit.

Suaminya bekerja sebagai buruh tani sawah. Siangka dan suaminya dikarunia dua anak, keluarga ini hidup sederhana, tinggal di rumah

panggung, seperti rumah orang Bugis-Makassar pada umumnya. Di pekarangan rumahnya dan lahan kosong itulah dimanfaatkan Siangka menanam dan memelihara tanamannya, termasuk tanaman kunyit.

Siangka aktif menghadiri pertemuan kelompok konstituen Sumber Harapan di wilayahnya. Siangka semakin semangat dan aktif pada kegiatan kelompok konstituen, setelah diundang sebagai peserta pelatihan manajemen usaha yang difasilitasi oleh Tim YLP2EM dalam Program INKLUSI.

Pada kegiatan pelatihan itu, Siangka mendapat inspirasi bahwa hasil kebun kunyitnya itu bisa menjadi sumber pendapatan keluarga. Bukan hanya itu, Siangka termotivasi mengembangkan usaha kunyitnya itu, dan lahirlah komitmennya agar usaha bisa melibatkan orang lain yang lebih banyak. Saat itu, Siangka berpikir untuk melibatkan tetangganya agar bersama-sama mengembangkan budi daya kunyit dan mengolahnya secara lebih baik, yaitu menjadi tepung kunyit yang layak jual dan terkenal.

Pertemuan informal sering dilakukan bersama tetangganya, akhirnya lahirlah komitmen bersama untuk lebih fokus lagi menanam bibit kunyit lokal dan mengolah kunyit sudah dipanen sebelumnya. Bibit kunyit lokal yang ditanam di Parepare maupun di daerah lain di Sulawesi Selatan dianggap lebih cocok dan mudah dibudidayakan.

Mengolah kunyit mentah menjadi tepung kunyit, Siangka dan tetangganya menggunakan mesin giling, tetapi sebelum dimasukkan ke mesin, Siangka harus mengupas kulit kunyit. Dicuci sampai

bersih. Pastikan proses pencucian dilakukan dengan tepat, yaitu menghilangkan bekas-bekas tanah di kulit kunyit. Mengupas kunyit dan menghilangkan bagian kunyit yang rusak.

Tidak jarang tangan Siangka dan tetangganya sering teriris pisau. Tetapi, kemauan kuat, kini usaha tepung kunyit sudah bisa produksi sesuai permintaan konsumen.

Produksi tepung kunyit Siangka dan kelompoknya memiliki merek "Sumber Harapan" dan sudah dikemas plastik, namun masih sangat sederhana. Jika dilihat dari penampilan kemasannya, masih jauh dari penampilan kemasan yang siap bersaing. Namun sudah ada kemajuan dibandingkan dari sebelumnya ketika masih dikelola oleh Siangka seorang diri.

Kini tepung kunyit Sumber Harapan sedang dalam proses mendapatkan Nomor Induk Berusaha (IMB), setelah IMB ini terbit, akan dilanjutkan mengajukan permohonan mendapatkan Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Dinas Kesehatan Kota Parepare.

Kedua dokumen ini, menjadi syarat untuk mengajukan penerbitan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Tim YLP2EM masih terus berupaya memfasilitasi kelompok usaha tepung kunyit Sumber Harapan agar semua dokumen yang dipersyaratkan dapat dilengkapi.

Pasar tepung kunyit ini cukup luas karena selain dibutuhkan sebagai bahan memasak ikan dalam skala pasar lokal, juga terbuka untuk pasar di luar Kota Parepare, bahkan pemasarannya bisa sampai di

seluruh Indonesia karena para perantau orang Bugis-Makassar tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Lidah warga Bugis-Makassar doyan makan ikan yang dimasak dengan menggunakan tepung kunyit. Karena itu, potensi usaha ini bisa berkembang pesat mengikuti persebaran warga Bugis-Makassar. Ini berarti, pemasaran kunyit yang diproduksi oleh kelompok Sumber Harapan dapat memanfaatkan persebaran dan di mana daerah-daerah yang merupakan "perkampungan" warga Bugis-Makassar.

Sebagai salah satu rempah, dikenal sebagai penyedap dan pewarna makanan. Dan itu merupakan kebiasaan yang telah lama dan turun-temurun. Kunyit juga digunakan sebagai herbal atau pengobatan tradisional, di mana produsen obat-obatan tradisional membutuhkan kunyit berkualitas dan yang diproduksi secara kontinu. Dan jika kunyit tersebut dijual dalam bentuk kering dan kemasan, tentu juga harus memenuhi standar-standar tertentu, yang biasa ditentukan oleh pembeli.

Kini Siangka tidak lagi seorang diri menjalankan usaha pengolahan kunyit menjadi tepung kunyit. Tetapi para tetangganya sebagian sudah ikut terlibat dalam usaha kelompok Sumber Harapan. Ini merupakan suatu langkah maju bagi Siangka dalam memanfaatkan kunyit dan memberdayakan tetangganya.

Kebutuhan Siangka dan anggota kelompoknya saat ini yaitu kemasan yang lebih menarik, teknologi mesin giling kunyit, teknologi pengolahan menjadi tepung, teknologi pengeringan kunyit setelah menjadi tepung kunyit.

Selain itu dibutuhkan trik jitu memasarkan tepung kunyit. Membutuhkan dukungan pemasaran serta pendampingan kelompok, dan dukungan kebijakan Pemerintah Kota Parepare dalam bentuk akses dan jejaring.

Masalah lain dihadapi Siangka yakni cuaca. Saat musim hujan, tidak panen karena setelah panen, harus dijemur menghilangkan kadar airnya. Membutuhkan waktu kira-kira 2-3 hari untuk mengeringkan secara keseluruhan.

Ragam penggunaan olahan tepung kunyit dalam keseharian kita, seperti nasi kuning. Menu tradisional ini disukai masyarakat. Proses membuat nasi kuning membutuhkan tepung kunyit untuk memberikan warna kuning pada nasi, dan itu dapat menggunakan kunyit atau pun tepung kunyit.

Kunyit mengandung sejumlah nutrisi penting. Dalam satu sendok teh kunyit bubuk, terkandung sejumlah nutrisi yang penting bagi tubuh, berupa kalori 29 gram, protein 0,91 gram, lemak 0,31 gram, karbohidrat 6,31 gram, dan serat 2,1 gram. Selain itu, rempah ini mengandung nutrisi lain, seperti mangan, zat besi, potasium, dan vitamin C. Kandungan tanaman rempah ini bisa membuat tubuh makin sehat. Karena itu, kunyit telah lama digunakan sebagai salah satu bahan dalam produksi jamu.



Kegiatan penyusunan SOP UPTD PPA Kota Parepare yang diadakan oleh Program INKLUSI-YLP2EM sebagai bentuk advokasi dengan pendekatan lobi dan fasilitasi kepada OPD terkait.

Advokasi Pembentukan UPTD PPA Kota Parepare

Ibrahim Fattah

Direktur YLP2EM Parepare

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau lebih dikenal P2TP2A, oleh pemerintah dipandang sudah tak memadai menangani kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, yang cenderung semakin meningkat setiap tahun dengan varian kasus yang juga semakin variatif.

Salah satu permasalahan mendasar yang dialami P2TP2A, adalah pada kewenangannya yang terbatas dan kurang fleksibel mengambil keputusan. Secara kelembagaan tidak ada garis komando dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A. Di samping itu, pimpinan atau orang bertanggung jawab pada P2TP2A tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk penanganan kasus perempuan dan anak.

Karena itu, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), membuat kebijakan baru. Semua daerah diminta membentuk kelembagaan,

Tim program YLP2EM butuh waktu untuk memulai tahapan advokasi pembentukan UPTD PPA setelah dilantiknya pejabat walikota yang baru. Lobi masih terus dilakukan kepada pejabat terkait yang sebelumnya terlibat dalam berbagai kegiatan yang mendukung pembentukan UPTD PPA.

diberi nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dipimpin oleh pejabat eselon 4, dengan kewenangan yang lebih luas dan fleksibel sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018. Peraturan ini ditetapkan pada 4 April 2018 dan diundangkan pada 19 April 2018, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang UPTD PPA.

Kebijakan pemerintah pusat kepada daerah, tidak serta merta mendapat respon cepat dari pemerintah daerah. Lambannya respon ini menjadi titik masuk bagi Tim Program YLP2EM untuk melakukan advokasi dengan pendekatan lobi dan serangkaian kegiatan fasilitasi kepada OPD terkait sambil membangun opini melalui media.

Sejumlah kegiatan yang dilakukan sebagai bagian dari upaya advokasi agar Pemerintah Kota Parepare merespon pembentukan UPTD PPA, yaitu Penyusunan Draf Peraturan Walikota tentang

Pembentukan UPTD PPA, dilanjutkan dengan kegiatan Workshop Percepatan Pembentukan UPTD PPA. Setelah draft selesai, dilanjutkan dengan Konsultasi Publik Draft Peraturan Walikota tentang Pembentukan UPTD PPA.

Berbekal dengan draf dan perbaikan atas masukan dari konsultasi publik, dilanjutkan dengan mendampingi Bagian Hukum Pemerintah Kota Parepare untuk dilakukan harmonisasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Makassar. Setelah draf peraturan walikota sudah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Makassar, barulah dapat dilakukan penetapan Peraturan Walikota oleh Penjabat Walikota Parepare Dr. Akbar Ali.

Sedangkan rangkaian kegiatan hingga lahir *Standard Operating Procedure* (SOP) Kelembagaan UPTD PPA yaitu *Focused Group Discussion* (FGD) Penyusunan Draft SOP tentang Petujuk Teknis atau Mekanisme dalam Penanganan Korban Kekerasan. Ditindaklanjuti dengan memfasilitasi diskusi penyusunan Draft SOP UPTD bagi lembaga layanan terkait (Dinas Sosial, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, DP3A, Bappeda, dan Unit PPA Polres). Selain itu, peserta FGD juga melibatkan perwakilan kelompok konstituen, LBK, Paralegal, media dan CSO serta wakil penyandang disabilitas. Peserta FGD diharapkan memberi kontribusi terkait muatan draf SOP pada Mini Workshop Draft Final SOP UPTD PPA.

Meskipun Kepala Dinas DP3A dan pejabat di bawahnya, memahami esensi kebijakan pembentukan UPTD PPA ini, namun itu tidak

cukup, dibutuhkan kebijakan walikota. Proses advokasi-pun dimulai oleh Tim Program YLP2EM. Dilakukan lobi kepada walikota, namun tidak menemukan momen yang tepat karena intensitas walikota pada enam bulan sebelum berakhir masa jabatannya, jadwalnya ke luar kota cukup padat. Maklum, beliau juga Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan, saat itu aktif melakukan konsolidasi di seluruh daerah, setidaknya untuk dua agenda penting, yaitu ingin maju menjadi calon Anggota DPR RI dan calon Gubernur Sulawesi Selatan.

Waktu tak terasa, masa jabatan walikota berakhir pada tanggal 30 Oktober 2024, dilanjutkan oleh Penjabat Walikota Akbar Ali. Tim Program YLP2EM menginisiasi audiens kepada Penjabat Walikota, tujuannya untuk memperkenalkan Program INKLUSI dan menyampaikan pentingnya dibentuk UPTD PPA.

Gayung bersambut, penjabat walikota merespon baik rencana pembentukan UPTD PPA itu, beliau menyampaikan pengalamannya bahwa sebelum ditempatkan di Kemendagri (Kementerian dalam negeri), penugasan pertamanya sebagai ASN yaitu di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Setidaknya isu perempuan dan anak, Akbar Ali sedikit paham. Momentum ini tak disia-siakan. Pada momen audiens itu, tim YLP2EM meminta kesediaan penjabat walikota sebagai Keynote speaker pada acara Workshop Percepatan Pembentukan UPTD PPA, penjabat walikota menyanggupinya.

Pasca kegiatan workshop, serangkaian seri diskusi dengan OPD teknis gencar dilakukan dan berhasil dirumuskan SOP UPTD PPA,

“ Saya sangat mendukung lahirnya UPTD PPA di Kota Parepare dan mengapresiasi segala upaya dan proses yang dilakukan, termasuk terselenggaranya Workshop Pembentukan UPTD PPA. Lahirnya ide UPTD PPA ini adalah kerja kolaborasi pemda dan YLP2EM sebagai salah satu NGO yang telah memberikan kontribusi besar dalam pembangunan manusia di Kota Parepare”.

Akbar Ali

Penjabat Walikota Parepare

dan berhasil ditetapkan Perwali Nomor 2 tahun 2024 tentang Pembentukan UPTD PPA. Seiring berjalannya waktu, Parepare mengalami dinamika politik lokal menjelang pilkada, ada “gesekan” antara penjabat walikota dengan walikota sebelumnya yang kemudian berimplikasi munculnya rumor adanya polarisasi pejabat eselon 2, antara barisan loyalis penjabat walikota dengan loyalis walikota sebelumnya. Salah satu implikasi yaitu calon Kepala UPTD PPA yang sebelumnya sudah santer disebut namanya, tidak jadi dilantik karena penjabat walikota di mutasi ke Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Gesekan atau ketegangan itu bahkan pernah terpublikasi di media lokal. Puncaknya, penjabat walikota dipindahkan oleh Mendagri ke Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Digantikan oleh penjabat walikota yang baru. Kali ini bukan dari pejabat Kemendagri tetapi

berasal dari pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Tim program YLP2EM butuh waktu untuk memulai tahapan advokasi setelah dilantiknya penjabat walikota yang baru. Maklum, tim program YLP2EM, memulai dari awal lagi mengawal pembentukan UPTD PPA. Lobi masih terus dilakukan kepada pejabat terkait yang sebelumnya terlibat dalam berbagai kegiatan yang mendukung pembentukan UPTD PPA. Akhirnya di bulan November, audiens dengan sekretaris daerah dan menyatakan menyanggapi untuk mengusulkan Kepala UPTD PPA untuk diusulkan kembali nota pertimbangan ke penjabat walikota. Penjabat walikota akhirnya menorehkan tanda tangannya sebagai tanda ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Pembentukan UPTD PPA.

Beragam komentar menyertai proses advokasi pembentukan UPTD PPA ini di antaranya; Penjabat Walikota, Akbar Ali pada saat diundang sebagai *keynote speaker* pada acara Workshop Percepatan Pembentukan UPTD PPA, menyampaikan, “saya sangat mendukung lahirnya UPTD PPA di Kota Parepare dan mengapresiasi segala upaya dan proses yang dilakukan, termasuk terselenggaranya Workshop Pembentukan UPTD PPA. Lahirnya ide UPTD PPA ini adalah kerja kolaborasi pemda dan YLP2EM sebagai salah satu NGO yang telah memberikan kontribusi besar dalam pembangunan manusia di Kota Parepare”.

Lain halnya dengan komentar Nurjannah, Ketua Kelompok Konstituen Bahagia, Kelurahan Watang Soreang, menyatakan

bahwa terbentuknya UPTD PPA, saya harapkan pendampingan lebih baik lagi ke depan setelah sudah ada UPTD PPA. Semoga masyarakat khususnya korban atau keluarganya lebih mudah mengakses dan staf UPTD PPA lebih cepat merespon layanannya serta memiliki rasa kepekaan atau empati terhadap korban kekerasan.



Dino (berbaju motif kotak), seorang penyandang difabel fisik di Kampung Pisang, Kota Parepare saat bertugas sebagai Panitia Pemilihan Kelurahan (PPK) pada pemilu 2024.

Dino yang Menginspirasi

Suriyanti Akkas

Program Officer INKLUSI - YLP2EM Parepare

“ **Setiap suara itu penting,
begitu juga setiap tangan yang membantu”.**

Dino

Penyandang disabilitas

Di Kampung Pisang, tinggal seorang pemuda bernama Dino. Dino adalah seorang difabel fisik sejak kecil, kaki kirinya tidak dapat difungsikan karena saat berumur satu tahun jatuh dan mengalami benturan. Namun, keterbatasan itu tak pernah memadamkan semangat dan kecintaannya pada kegiatan sosial.

Dino dikenal warga sebagai pemuda yang aktif, gemar bergaul, dan gemar belajar. Meski harus menggunakan tongkat, ia selalu menyempatkan diri hadir di berbagai acara di kelurahan maupun acara-acara di masyarakat. Dari kegiatan Program INKLUSI dalam

revitalisasi kelompok konstituen, Dino yang bernama lengkap Muhammad Din Wailissa bergabung menjadi bagian dari Kelompok Konstituen Lasinrang, Kelurahan Kampung Pisang.

Sebagai seorang difabel, Dino merasa beruntung bergabung dengan Kelompok Konstituen Lasinrang. Pasalnya tidak semua penyandang disabilitas bisa bergabung dengan organisasi atau kelompok di masyarakat. Di kelompok konstituen, Dino mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Menurut Dino, “bergabung di Kelompok Konstituen Lasinrang membuat saya bisa berbicara dan mengutarakan apa yang ingin disampaikan kepada orang banyak. Harapan saya semoga Kelompok Konstituen Lasinrang bisa merangkul teman-teman disabilitas lainnya untuk ditampilkan berbicara di forum-forum publik agar tak ada lagi disabilitas yang merasa di kesampingkan.”

Dino merasa beruntung karena kesempatan dan ruang untuk penyandang disabilitas sangat terbatas. Penyandang disabilitas sering kali dianggap tidak mempunyai kemampuan dalam berorganisasi dan mengembangkan diri, sehingga mereka tidak mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan mengakses layanan publik pemerintah.

Dino diajak bergabung di kelompok konstituen oleh tokoh perempuan dan tokoh masyarakat, ketika Program INKLUSI-BaKTI bersama dengan YLP2EM sebagai sub mitra, menjadikan masyarakat sebagai salah satu mitra utama melalui penguatan kelompok konstituen. ”Sejak bergabung dengan Kelompok

Konstituen Lasinrang membawa perubahan besar pada saya, yang tadinya tidak tertarik mengikuti kegiatan-kegiatan publik karena keterbatasan fisik. Dari Kelompok Konstituen Lasinrang saya belajar memahami bahwa keterlibatan aktif masyarakat, terutama kelompok rentan sangat penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi semua lapisan masyarakat dapat terakomodasi dengan baik. Melalui Kelompok Konstituen Lasinrang, saya belajar tentang teknik-teknik advokasi yang efektif untuk memperjuangkan hak-hak kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, perempuan, dan anak-anak. Ini meliputi cara menyuarakan isu-isu dan memengaruhi kebijakan publik agar lebih inklusif.” Tutur Dino.

Saat tahun pemilu tiba, Kelurahan Kampung Pisang sibuk mempersiapkan pesta demokrasi. Panitia Pemilihan Kelurahan (PPK) membuka kesempatan bagi warga untuk menjadi penyelenggara pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dino, yang melihat pengumuman itu, merasa terpanggil untuk ikut berkontribusi. Namun, ada rasa ragu dalam dirinya.

Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, Dino belum pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat atau kegiatan sosial, apalagi ini terkait dengan pemilihan umum. Karena bergabung dengan Kelompok Konstituen Lasinrang, Dino telah beberapa kali mengikuti kegiatan atau peningkatan kapasitas, di antaranya mengenai hak asasi manusia, hak-hak perempuan, hak-hak anak, dan pelayanan publik. Karena itu, Dino merasa, mungkin dia bisa mendaftar untuk menjadi PPK.

“Apa bisa aku menjadi bagian dari penyelenggara pemilu? Aku penyandang disabilitas yang mempunyai keterbatasan,” ucap Dino kepada Adrahnita, Ketua Kelompok Konstituen Lasinrang Kelurahan Kampung Pisang sekaligus salah satu ketua PPS. Adrahnita, tersenyum hangat dan berkata, “Dino, pemilu adalah milik semua warga negara. Kamu punya hak yang sama untuk ikut berperan. Keterbatasan bukanlah penghalang selama niatmu kuat”.

Kata-kata Adrahnita, menjadi pembakar semangat Dino. Dengan dukungan keluarga dan teman-temannya, Dino mendaftar sebagai petugas TPS. Banyak warga awalnya meragukan kemampuannya. Beberapa warga bahkan mencibir dan meragukannya, “Apa nanti Dino bisa membawa kotak suara? Bagaimana kalau ada masalah teknis di lapangan?”

Dino tak ingin menyerah. Suara-suara warga yang meragukan kemampuannya tidak menyurutkan Dino, bahkan Dino makin bersemangat karena didukung oleh Ketua dan anggota Kelompok Konstituen Lasinrang. Dino mendaftar untuk menjadi petugas TPS. Selain ingin berkontribusi pada bangsa dan negara, Dino juga ingin menunjukkan bahwa penyandang disabilitas juga mempunyai kemampuan, asalkan diberi ruang dan kesempatan.

Tanggal 14 Februari 2024, hari pemungutan suara tiba. Kelurahan Kampung Pisang dipenuhi suasana semarak. Dino bertugas sebagai salah satu petugas di TPS 02. Ia mendapatkan peran sebagai bagian pendataan pemilih dan pengawas formulir suara. Dengan

tongkatnya, Dino duduk di meja pendataan. Ia menyambut setiap pemilih dengan ramah.

Banyak warga yang awalnya skeptis dan ragu justru kagum dengan ketelitian Dino. Setiap nama pemilih diperiksa dengan hati-hati, setiap formulir diberikan dengan jelas, dan setiap pemilih dipastikan mendapatkan hak suaranya. Bahkan, ia membantu pemilih lanjut usia yang datang ke TPS.

Setelah penghitungan suara selesai dan tugas mereka dinyatakan rampung, seluruh petugas dan warga memberikan apresiasi kepada Dino. Mereka bertepuk tangan meriah sebagai bentuk penghormatan atas dedikasinya.

Adrahnita, yang menyaksikan dari awal, mendekati Dino dan berkata, “Dino, hari ini kamu bukan hanya membantu pemilu berjalan lancar. Kamu juga telah menjadi inspirasi bagi banyak orang di Kelurahan Kampung Pisang.”

Banyak warga belajar darinya bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk berbuat sesuatu bagi masyarakat dan untuk negara. Di Kelurahan Kampung Pisang, Dino membuktikan bahwa setiap individu, apa pun kondisinya, berhak untuk berperan aktif dalam kegiatan demokrasi. Dan semua warga mempunyai hak untuk berpartisipasi dan berkontribusi untuk masyarakat dan negara.

“

Kesetaraan gender lebih dari sekadar tujuan. Ini adalah prasyarat untuk memenuhi tantangan pengurangan kemiskinan, mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan membangun tata pemerintahan yang baik.

Kofi Annan

Diplomat

A blue-tinted photograph of a statue of a person on a horse, likely a historical figure, positioned in front of a building with a dark roof. The statue is white and stands on a dark base. The building behind it has a dark, steeply pitched roof and a small decorative finial on top. The sky is overcast. In the foreground, there are some white, rounded posts or pillars.

**PROGRAM |
INKLUSI - BaKTI**



Penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat memudahkan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), penyandang disabilitas, Anak Berhadapan Hukum, anak dari suku dan agama minoritas dan anak dengan berbagai latar belakang dalam mengakses pendidikan formal.

Semua Bisa Sekolah

Lusia Palulungan

Program Manager INKLUSI - BaKTI

Pendidikan Inklusif

Prinsip *No One Left Behind* telah digaungkan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2017, melalui Rencana Aksi Nasional SDG's (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). Pendidikan menjadi salah satu tujuan, yakni tujuan keempat di dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Tujuan Pendidikan di dalam TPB ini adalah untuk menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Selanjutnya, pendidikan inklusif tercantum di dalam target 4.2 yaitu membangun dan meningkatkan sekolah inklusif dan aman dengan membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang disabilitas, menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70

Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Pendidikan inklusif itu sendiri adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik tanpa membedakan berbagai latar belakang. Selanjutnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi juga telah mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan. Dalam peraturan menteri tersebut, tiap sekolah formal harus menyiapkan Akomodasi yang Layak (AYL) berupa penyediaan dukungan anggaran dan bantuan pendanaan, menyediakan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan penyandang disabilitas serta penyesuaian kurikulum untuk penyandang disabilitas. Amanat itu tertuang secara rinci dalam Pasal 5 bahwa pemerintah daerah dan satuan pendidikan yang dikelola masyarakat diimbau untuk memfasilitasi penyediaan AYL tersebut secara bertahap.

Akses Pendidikan

Menurut data statistik yang dipublikasikan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada Juni 2022, angka kisaran disabilitas anak usia 5-19 tahun adalah 3,3%. Sedangkan jumlah penduduk pada usia tersebut (2021) adalah 66,6 juta jiwa. Dengan demikian jumlah anak penyandang disabilitas atau Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) usia 5-19 tahun berkisar 2.197.833 jiwa. Kemudian, data Kemendikbudristek per Agustus 2021 menunjukkan, jumlah peserta didik pada jalur

Sekolah Luar Biasa (SLB) dan inklusif adalah 269.398 anak. Dengan data tersebut, presentase ABK yang menempuh pendidikan formal, baru sejumlah 12.26%. Artinya masih sangat sedikit dari ABK di Indonesia yang seharusnya mendapatkan akses pendidikan inklusif. Padahal jumlah tersebut dari tahun ke tahun angkanya terus meningkat.

Rendahnya akses ABK terhadap pendidikan, disebabkan oleh banyak faktor, bukan semata keterbatasan jumlah dan jarak tempuh ke SLB. Tetapi pendidikan ABK tidak disarankan lagi untuk mengenyam pendidikan di sekolah khusus, kecuali ABK dengan kondisi disabilitas berat. Faktor lainnya adalah peran orangtua melalui keterlibatannya di dalam pendidikan anak, dimana hal ini merupakan faktor pendorong dan penentu dalam pengembangan pendidikan inklusif. Hal ini mulai dari pengambilan keputusan mengenai penempatan sekolah, hingga kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua yang memiliki ABK. Pada faktanya, banyak anak ABK yang tidak diberikan akses keluar rumah oleh orang tua atau keluarganya karena khawatir anaknya tidak dapat mandiri, mendapatkan perlakuan salah atau *bullying* dan bahkan tidak memiliki waktu dan biaya untuk mengantar atau mendampingi anaknya ke sekolah.

Pada sisi lain, pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi, belum memiliki pemahaman dan perspektif untuk melaksanakan pendidikan inklusif melalui sekolah inklusif. Bahkan banyak yang beralasan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki anggaran untuk penyelenggaraannya. Sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangan bahwa satuan pendidikan memiliki kewajiban untuk

menyelenggarakan pendidikan inklusif dan menyediakan akomodasi layak yang didukung oleh ketersediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK), infrastruktur, metode pembelajaran dan lingkungan sekolah yang inklusif.

Sekolah Inklusif untuk Semua

Pemerintah Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang telah menyelenggarakan pendidikan inklusif melalui sekolah inklusif. Selain mandat peraturan perundangan, Kabupaten Maros juga telah memiliki beberapa peraturan daerah yang koncern pada perlindungan dan pemenuhan hak hak, salah satunya adalah hak pendidikan. Peraturan daerah tersebut antara lain: Perda Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI), Perda Sistem Perlindungan Anak, Perda Kabupaten Layak Anak, Perda tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas.

Hal ini terwujud, salah satunya karena adanya kerja sama dengan BaKTI melalui Program INKLUSI. Dimana Kabupaten Maros, juga merupakan salah satu wilayah kerja Program INKLUSI BaKTI. Salah satu yang dikerjakan bersama dengan pemerintah Kabupaten Maros adalah penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pada tahap awal, BaKTI mendorong pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan Inklusif adalah dengan mengadvokasi penetapan Peraturan Bupati Maros tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Berdasarkan hal tersebut, Bupati Maros kemudian menerbitkan pula beberapa peraturan untuk mengimplementasikan mandat

perda tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas, salah satunya Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Maros oleh Dinas Pendidikan. Peraturan Bupati ini di antaranya mengatur mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan yang memiliki tugas dan fungsi untuk memastikan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus untuk mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah inklusif. Pembentukan ini juga mendukung target Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2024, diharapkan terbentuk Unit Layanan Disabilitas di 38 Provinsi dan 257 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Dalam menindaklanjuti Peraturan Bupati Maros tersebut, BaKTI kembali melakukan pendampingan kepada Dinas Pendidikan dan kemudian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros mengeluarkan Surat Keputusan mengenai pembentukan ULD Pendidikan dan Surat Keputusan yang menetapkan 42 sekolah pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), masing-masing 14 sekolah. Selanjutnya, berkenaan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2024, kepala dinas juga telah mengeluarkan surat keputusan yang diedarkan ke seluruh sekolah pada jenjang pendidikan wajib belajar 9 tahun untuk wajib menerima Anak Berkebutuhan Khusus.

Tugas dan fungsi ULD Pendidikan adalah untuk melaksanakan kebijakan, melakukan analisis, menyiapkan kebutuhan, menyediakan data dan informasi, memberikan rekomendasi, melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan, melaksanakan

pendampingan, dan melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan. Unit Layanan Disabilitas (ULD) berperan untuk menyediakan guru yang memiliki kompetensi dalam memberikan layanan pembelajaran bagi peserta didik penyandang disabilitas di kelas melalui pemberian mata pelajaran pendidikan inklusif.

Penyediaan tenaga pendidik ini dilakukan melalui pendidikan atau pelatihan. Tenaga Pendidik yang telah diberikan pendidikan atau pelatihan akan bertugas memberikan layanan pembelajaran bagi peserta didik penyandang disabilitas di satuan pendidikan dan atau memberikan bimbingan atau pendampingan bagi guru lainnya. Guru yang ditugaskan pada ULD terdata secara sistem pendataan yang dikelola oleh Kemdikbudristek sesuai dengan ketentuan.

Guna mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui sekolah inklusif, Program INKLUSI BaKTI juga mendampingi dan melakukan penguatan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros dan ULD Pendidikan. Berbagai upaya penguatan didiskusikan dan dibahas bersama dan telah melakukan beberapa kegiatan antara lain: pelatihan bagi tenaga pendidik, pendataan ABK, penyediaan fasilitas seperti bidang miring, penyediaan toilet, kursi roda dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan ABK agar dapat mengikuti pembelajaran di kelas. Termasuk, pihak sekolah memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi siswa dan seluruh warga sekolah mengenai ragam disabilitas, dukungan yang diperlukan dan bagaimana menciptakan aksesibilitas dan akomodasi layak bagi penyandang disabilitas.

Selain itu, Pemda Maros dan melalui Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Program INKLUSI BaKTI, juga memfasilitasi staf di Dinas Pendidikan dan ULD Pendidikan, kepala sekolah dan tenaga kependidikan untuk melakukan studi tiru ke kota Yogyakarta dan Surabaya untuk belajar mengenai implementasi pendidikan inklusif baik Dinas Pendidikan maupun di beberapa sekolah pada jenjang pendidikan PAUD/TK, SD dan SMP. Sehingga dengan berbagai penguatan kapasitas tersebut, penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui sekolah inklusif dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan Anak Berkebutuhan Khusus.

Penyelenggaraan ini untuk memudahkan Anak Berkebutuhan Khusus baik penyandang disabilitas, Anak Berhadapan Hukum, anak dari suku dan agama minoritas dan anak dengan berbagai latar belakang yang menyebabkan anak tidak dapat menikmati pendidikan formal. Keberadaan sekolah inklusif ini menjadi sarana bagi semua anak tanpa terkecuali untuk akses pendidikan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan agar pemenuhan hak anak dapat terpenuhi. Akhirnya, semua anak bisa sekolah dan dapat menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas, memiliki kompetensi dan integritas.



Forum Disabilitas Maros (Fordisma) yang pengurusnya berasal dari berbagai organisasi disabilitas di Kabupaten Maros seringkali terlibat dalam beberapa kegiatan penting yang difasilitasi Program INKLUSI-BaKTI dan Pemerintah Kabupaten Maros.

Melibatkan Penyandang Disabilitas

M. Ghufuran H. Kordi K.

Program & Publication Officer INKLUSI - BaKTI

Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization*, ILO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*), jumlah orang dengan disabilitas atau penyandang disabilitas di dunia mencapai 15% dari penduduk dunia. Merujuk data yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa penduduk dunia pada tahun 2024 mencapai 8,2 miliar orang, maka jumlah disabilitas atau difabel di dunia mencapai 1,2 miliar orang.

Jika mengacu pada ILO dan WHO maka jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 42,3 juta orang dari 282 juta penduduk pada tahun 2024. Angka 42,3 juta orang dengan disabilitas adalah suatu jumlah yang sangat besar.

Namun, disabilitas adalah kelompok minoritas, marginal, dan rentan di dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Bahkan di dalam keluarga tertentu, anggota keluarga yang menyandang disabilitas

mengalami berbagai perlakuan yang tidak manusiawi, seperti mengalami diskriminasi dan kekerasan, disembunyikan, tidak dimasukkan dalam anggota keluarga (misalnya dalam kartu keluarga), dan sebagainya.

Penyandang disabilitas mengalami diskriminasi berlapis karena selain menyandang disabilitas, mereka juga menyandang identitas lain, seperti sebagai perempuan, anak, suku minoritas, penganut agama minoritas, dan sebagainya. Seorang perempuan disabilitas dan miskin kemungkinan mendapatkan diskriminasi berlapis sebagai perempuan, sebagai disabilitas, sekaligus kemiskinannya.

Di dalam Konvensi Hak-hak Orang dengan Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons With Disabilities*, CRPD 2006) disebutkan orang dengan disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (Pasal 1).

Empat kategori keterbatasan yang disebut dalam CRPD itulah yang dikenal sebagai ragam disabilitas, yang diadopsi dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas (UU Nomor 8 Tahun 2016). Undang-Undang Penyandang Disabilitas (UUPD) menyebutkan ragam penyandang disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama (Pasal 4 ayat 2).

Karena keterbatasan atau kesulitan yang dialami disabilitas, maka perlu afirmasi yang dilakukan oleh negara dan berbagai lembaga

Pendataan yang dilakukan di 102 desa/kelurahan, terdapat 10-30 orang dengan disabilitas tiap desa/kelurahan. Lebih dari itu, dan ini sangat fundamental bahwa, disabilitas adalah warga negara yang mempunyai hak yang sama dengan yang lainnya.

untuk pemenuhan hak-hak disabilitas, di antaranya adalah partisipasi disabilitas di ruang publik dan pembangunan. Di dalam CRPD terdapat prinsip partisipasi penuh, efektif, dan keikutsertaan dalam masyarakat, serta kesetaraan kesempatan. Sedangkan di dalam UUPD disebut partisipasi penuh, kesamaan kesempatan, dan kesetaraan.

Partisipasi adalah Hak

Penyandang disabilitas berhak untuk berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam urusan publik tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan. CRPD dan UUPD mengamanatkan agar publik dapat mendorong dan membuka ruang agar disabilitas berpartisipasi dalam urusan publik, termasuk mendorong dan memfasilitasi pembentukan organisasi disabilitas untuk mewakili kepentingan disabilitas di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Yayasan BaKTI melalui Program INKLUSI (Kemitraan Australia Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif) bekerjasama dengan organisasi disabilitas di Kabupaten Maros dan Pemerintah Kabupaten Maros memfasilitasi pembentukan organisasi disabilitas yang diberi

nama Forum Disabilitas Maros (Fordisma). Pengurus Fordisma berasal dari berbagai organisasi disabilitas di Kabupaten Maros, di antaranya Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), SHG (*Self Help Group*), *National Paralympic Committee* (NPC), Gerakan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin), dan (Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), serta perwakilan disabilitas dari desa-desa yang merupakan wilayah Program INKLUSI BaKTI dan Sulawesi *Community Foundation* (SCF) yang merupakan mitra dari Kemitraan dalam Program INKLUSI.

Pembentukan Fordisma bertujuan untuk: (1) sebagai wadah berhimpunnya disabilitas (ragam disabilitas) di Kabupaten Maros; (2) sebagai organisasi yang memperjuangkan pemenuhan hak-hak disabilitas; dan (3) sebagai mitra pemerintah dalam pembentukan kebijakan terkait dengan disabilitas.

Forum ini dibentuk untuk menjadi wadah disabilitas dan organisasi disabilitas yang ada di Kabupaten Maros. Setelah dibentuk dan dikukuhkan pada Desember 2022, forum ini terlibat dalam beberapa kegiatan penting yang difasilitasi Program INKLUSI-BaKTI dan Pemerintah Kabupaten Maros. Selain pendataan disabilitas di Kabupaten Maros, forum juga terlibat penyusunan Peraturan Bupati Mengenai Penyandang Disabilitas sebagai turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas. Penyusunan peraturan bupati diperlukan untuk menjadi rujukan bagi Pembentukan Komisi Disabilitas Daerah (KDD) Kabupaten Maros, sebagai amanah dari

Partisipasi penuh di ruang publik dan pembangunan adalah hak disabilitas. Karena itu, baik individu maupun lembaga harus membuka ruang dan kesempatan untuk pelibatan dan partisipasi penuh disabilitas.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas.

Melalui Program INKLUSI, pengorganisasian disabilitas juga dilakukan di tingkat desa dan kelurahan. Mitra BaKTI di tujuh kabupaten/kota (Kabupaten Tana Toraja, Maros, Kupang, Lombok Timur, Kota Parepare, Kendari, dan Ambon) mengorganisasikan pembentukan dan penguatan kelompok yang disebut sebagai Kelompok Konstituen (KK). Di Kabupaten Kupang diberi nama Forum Pemerhati Desa (KPD), dan Kelompok Kerja (Pokja) Inklusi di Kota Ambon.

Pelibatan disabilitas sebagai pengurus dan anggota KK adalah langkah maju. Penyandang disabilitas, umumnya mengakui bahwa pelibatannya di dalam KK adalah pertama kalinya. Itu berarti, selama ini disabilitas tidak dianggap di dalam masyarakat, padahal jumlah mereka di desa/kelurahan tidak bisa diabaikan. Pendataan yang dilakukan di 102 desa/kelurahan, terdapat 10-30 orang dengan disabilitas tiap desa/kelurahan. Lebih dari itu, dan ini sangat

fundamental bahwa, disabilitas adalah warga negara yang mempunyai hak yang sama dengan yang lainnya.

Suara Disabilitas dalam Kebijakan

Di Kota Parepare, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan dan kecamatan telah melibatkan disabilitas sejak tahun 2023. Usulan-usulan disabilitas, sebagaimana juga usulan perempuan dan anak menjadi perhatian sejak Musrenbang di tingkat kelurahan. Pemerintah Kota Parepare juga telah mengalokasi dana yang disebut sebagai Pagu Indikatif Wilayah (PIW) untuk kelurahan, di dalamnya termasuk alokasi untuk disabilitas. Merujuk pada PIW, pemerintah kelurahan harus mengalokasikan anggaran sebesar 15% untuk perempuan, anak, dan disabilitas.

Kebijakan PIW untuk mengakomodasi usulan Musrenbang di tingkat kelurahan bukanlah sesuatu yang baru, tetapi kebijakan Pemerintah Kota Parepare untuk menegaskan alokasi anggaran dalam PIW untuk disabilitas adalah kebijakan yang harus diapresiasi.

Di Kota Ambon, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kelompok Kerja (Pokja) Inklusi yang dimulai pada 2023. Kebijakan ini untuk mengakomodasi kebutuhan dan pemberdayaan kelompok yang di dalamnya menghimpun berbagai perwakilan, termasuk perempuan miskin, disabilitas, dan lanjut usia (lansia).

Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare dan Kota Ambon barulah awal, tetapi itu telah membuka jalan dan contoh

untuk pemenuhan hak-hak disabilitas. Membuat atau mengubah kebijakan untuk mengakomodasi suara disabilitas adalah keharusan dalam pemenuhan hak-hak disabilitas, bukan karena rasa iba atau kasihan.

Pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota perlu membuat kebijakan khusus untuk pemenuhan hak-hak disabilitas. Selama ini kebijakan di provinsi dan kabupaten/kota yang tersedia tidak memadai untuk mengakomodasi pemenuhan hak-hak disabilitas, bahkan kebijakan yang ada masih sangat ableis atau prasangka yang mendiskriminasi dan merendahkan disabilitas.

Aksesibilitas dan Akomodasi Layak

Partisipasi penuh di ruang publik dan pembangunan adalah hak disabilitas. Karena itu, baik individu maupun lembaga harus membuka ruang dan kesempatan untuk pelibatan dan partisipasi penuh disabilitas. Ketika melibatkan disabilitas maka perlu diperhatikan kebutuhan disabilitas untuk mengatasi hambatan dalam partisipasi di ruang publik.

Di dalam CRPD dan UUPD dikenal istilah Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan (Pasal 1 angka 8 UUPD). Sedangkan CRPD menyatakan, agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, maka diperlukan kebijakan yang sesuai untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan

dengan yang lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Kebijakan-kebijakan ini harus meliputi identifikasi dan penghapusan kendala serta halangan terhadap aksesibilitas, harus diterapkan pada, antara lain: (a) gedung, jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruang lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis, dan tempat kerja; (b) informasi, komunikasi, dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat (Pasal 9).

Aksesibilitas berhubungan dengan Desain universal. Di dalam CRPD disebutkan, desain universal berarti desain produk, lingkungan, program dan pelayanan yang dapat digunakan oleh semua orang, semaksimal mungkin, tanpa memerlukan suatu adaptasi atau desain khusus. Desain universal tidak mengecualikan alat bantu bagi kelompok penyandang disabilitas tertentu pada saat diperlukan. Sedangkan Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (Pasal 2).

Disabilitas dapat berpartisipasi dan terlibat dalam masyarakat untuk memperjuangkan dan mengadvokasi hak-haknya, jika

lingkungan cukup aksesibel dan adanya akomodasi yang tersedia untuk disabilitas. Tempat pertemuan atau kegiatan memungkinkan disabilitas menjangkau dengan mudah, seperti jalan yang mempunyai jalur pemandu (*guiding block*) untuk disabilitas buta atau netra, terdapat bidang miring untuk disabilitas yang menggunakan kursi roda. Untuk disabilitas tuli atau bisu, dibutuhkan Juru Bahasa Isyarat (JBI) atau pendamping yang dapat menerjemahkan bahasa isyarat dari disabilitas, dan sebagainya.



Sistem Pelaporan Naratif Inklusif BaKTI (SENARAI), formulir *online* melalui *kobotoolbox* yang dirancang oleh tim Moneyv Program INKLUSI-BaKTI untuk memudahkan pendokumentasian laporan kegiatan dan laporan bulanan yang dibuat oleh sub mitra.

Sistem Pelaporan Naratif Inklusif-BaKTI

Zuriah Auliah Abdullah

Monitoring dan Evaluation Officer INKLUSI - BaKTI

Pendokumentasian capaian memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam konteks pribadi, profesional, maupun organisasi/lembaga. Dokumentasi capaian sangat berguna dalam menyusun laporan atau presentasi, baik untuk keperluan internal maupun eksternal, juga membantu dalam menyampaikan hasil dengan cara yang terorganisir dan mudah dipahami.

Selain itu, pendokumentasian yang baik menghindarkan informasi penting atau pencapaian dari keterlupaan atau hilang seiring waktu. Terlebih jika kita bekerja dalam proyek jangka panjang atau memiliki banyak capaian yang tersebar dalam periode waktu tertentu. Pendokumentasian capaian, secara keseluruhan, tidak hanya merekam sejarah, tetapi juga untuk pengembangan berkelanjutan dan perencanaan di masa depan.

Dalam Program INKLUSI, BaKTI bekerja di tujuh kabupaten/kota pada lima provinsi. Pada 6 kabupaten/kota, BaKTI bekerja sama

dengan mitra daerah atau mitra lokal, yaitu Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) di Kota Parepare, Yayasan Eran Sangbure Mayang (YESMa) di Kabupaten Tana Toraja, Rumah Generasi di Kota Ambon, Rumpun Perempuan Sulawesi Tenggara (RPS) di Kota Kendari, Yayasan Ume Daya Nusantara (UDN) di Kabupaten Kupang, dan Lombok Research Center (LRC) untuk kabupaten Lombok Timur. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Maros ditangani langsung oleh BaKTI dengan membentuk Tim INKLUSI untuk wilayah Maros. Dalam Pelaksanaan program, mitra lokal telah membangun kemitraan dengan 4 *stakeholder* kunci untuk memastikan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, namun tetap menjaga kualitas dari keseluruhan proses.

Program INKLUSI-BaKTI mengharapkan proses implementasi program dapat terdokumentasi dengan baik, sehingga dalam mendokumentasikan seluruh persiapan, proses, dampak, dan capaian dalam implementasi program yang membutuhkan ketelitian dan keteraturan, agar setiap aspek dapat tercatat dengan jelas dan terstruktur. Maka dari itu, dibutuhkan sistem yang dapat mencakup segala aspek dalam monitoring dan evaluasi program.

Menanggapi kebutuhan tersebut, Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program INKLUSI-BaKTI, merancang formulir *online* melalui *kobotoolbox* dalam mendokumentasikan laporan kegiatan dan laporan bulanan yang dinamai Sistem Pelaporan Naratif Inklusif BaKTI (SENARAI). Dalam laporan tersebut telah dilengkapi

seluruh unsur-unsur dalam pelaksanaan kegiatan seperti, waktu dan lokasi kegiatan berlangsung, kontribusi kegiatan terhadap capaian *End of Program Outcome* (EOPO) dan *Key Annual Achievements* (kaa), cerita perubahan yang memenuhi unsur 5W+1H, jangkauan peserta kegiatan, keterlibatan kelompok rentan, dan foto kegiatan.

Laporan bulanan dalam SENARAI juga telah disesuaikan dengan format laporan kemajuan dari Sekretariat INKLUSI pada sistem SOLIS, sehingga dapat memudahkan proses kompilasi laporan dari tiap mitra daerah. Dalam penggunaannya, SENARAI juga dapat digunakan dalam kondisi *offline*, dimana informasi kegiatan tetap akan terekam dalam sistem, dan akan terkirim jika telah terhubung dengan jaringan internet (*online*). Sehingga memudahkan mitra daerah dapat memasukkan laporan ketika melakukan kegiatan di desa walaupun belum tersambung jaringan internet.

Selain menggunakan SENARAI, Monev Program INKLUSI-BaKTI juga menggunakan *Google sheet* pada masing-masing mitra daerah untuk mendokumentasikan data pendukung dalam capaian program, seperti database penerima manfaat, tabulasi media monitoring, dan *summary* capaian kuantitatif program.

Dalam proses transisi pelaporan mitra daerah yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan menggunakan Microsoft Word ke SENARAI membutuhkan penyesuaian dan pelatihan dalam penggunaannya, maka dilakukan kunjungan ke mitra daerah terkait sosialisasi SENARAI. Pada kunjungan tersebut dibahas cara pengisian, menyunting, dan mengunduh data yang kemudian dilakukan ujicoba penggunaan SENARAI.

Dalam proses itu juga mitra daerah banyak memberikan masukan terhadap sistem SENARAI terkait apa saja yang penting untuk didokumentasikan. Hal ini sangat membantu dalam perkembangan dan penggunaan SENARAI. Selain sosialisasi penggunaan SENARAI juga dilakukan pelatihan dalam penginputan database dalam *Google sheet*. Pelatihan ini diharapkan agar mitra daerah dapat menginput data dengan konsisten, dan teratur sehingga memudahkan dalam tabulasi data. *Google sheet* ini juga telah dilengkapi dengan *summary* capaian sehingga memudahkan sub mitra BaKTI untuk *mentracking* progress capaiannya.

Di tahun 2025, Monev INKLUS-BaKTI lebih memaksimalkan penggunaan SENARAI dalam mendokumentasikan kemajuan program, yang sebelumnya digunakan untuk laporan kegiatan dan bulanan, akan menambahkan beberapa fungsi lainnya seperti laporan pendampingan asisten program, media monitoring, dan Impact log. Laporan pendampingan asisten program, digunakan oleh asisten program yang secara rutin melakukan kunjungan ke desa.

Laporan ini digunakan untuk mendokumentasikan informasi-informasi yang didapatkan dari hasil kunjungan tersebut seperti waktu dan lokasi kunjung, tujuan kunjungan, dan informasi dari beberapa hal yang secara rutin di monitoring seperti regulasi desa dan impementasinya; pencatatan kasus KtP/KtA dan perlindungan sosial; pendampingan unit usaha dan manfaat ekonomi terhadap individu yang terlibat dalam kelompok usaha; keaktifan LBK dalam pendampingan kasus; keaktifan kelompok konstituen/Pokja/KPD;

pelibatan kelompok rentan dalam kegiatan politik di desa; pemenuhan kriteria desa inklusif; dan sebagainya. Laporan tersebut akan diisi sesuai dengan tujuan kunjungan asisten program.

Selain itu juga ada Media monitoring yang dapat diisi oleh mitra daerah dalam mendokumentasikan link artikel atau berita yang berkaitan dengan isu GEDSI. Dan juga ada *impact log* atau cerita perubahan, yang diisi oleh mitra daerah untuk mendokumentasikan cerita-cerita perubahan. Format *impact log* ini telah disesuaikan dengan *impact log* yang ada pada sistem SOLIS.

Dokumentasi yang baik akan memudahkan evaluasi, identifikasi perbaikan, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai keberhasilan atau tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program. Saat ini SENARAI telah digunakan secara efektif oleh sub mitra daerah BaKTI, dalam mendokumentasikan capaian dan kemajuan program. Mitra daerah juga secara efektif menggunakan *Google sheet* dalam mendata kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlindungan sosial, dan update database pendukung lainnya.

TENTANG EDITOR

- **HALIA ASRIYANI**
Communication Officer BaKTI
- **LUSIA PALULUNGAN**
Program Manager INKLUSI-BaKTI
- **M. GHUFRAN H. KORDI K**
Program & Publication Officer INKLUSI-BaKTI
- **RIVAI**
Program Officer INKLUSI-BaKTI
- **VICTORIA NGANTUNG**
Communication Manager BaKTI
- **ZURIAH AULIAH ABDULLAH**
Monitoring & Evaluation Officer INKLUSI-BaKTI

LEMBAGA MITRA

PROGRAM INKLUSI-BaKTI



Lombok Research Center (LRC)

Alamat : Griya Catra Regency Blok B3 No. 8 Semat
Desa Danger, Kec. Masbagik Kabupaten
Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat -
83661

Telp : 0818 366 383

Email : info.lrc2014@gmail.com

Website : www.lrcfoundation.com



Rumah Generasi

Alamat : Jl. Ina Tuny X, No 2 RT 001/RW 04 Karang
Panjang, Kel. Amantelu, Kec. Sirimau- Kota
Ambon, Maluku.

Telp : 0852 4329 3935

Email : rumahgenerasi01@gmail.com

Website : www.rumahgenerasi.org



Rumpun Perempuan Sultra

Alamat : BTN Medibrata Indah II Blok C. No. 8, Jl.
Manggis Kel. Lepo-Lepo, Kec. Baruga, Kota
Kendari, Sulawesi Tenggara - 93116.

Telp : 081341517413

Email : rumpunperempuansultra@gmail.com

Website : www.rumpunperempuan.or.id



Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM)

Alamat : Jl. Jend Ahmad Yani No. 30 Kota Parepare,
Sulawesi Selatan.

Telp : 0421-24167/0812-4265-292

Email : lp2em_pare@yahoo.co.id

Website : www.ylp2em.or.id



Yayasan Eran Sangbure Mayang (YESMa)

Alamat : Jln. Pasar Baru No.52, Kel. Tondon Mamullu,
Kec. Makale, Tana Toraja, Sulawesi Selatan.

Telp : 0813-5414-8109

Email : yeransangburemayang@gmail.com

Website : www.yesma.or.id



Yayasan Ume Daya Nusantara

Alamat : Jl. Bumi II Gg. Aquarius No. 3 Kel. Oesapa
Selatan, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang,
Nusa Tenggara Timur.

Telp : 0380-8803-362/0812-3910-5745

Email : umedayanusantara@gmail.com

Website : www.udn.or.id



Sekretariat Tim INKLUSI-BaKTI Maros

Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Maros

Alamat : Jl. Asoka No. 1 Pattuadæ,
Kec. Turikale, Kab. Maros - 90511
Sulawesi Selatan

Narahubung : Ismawati (081355607654)

Website : www.bakti.or.id

Tulisan-tulisan yang disebut sebagai **Cerita Perubahan dan Pembelajaran** ini berasal dari tujuh wilayah Program INKLUSI-BaKTI. Artikel-artikel di dalam buku ini, satu dan lainnya bisa sama dan terkait, baik substansi maupun redaksi. Itu terjadi karena program ini menggunakan pendekatan yang sama, walaupun dalam pelaksanaannya, berbagai strategi dan adaptasi dilakukan untuk penyesuaian dengan wilayah masing-masing.

Sebanyak 41 tulisan dihimpun di dalam buku ini yang disusun berdasarkan kabupaten/kota wilayah program. Jadi, kabupaten/kota dijadikan semacam bab, yang di dalamnya berisikan tulisan-tulisan di wilayah program. Penulis cerita di dalam buku ini berasal dari berbagai level/jabatan dalam lembaga mitra Program INKLUSI-BaKTI, mulai dari direktur hingga asisten program atau pendamping di tingkat desa/lembang (sebutan desa di Toraja); negeri (desa adat di Ambon) dan kelurahan. Bagian akhir buku ini dimuat tiga tulisan yang ditulis oleh Tim Program INKLUSI-BaKTI.



Yayasan BaKTI

Jl. Daeng Ngeppe No. 1/10 Makassar 90223,
Sulawesi Selatan - Indonesia

☎ +62 411 832228, +62 411 833383

🌐 bakti.or.id

✉ info@bakti.or.id

📘 [yayasanbakti](https://www.facebook.com/yayasanbakti)

📷 [InfoBaKTI](#)

📺 [InfoBaKTI](#)

▶ [YayasanBaKTI](#)